Kertas Kerja SMERU

DRAF*

# Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006–2016

Nila Warda

Elza Elmira

Mayang Rizky

Rachma Nurbani

Ridho Al Izzati


*Dokumen ini telah disetujui untuk pratinjau dalam jaringan, tetapi belum melewati proses *copyediting* dan *proofreading* sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara versi ini dan versi final. Bila Anda mengutip dokumen ini, indikasikan sebagai "draf".


YAYASAN TIFA

smeru RESEARCH INSTITUTE

**KERTAS KERJA SMERU**

# Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006–2016


Nila Warda

Elza Elmira

Mayang Rizky

Rachma Nurbani

Ridho Al Izzati

**Editor**

Budhi Adrianto



**The SMERU Research Institute**

**November 2018**

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Foto Sampul: Dok. SMERU

# UCAPAN TERIMA KASIH

Kertas kerja ini dapat selesai berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Yayasan TIFA yang telah memfasilitasi terselenggaranya penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ir. Nono Rusono, M.Si., Kasubdit Bidang Pangan, Kementerian PPN/Bappenas; dan Muhammad Syukri, kandidat Ph.D. dari University of Western Australia, yang telah meninjau substansi hasil studi ini dan turut menyempurnakan kertas kerja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada rekan-rekan dari pemerintah dan ornop yang telah hadir dalam kelompok diskusi terfokus studi ini dan memberikan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan dan penajaman temuan studi.

# ABSTRAK

## Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006-2016

Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Nurbani, dan Ridho Al Izzati

Topik ketimpangan menjadi isu yang hangat dalam perdebatan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah perdesaan yang dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan ketimpangan. Studi ini bertujuan melihat berbagai faktor dalam kerangka modal penghidupan dan mengaitkannya dengan dinamika ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan. Termasuk dalam modal penghidupan adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, modal infrastruktur fisik, modal keuangan, dan modal sosial. Hasil analisis studi ini diharapkan memberi gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya pengurangan ketimpangan, terutama hal-hal yang menghalangi masyarakat kelompok termiskin untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Analisis dalam studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis deskriptif dengan menampilkan tabulasi silang antara indikator-indikator yang mewakili masing-masing modal penghidupan di satu sisi dan kelompok kesejahteraan di sisi lain. Sumber data utama yang digunakan adalah, antara lain, Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Indonesia Family Life Survey (IFLS), Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Potensi Desa, dan data Peta Kemiskinan Indonesia.

Beberapa hal yang diduga berkaitan dengan atau turut berkontribusi pada ketimpangan ekonomi perdesaan terlihat melalui studi ini, seperti rendahnya capaian pendidikan kelompok termiskin perdesaan, dominasi kelompok terkaya dalam penguasaan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih tersebar di desa-desa maju, serta ancaman kohesi sosial yang bersumber dari keberagaman identitas dengan diiringi sikap primordialisme dan berujung pada konflik sosial. Faktor-faktor ini selanjutnya akan disempurnakan pada kertas kerja kedua dan ketiga dengan menguji kekuatan kontribusi masing-masing faktor dan membandingkan besarannya dalam menjelaskan perubahan ketimpangan perdesaan. Berdasarkan temuan dari ketiga kertas kerja tersebut, implikasi kebijakan yang lebih konkret dapat diformulasikan.

Kata kunci: ketimpangan, modal penghidupan, perdesaan

# DAFTAR ISI


UCAPAN TERIMA KASIH i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM vii

I. PENDAHULUAN 1
- 1.1 Kondisi Umum Ketimpangan 1
- 1.2 Mengapa Penting Melihat Ketimpangan di Perdesaan di Indonesia? 3
- 1.3 Gambaran Studi 5

II. KETIMPANGAN DAN PERKEMBANGAN PENGHIDUPAN DI DESA 10
- 2.1 Wilayah Perdesaan di Indonesia Makin Sejahtera namun Makin Timpang 10
- 2.2 Struktur Ekonomi Desa yang Telah Berubah 14
- 2.3 Transisi Penghidupan Masyarakat Perdesaan 15

III. SUMBER DAYA MANUSIA PERDESAAN 20
- 3.1 Tantangan Demografi: Urbanisasi dan Rasio Beban Ketergantungan yang Tinggi 20
- 3.2 Pendidikan Masyarakat Perdesaan: Akses yang Lebih Baik dan Tantangan Capaian Pendidikan Tinggi 22
- 3.3 Kualitas Kesehatan Masyarakat Perdesaan: Paritas dalam Keluhan Kesehatan dan Akses Layanan Kesehatan Dasar, namun Disparitas dalam Capaian Gizi 26

IV. SUMBER DAYA ALAM PERDESAAN 32
- 4.1 Kesejahteraan dan Ketimpangan antardesa dengan Tipologi Wilayah yang Berbeda 33
- 4.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa: Ketimpangan Akses Lahan Pertanian dan Kebutuhan akan Pengelolaan Irigasi yang Baik 37

V. INFRASTRUKTUR FISIK DAN PENDUKUNG PEREKONOMIAN PERDESAAN 40
- 5.1 Jalan, Komunikasi, dan Listrik yang Membuka Kesempatan sekaligus Membawa Risiko Ketimpangan 41
- 5.2 Diskrepansi Infrastruktur Pendukung Perekonomian Perdesaan 44

VI. MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA: PARTISIPASI, TOLERANSI, POLA RELASI 47
- 6.1 Partisipasi Sosial yang Tinggi, namun Kepercayaan Sosial yang Rendah 48
- 6.2 Hubungan Tidak Linier antara Keberagaman Identitas Sosial dan Ketimpangan Ekonomi 53
- 6.3 Dukungan Sosial antara Masyarakat Perdesaan Tidak Lebih Tinggi daripada Masyarakat Perkotaan 55
- 6.4 Hubungan Dua Arah antara Konflik Sosial dan Ketimpangan Ekonomi 56

VII. KESIMPULAN DAN STUDI LANJUTAN 59

DAFTAR ACUAN 61

# DAFTAR TABEL


Tabel 1. Indikator Modal Penghidupan 8

Tabel 2. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Sektor Pekerjaan di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2006 dan 2016 14

Tabel 3. Rata-rata Usia Petani, 2006 dan 2015 15

Tabel 4. Prevalensi Masalah Gizi antarkelompok Wilayah dan Masyarakat Indonesia, 2013 28

Tabel 5. Tipologi Desa 33

Tabel 6. Penguasaan Lahan Nasional, 2013 37

Tabel 7. Penguasaan Lahan Pertanian di Setiap Wilayah, 2013 38

Tabel 8. Persentase dan Jumlah Desa dengan Jaringan Irigasi yang Mengalami Kerusakan berdasarkan Kondisi Topografi, 2011 dan 2014 40

Tabel 9. Jenis Konflik berdasarkan Wilayah 58


# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Ketimpangan (indeks Gini) dan Kemiskinan di Indonesia (Desa dan Kota) Tahun 1999-2017 2

Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006 – 2016 3

Gambar 3. Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Menurut Wilayah (Desa, Kota, dan Desa+Kota) 1999 - 2017 4

Gambar 4. Ketimpangan Menurut Wilayah, 1996 – 2017 5

Gambar 5. Ketimpangan (Indeks Gini) dan Kemiskinan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 dan 2016 11

Gambar 6. Perubahan Ketimpangan (Indeks Palma), 2006 dan 2016 12

Gambar 7. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Berbagai Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006 – 2016 13

Gambar 8. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Subsektor Pertanian di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2014 15

Gambar 9. Perpindahan Lokasi Tempat Tinggal diantara Pekerja dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil) 16

Gambar 10. Perubahan Sektor Bekerja diantara Pekerja yang Menetap di Perdesaan dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil) 18

Gambar 11. Komposisi Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2006 dan 2016 21

Gambar 12. Piramida Penduduk 21

Gambar 13. Rasio Beban Ketergantungan antarkelompok Pendapatan di Perdesaan, 2006-2016 22
Gambar 14. Angka Partisipasi Kasar berdasarkan Kelompok Kesejahteraan, 2006 dan 2016 24
Gambar 15. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni berdasarkan Kelompok Kesejahteraan dan Gender, 2006 dan 2016 25
Gambar 16. Tingkat Pendidikan Tertinggi di Perkotaan dan Perdesaan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran, 2006 dan 2016 (dalam persen) 26
Gambar 17. Perbandingan Proporsi Keluhan Kesehatan Penduduk Usia Produktif (15-65 tahun) di Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan Kuintil Pengeluaran Per Kapita, 2006-2014 27
Gambar 18. Prevalensi Masalah Gizi antarkelompok Kesejahteraan di Perdesaan Indonesia, 2013 29
Gambar 19. Perbandingan Proporsi Kelahiran dibantu Tenaga Kesehatan di Perdesaan, 2006-2016 30
Gambar 20. Perbandingan Proporsi Cakupan Imunisasi Lengkap Anak Usia 12-24 Bulan di Perdesaan, 2006-2016 31
Gambar 21. Perbandingan Proporsi Keluarga dengan Jaminan Kesehatan di Perdesaan, 2006-2016 32
Gambar 22. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Topografi Wilayah 2014 34
Gambar 23. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Laut 2014 35
Gambar 24. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Hutan 2014 36
Gambar 25. Desa yang Ada di dalam/sekitar Hutan menurut Fungsi, 2011-2014 36
Gambar 26. Distribusi Penguasaan Lahan di antara Rumah Tangga Sektor Pertanian 39
Gambar 27. Persentase Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dengan Kondisi Baik pada 2011 dan Kelompok Kesejahteraannya pada 2015 41
Gambar 28. Hubungan antara Proporsi Desa dengan Kualitas Sinyal Komunikasi yang Baik pada 2011 dengan Tingkat Kesejahteraannya pada 2015 42
Gambar 29. Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dan Komunikasi yang Kondisinya Baik (dalam persen) Berdasarkan Kuintil Indeks Gini, 2014 43
Gambar 30. Akses Listrik Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan di Desa, 2006-2016 43
Gambar 31. Persentase Desa Tanpa Aliran Listrik, 2014 44
Gambar 32. Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Finansial 2011 Berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen) 45
Gambar 33. Keberadaan Komplek Pertokoan dan Pasar 2011 berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen) 46
Gambar 34. Partisipasi di Setidaknya Satu Jenis Kegiatan Kemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014 49
Gambar 35. Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014 50

Gambar 36. Preferensi dalam Memilih Pemimpin/wakil rakyat Rakyat Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014 51

Gambar 37. Sikap tidak Percaya kepada Orang dengan Agama/Etnis Berbeda Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014 52

Gambar 38. Fitted Line antara Ethnic Fractualization Index dan Indeks Gini 54

Gambar 39. Fitted Line antara Religion Fractualization Index dan Indeks Gini 55

Gambar 40. Distribusi dan Prevalen atas Dukungan Informal dari Masyarakat 2014 56

Gambar 41. nsiden konflik per Provinsi 2011 dan 2014 (Persentase dari total Konflik) 57

Gambar 42. Desa yang Mengalami Konflik pada 2011 Berdasarkan Kelompok Ketimpangan Desa 2015 (%) 58

# DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

| | |
|---|---|
| ADB | Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) |
| APK | angka partisipasi kasar |
| APM | angka partisipasi murni |
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) |
| Askeskin | Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin |
| Balitbangkes | Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan |
| BCG | bacillus Calmette- Guērin |
| BPJS | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| BPJS PBI | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran |
| BPR | Bank Perkreditan Rakyat |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPT | diphteria, pertussis, tetanus |
| ERF | Ethnic Fractionalization Index |
| ERFe | Ethnic Fractionalization Index (Ethnics) |
| ERFr | Ethnic Fractionalization Index (Religion) |
| ETA | Euskadi Ta Askatasuna |
| FAO | Food and Agriculture Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian) |
| IFLS | Indonesian Family Life Survey |
| Jamkesmas | Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| KB | Keluarga Berencana |
| KBBI | Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| LANDac | Netherlands Academy on Land Governance |
| NTB | Nusa Tenggara Barat |
| NTT | Nusa Tenggara Timur |
| PDB | Pendapatan Domestik Bruto |
| PNPM | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri |
| Podes | pendataan Potensi Desa |
| Poskamling | pos keamanan keliling |
| Riskesdas | Riset Kesehatan Dasar |
| SAE | *small area estimation* |
| SD | Sekolah Dasar |

| | |
|---|---|
| SMA | sekolah menengah atas |
| SMP | sekolah menengah pertama |
| Supas | Survei Penduduk Antarsensus |
| Susenas | Survei Sosial-Ekonomi Nasional |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development |
| UNDP | United Nation Development Program |
| UNU WIDER | United Nations University World Institute for Development Economics Research |
| UU | Undang-undang |

# I. PENDAHULUAN

Capaian ekonomi yang impresif diraih oleh Indonesia dalam dua dekade terakhir, namun ketimpangan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama di perdesaan. Tingkat kemiskinan yang tinggi, dominasi sektor pertanian berproduktivitas rendah, dan keterbatasan infrastruktur layanan dasar menjadi hambatan laten bagi wilayah ini untuk memperkecil jurang pertumbuhan pendapatan antara kelompok termiskin dengan kelompok kesejahteraan di atasnya. Penurunan ketimpangan di perdesaan adalah sebuah urgensi dan pemahaman mengenai ketimpangan di perdesaan menjadi hal yang penting untuk mendukung upaya pemberdayaan desa yang saat ini tengah secara masif didorong oleh pemerintah dan mitra pembangunan. Kertas kerja ini disusun berdasarkan Studi Dinamika Ketimpangan di Perdesaan di Indonesia yang akan memberi gambaran tentang dinamika ketimpangan dan penghidupan masyarakat di wilayah perdesaan Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2006-2016).

## 1.1 Kondisi Umum Ketimpangan

Lepas dari Krisis Keuangan Asia 1997/1998 Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada kisaran 5%-6% dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga lebih dari separuhnya (The World Bank, 2015). Peningkatan kesejahteraan agregat diraih dengan pendapatan per kapita yang naik hingga menempatkan negara ini ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Fantom dan Serajuddin, 2016; The World Bank, 2014). Namun, perlambatan laju penurunan kemiskinan yang dialami oleh Indonesia beberapa tahun terakhir ini menimbulkan pertanyaan terhadap pemerataan manfaat pembangunan ekonomi yang telah diraih tersebut. Sebelum Krisis Keuangan Asia (1976 hingga 1996), penurunan kemiskinan Indonesia mencapai rata-rata tahunan 1,44, namun berkurang hingga hanya 0,61 pada periode 2002 hingga 2010 (Suryahadi, Hadiwidjaja, dan Sumarto, 2012). Sepanjang 2011-2014 tingkat kemiskinan Indonesia tidak beranjak jauh dari kisaran 11%-12%. Bahkan, penurunan kemiskinan Indonesia antara 2012-2013 hanya sebesar 0,5% poin dan merupakan penurunan terkecil dalam satu dekade terakhir (The World Bank, 2014). Hingga 2017 masih terdapat sekitar 28 juta atau 10,6% penduduk Indonesia yang masih perlu diungkit kesejahteraannya, sebagian besar di antaranya berada di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Perlambatan laju penurunan kemiskinan terjadi bersamaan dengan stagnasi penurunan ketimpangan. Setelah Krisis Keuangan Asia 1997/1998, pada kurun waktu 1999 hingga 2011 ketimpangan Indonesia naik sebanyak 32% poin, dengan peningkatan indeks Gini dari 0,311 menjadi 0,410. Sejak itu, ketimpangan memang cenderung tidak naik namun terus mengalami stagnasi, dengan kisaran Gini yang tidak beranjak turun dari 0,4. Baru pada 2016 dan 2017, indeks Gini menurun sedikit ke angka 0,397 dan 0,393 (Gambar 1). Indeks Gini yang menyentuh kisaran 0,4, selain mengindikasikan ketimpangan di dalam negara yang tinggi, juga menjadikan Indonesia salah satu negara dengan ketimpangan tertinggi di antara negara-negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan di antara negara kelompok pendapatan menengah-bawah dunia (The World Bank, 2016).

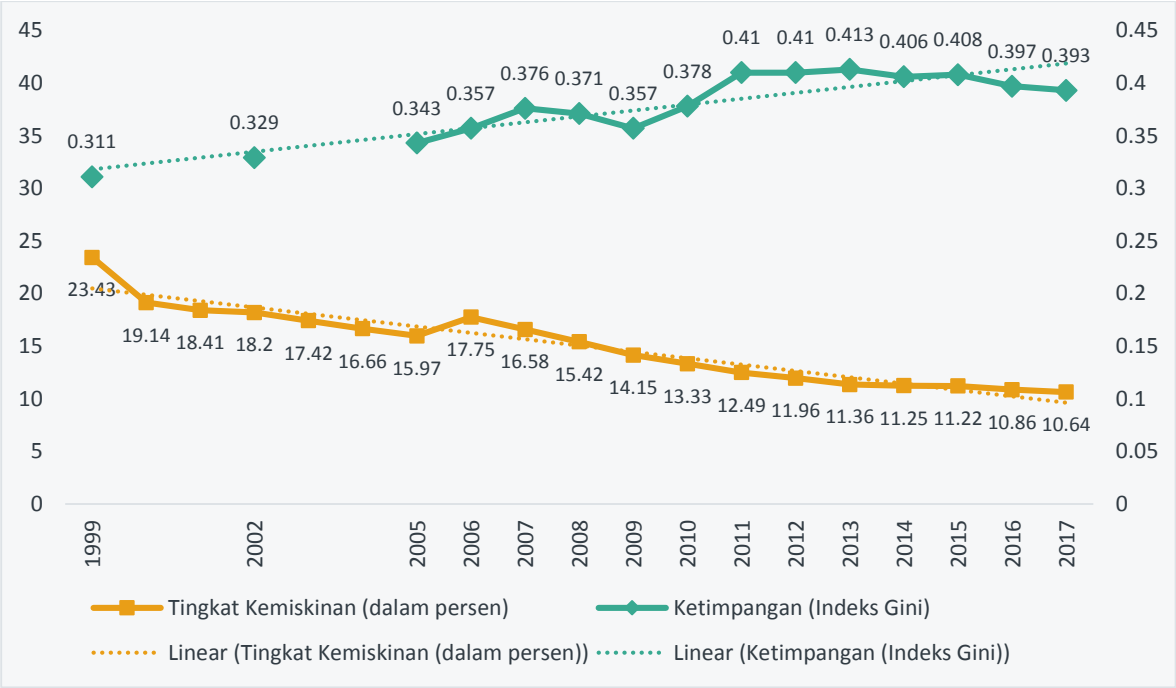


**Gambar 1. Ketimpangan (indeks Gini) dan Kemiskinan di Indonesia (Desa dan Kota) Tahun 1999-2017**

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun.

Ketimpangan di Indonesia dapat dijelaskan oleh pertumbuhan penghasilan yang tidak seimbang antara kelompok termiskin dan kelompok terkaya. Pertumbuhan pengeluaran rata-rata penduduk terkaya Indonesia secara umum lebih tinggi dibandingkan kelompok penduduk miskin dan termiskin. Kecenderungan yang sama juga ditunjukkan oleh wilayah perdesaan. Kurva insiden pertumbuhan (*growth incidence curve*—GIC) yang memperlihatkan pertumbuhan pengeluaran menurut kelompok kesejahteraan perdesaan pada berbagai periode tahun, menjelaskan hal ini (Gambar 2). Dalam kurun waktu 2006 hingga 2016 orang-orang terkaya di perdesaan, yang jumlahnya kurang dari 5% dari total penduduk perdesaan, pendapatannya tumbuh pada kisaran 7% hingga lebih dari 8%; jauh meninggalkan kelompok lainnya, yang pertumbuhan pendapatan rata-ratanya hanya berkisar 6,5% per tahun. Sementara itu, 40% penduduk termiskin desa mengalami pertumbuhan yang lebih kecil lagi, antara 3,5% hingga 5,5%. Di antara mereka yang berada di kelompok 40% termiskin ini adalah orang-orang yang mengalami kemiskinan struktural, dengan pertumbuhan pendapatan kurang dari 4% saja.

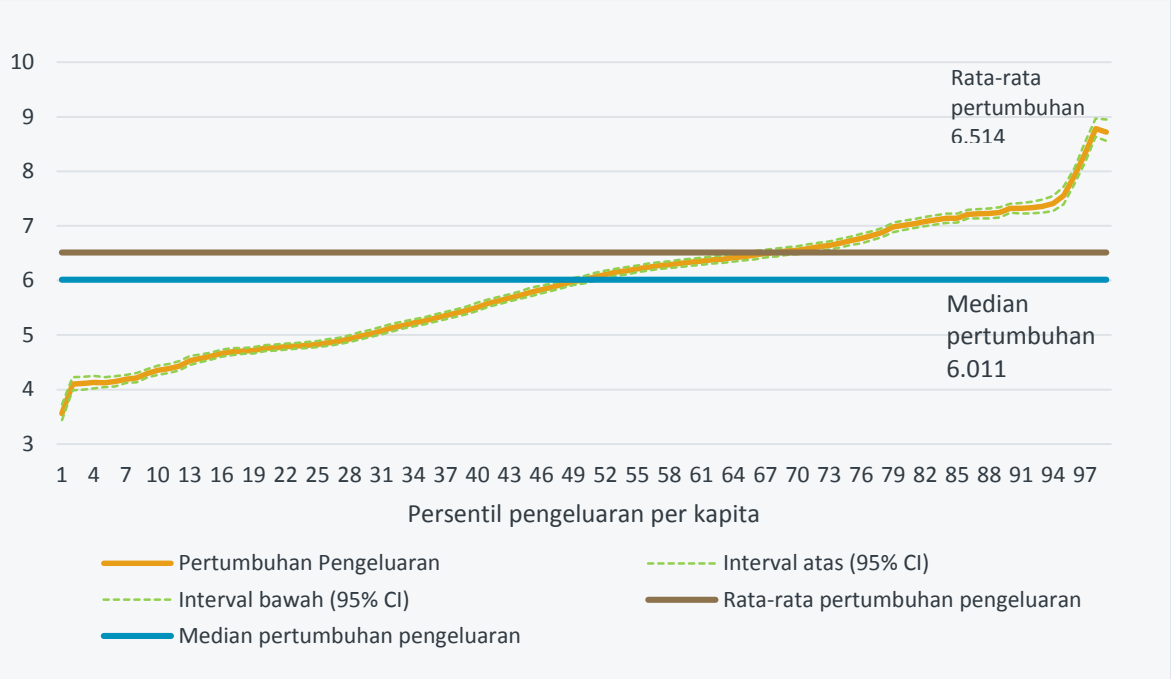


**Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006 – 2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan antarkelompok kesejahteraan tersebut bisa dijelaskan, antara lain, oleh penguasaan modal dan kualitas sumber daya manusia yang berbeda antarkelompok kesejahteraan, terutama antara kelompok kesejahteraan termiskin dan terkaya. Para pemilik modal yang merupakan kelompok terkaya adalah yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi yang diraih Indonesia, salah satunya yang berasal dari *commodity boom* (Yusuf, Sumner, dan Rum, 2014; Ginting dan Aji, 2015; Tabor, 2015). Sementara kelompok terkaya merasakan peningkatan pendapatan yang terbanyak, kelompok kesejahteraan di bawahnya terus menghadapi hambatan untuk meningkatkan pendapatannya dengan adanya *skill-biased technology*—sehingga tenaga kerja berketerampilan rendah sulit untuk memasuki pasar tenaga kerja (Dabla-Norris *et al.*, 2015). Sebuah tantangan bagi wilayah perdesaan Indonesia yang merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja yang sebagian besar adalah tenaga kerja berketerampilan rendah (Suryahadi, Chen, dan Tyers, 2001).

## 1.2 Mengapa Penting Melihat Ketimpangan di Perdesaan di Indonesia?

Ketimpangan yang terbesar masih berada di perkotaan, namun tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1), dan keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan yang tinggi dan semakin naik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di dalam wilayah perdesaan merupakan hal yang harus diperhatikan (Gambar 3). Seperti kecenderungan nasional, peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut juga terjadi bersamaan dengan ketimpangan di wilayah perdesaan yang naik dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudah Krisis Keuangan Asia (Gambar 4).

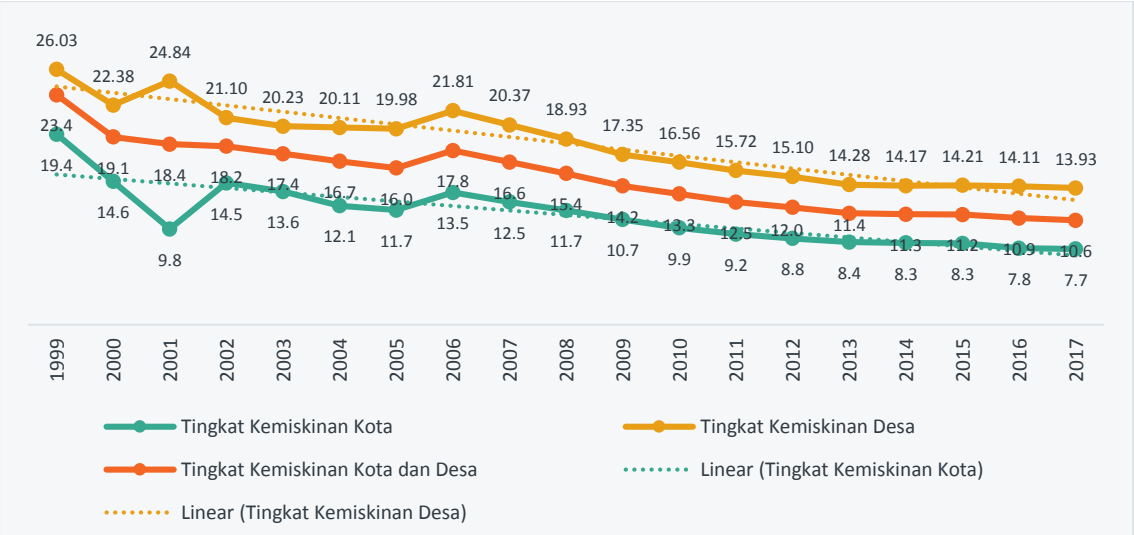


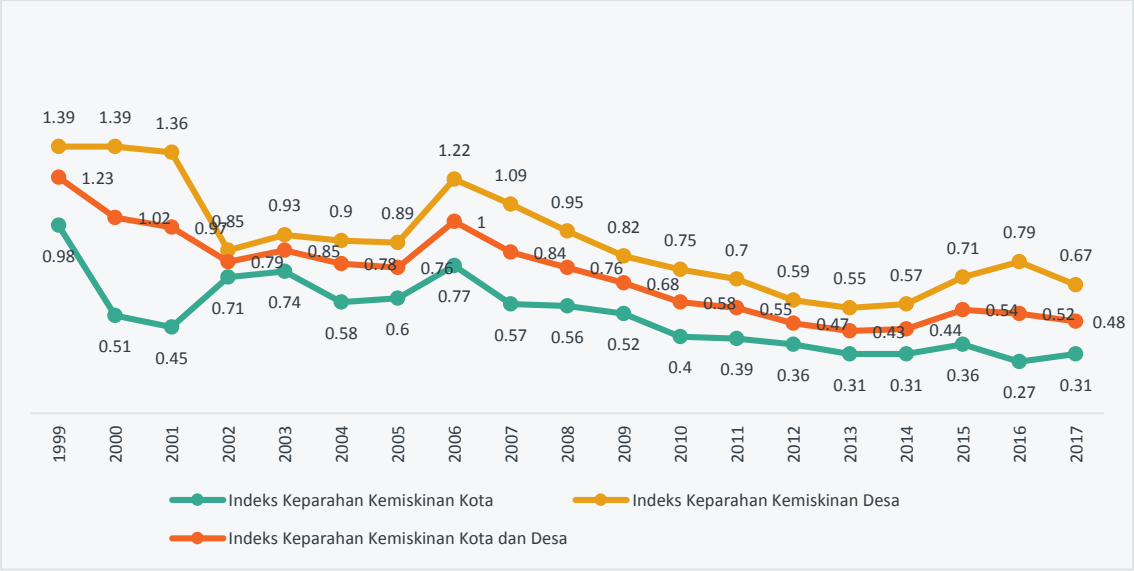


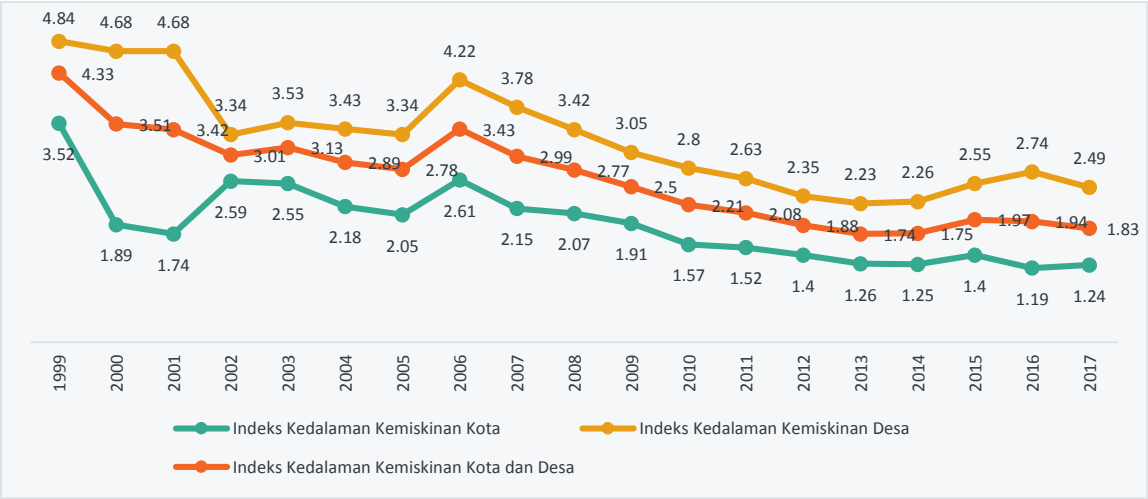


**Gambar 3. Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Menurut Wilayah (Desa, Kota, dan Desa+Kota) 1999 - 2017**

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun.

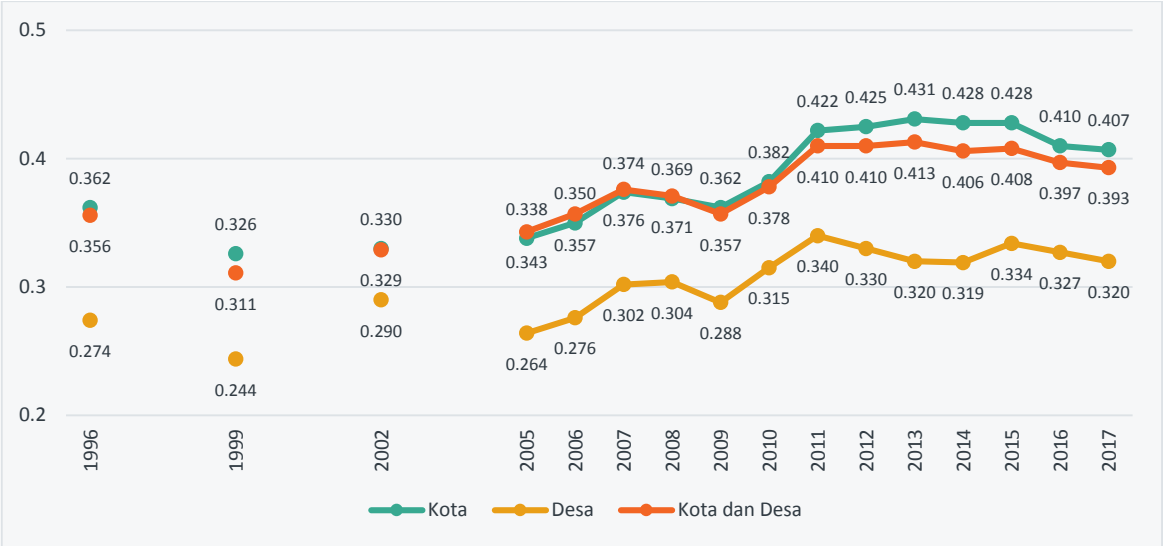


**Gambar 4. Ketimpangan Menurut Wilayah, 1996–2017**

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun.

Penurunan ketimpangan menjadi upaya penting dalam mengatasi kemiskinan (UNCTAD, 2013; UNDP, 2015). Mengingat kenyataan bahwa kemiskinan di Indonesia identik dengan wilayah perdesaan, maka upaya penurunan ketimpangan di perdesaan akan memberi kontribusi berharga terhadap penurunan kemiskinan nasional. Saat ini pemerintah dan mitra pembangunan secara masif mendorong berbagai program pembangunan dan pemberdayaan di perdesaan. Salah satu yang terbesar adalah Kebijakan Dana Desa yang merupakan implementasi dari UU No. 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60/2014 tentang Dana Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan nasional. Perhatian pemerintah untuk menurunkan ketimpangan secara eksplisit tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menargetkan ketimpangan (indeks Gini) turun hingga 0,36 pada 2019 (UNDP, 2015). Namun, di antara berbagai upaya pengurangan ketimpangan yang dicanangkan belum banyak yang menyentuh ketimpangan di perdesaan. Ketimpangan di perdesaan masih luput dari banyak pembahasan mengenai dinamika ketimpangan. Perhatian terhadap kawasan perdesaan masih didominasi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang diasumsikan akan mengurangi kemiskinan. Namun, tidak banyak disadari bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan tidak bersifat linier dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan secara otomatis mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi inklusiflah yang dapat mendukung pengurangan kemiskinan (de Haan & Thorat, 2013; Saad-Filho, 2010). Oleh sebab itu, keberhasilan pengurangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang didukung kebijakan sosial yang baik yang bisa menjamin distribusi pendapatan yang lebih merata (Sumarto, Vothknecht, dan Wijaya, 2014).

## 1.3 Gambaran Studi

Hasil Studi Dinamika Ketimpangan di Perdesaan di Indonesia ditampilkan melalui kertas kerja ini. Secara khusus studi ini bertujuan untuk melihat berbagai faktor di dalam kerangka modal penghidupan dan mengaitkannya dengan dinamika ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah perdesaan. Data dan informasi yang tersaji akan menjadi bekal bagi pemerintah dan mitra pembangunan untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang terkait dengan ketimpangan dan mendukung upaya mereka dalam menanggulanginya.

Kertas kerja ini merupakan keluaran pertama dari rangkaian studi tentang ketimpangan perdesaan yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute dengan didukung oleh Yayasan TIFA. Untuk melengkapi informasi yang disajikan pada kertas kerja ini, akan ada dua kertas kerja lainnya (Kertas Kerja 2 dan 3). Kertas Kerja 2 dan 3 merupakan hasil dari dua studi lanjutan yang melihat secara lebih dalam: Determinan Ketimpangan Perdesaan di Tingkat Desa; Kontribusi Faktor Perubahan Ketimpangan di Perdesaan.

### 1.3.1 Kerangka Konseptual

Ketimpangan adalah sebuah konsep yang menggambarkan kondisi tidak setara, terutama dalam hal status, hak, dan kesempatan (United Nations, 2015). Berbeda dengan kemiskinan yang diukur berdasarkan nilai batas yang ditetapkan, ketimpangan melihat perbedaan standar hidup antarorang/kelompok di dalam masyarakat (McKay, 2002). Ketimpangan bisa dilihat secara moneter dan nonmoneter. Ketimpangan moneter diukur menggunakan data distribusi pendapatan/pengeluaran (lihat Cowell, 2007; Dabla-Norris, *et al*, 2015). Sementara itu, yang dilihat dalam ketimpangan nonmoneter adalah dimensi di luar pendapatan/pengeluaran, seperti pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kesempatan, kepemilikan aset, dan bahkan capaian umur (Heshmati, 2004).

Terdapat banyak cara untuk mengukur ketimpangan moneter, namun yang paling luas digunakan adalah indeks Gini—di mana nilai indeks Gini 0 berarti sepenuhnya setara dan 1 berarti sepenuhnya tidak setara (The World Bank, 2016). Indeks Gini merupakan indikator yang secara formal dipakai oleh Pemerintah Indonesia untuk melihat ketimpangan moneter. Selain indeks Gini, cara untuk mengukur ketimpangan lainnya yang juga banyak digunakan adalah indeks Palma dan indeks Theil. Ketimpangan yang akan dilihat dalam kertas kerja ini adalah ketimpangan moneter saja, sebagian besar menggunakan prinsip perhitungan indeks Palma, dan sebagian lainnya menggunakan indeks Gini sebagai indikatornya (lihat bagian 1.3.2).

*Perdesaan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai daerah (kawasan) desa. Perdesaan merupakan turunan dari kata dasar *desa* yang diartikan sebagai "(i) kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); (ii) kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; (iii) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (iv) tanah; tempat; daerah." Sementara *pedesaan* dalam KBBI diartikan sebagai "daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu." Pada UU Desa yang berlaku sekarang, definisi desa adalah "… kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pada UU yang berlaku sebelumnya (UU No. 32/2004), definisi desa adalah "…kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI".

Mengingat sebagian besar data yang digunakan dalam studi ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka definisi desa dan identifikasi perdesaan mengikuti kriteria yang ditentukan oleh BPS. Menurut BPS, perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan (dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan). Dalam definisi BPS, desa adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah

administrasi Indonesia di bawah kecamatan (BPS, 2010). Berdasarkan kategori wilayah desa yang dipakai dalam survei Potensi Desa (Podes), BPS, status desa-desa di Indonesia terbagi ke dalam desa perkotaan dan desa perdesaan. Desa perdesaan adalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini. Hingga 2014, dari sekitar 76 ribu desa di Indonesia, 80% di antaranya–sekitar 60 ribu desa–termasuk dalam kategori desa perdesaan, dan 20% sisanya–sekitar 15 ribu desa–termasuk dalam kategori desa perkotaan.

*Kondisi penghidupan* dalam studi ini ditangkap melalui kerangka modal penghidupan (*pentagonal asset*). Ketimpangan yang pada dasarnya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan antarkelompok kesejahteraan, sebagaimana sudah ditunjukkan melalui Gambar 2, merupakan produk dari perbedaan penguasaan modal penghidupan. Selain itu, modal penghidupan ini juga merupakan aspek kunci dari kerangka penghidupan berkelanjutan yang kepemilikan atau penguasaannya dapat menjadi bekal awal masyarakat untuk menentukan jenis strategi penghidupan untuk mencapai keluaran penghidupan yang diinginkan (DFID, 1999). Modal ini juga berfungsi sebagai sumber daya untuk mempertahankan penghidupan dan untuk meningkatkan kesejahteraan (Moser dan Dani, 2008).

Modal penghidupan masyarakat ini dikategorikan ke dalam lima kelompok: (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) modal infrastruktur (fisik), (4) modal keuangan, dan (5) modal sosial-politik (Scoones, 1998; dan Morse, McNamara, dan Acholo, 2009). Kelima aspek tersebut, dalam studi ini, digunakan untuk mengetahui dinamika penghidupan yang terjadi di wilayah perdesaan dan bagaimana keterkaitannya dengan salah satu keluaran penghidupan, yakni ketimpangan. Dalam kerangka penghidupan berkelanjutan, interaksi kelima modal tersebut dengan struktur dan relasi sosial yang berlaku dimasyarakat secara simultan menggambarkan kapasitas individu/masyarakat untuk menghasilkan keluaran kesejahteraan (Saragih, Lassa, dan Ramli, 2008; dan Alevizou, Alexiou, dan Zamenopoulos 2016). Meskipun demikian, dalam studi ini tidak dianalisis semua aspek dari kerangka kehidupan berkelanjutan, namun hanya menggunakan lima modal penghidupan, yang merupakan aspek kunci dari kerangka kehidupan berkelanjutan tersebut.

Dalam kerangka modal penghidupan, ketimpangan di wilayah perdesaan tidak hanya dinilai sebagai kondisi lebarnya kesenjangan antara penduduk termiskin dan terkaya di desa, tetapi juga keadaan tidak optimalnya aset penghidupan dalam menunjang penghidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Untuk itu, meskipun pengukuran keluaran berupa penurunan ketimpangan didasarkan pada tingkat kesejahteraan moneter, analisis tetap dilakukan melalui penilaian kondisi kelima aset penghidupan yang pada akhirnya akan menentukan kemampuan masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan di wilayah perdesaan.

Bagaimana modal penghidupan ini diukur dapat dilihat pada daftar indikator untuk masing-masing modal yang tersedia di Tabel 1. Sumber daya manusia terdiri dari kondisi pendidikan dan kesehatan. Sumber daya alam mencakup tipologi wilayah secara geografis dan pemanfaatan lahan sebagai aspek alam paling penting untuk penghidupan masyarakat perdesaan yang masih didominasi oleh usaha pertanian. Modal infrastruktur fisik diwakili oleh ketersediaan infrastruktur dasa. Karena keterbatasan data sekunder yang tersedia, modal keuangan didekati dengan infrastruktur fisik pendukung perekonomian, termasuk di dalamnya infrastuktur keuangan dan infrasturuktur untuk kegiatan perdagangan. Terakhir, modal sosial akan merangkum beberapa aspek yang turut mendorong atau mengancam kohesi sosial.

**Tabel 1. Indikator Modal Penghidupan**

| Jenis Sumber Daya/Modal Penghidupan | Indikator |
|---|---|
| **Sumber Daya Manusia** | • Rasio Ketergantungan<br>• APK/APM<br>• Tingkat pendidikan tertinggi<br>• Keluhan kesehatan<br>• Masalah gizi<br>• Kelahiran dibantu tenaga kesehatan<br>• Cakupan imunisasi lengkap<br>• Perlindungan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| **Sumber Daya Alam** | • Tipologi wilayah berdasarkan topografi dan perbatasan dengan hutan dan laut<br>• Ketimpangan lahan |
| **Infrstruktur Fisik** | • Kualitas jalan,<br>• Sarana telekomunikasi,<br>• Cakupan listrik |
| **Infrastruktur Pendukung Perekonomian** | • Ketersediaan lembaga keuangan di desa<br>• Ketersediaan kompleks pertokoan dan pasar permanen |
| **Modal Sosial** | • Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemilihan umum<br>• Primordialisme<br>• Keberagaman identitas (etnis dan agama)<br>• Konflik sosial |

### 1.3.2 Metodologi

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah menangkap dinamika ketimpangan dan penghidupan di perdesaan dengan lebih terukur dan dapat diperbandingkan antarwaktu, antarlokasi, dan antaraspek modal penghidupan. Sebagai tahap awal dari serangkaian kertas kerja tentang dinamika ketimpangan perdesaan, kertas kerja ini lebih berperan sebagai dasbor untuk menyajikan kondisi modal penghidupan dan bagaimana itu terkait dengan ketimpangan di perdesaan antar waktu. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menampilkan tabulasi silang antara indikator-indikator yang mewakili masing-masing modal penghidupan di satu sisi dan kelompok kesejahteraan di sisi lain.

Secara umum, analisis dilakukan di tingkat individu/rumah tangga, kecuali dalam hal sumber daya alam serta infrastruktur fisik dan keuangan. Di kedua modal penghidupan tersebut, analisis dilakukan di tingkat desa. Hal ini terkait dengan keterbatasan ketersediaan data yang tidak bisa menyajikan akses atau utilitas masyarakat terhadap kedua jenis modal tersebut. Akibatnya, informasi yang disajikan lebih pada ketersediaannya di level desa. Sekalipun tidak bisa menunjukkan akses masyarakat, setidaknya variasi ketersediaannya ini dapat menggambarkan ada atau tidaknya hambatan struktural untuk masyarakat dalam menjangkau kedua modal tersebut.

Ketimpangan moneter dan kondisi modal penghidupan dibandingkan menurut level analisisnya. Pada analisis di level mikro (individu/rumah tangga), ketimpangan dapat diamati dari variasi kondisi modal penghidupan antar kelompok kesejahteraan. Secara spesifik, seluruh masyarakat perdesaan akan dikelompokkan menjadi lima tingkat menurut pengeluaran per kapitanya. Kondisi modal penghidupan yang dimiliki oleh 20% kelompok terkaya akan disandingkan dengan yang dimiliki oleh 20% kelompok termiskin. Ketimpangan diidentifikasi ketika kondisi modal penghidupan di antara

masyarakat perdesaan di 20% kelompok terkaya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di antara masyarakat di 20% terbawah. Ini tentunya merupakan cara pengukuran ketimpangan yang cukup kasar yang hanya bisa menggambarkan ketimpangan secara umum saja. Namun, melihat ketimpangan dengan membandingkan yang terkaya dan termiskin saja dan mengabaikan distribusi masyarakat di kelompok menengah merupakan prinsip dasar perhitungan indikator ketimpangan Atkinson (Indeks Palma). Indikator ini, yang juga familiar disebut sebagai *Decile Dispersion Ratio,* dibangun dengan membagi pengeluaran (pendapatan) masyarakat di desil terkaya dengan yang di desil termiskin (Haughton dan Khandker, 2009).

Pada analisis di level desa, ketimpangan diamati dari pengelompokan kesejahteraan suatu desa dan juga pengelompokan ketimpangannya. Identik dengan pengelompokan kesejahteraan di level mikro, di sini desa perdesaan di seluruh Indonesia dikelompokkan dan dibandingkan menurut rata-rata pengeluaran per kapitanya. Namun, cara ini lebih menggambarkan ketimpangan antardesa perdesaan Indonesia, alih-alih antarmasyarakat di dalam desa. Oleh karena itu, cara ini kemudian dilengkapi dengan pengelompokan tingkat ketimpangan desa sebagai upaya untuk melihat keterkaitan antara kondisi modal penghidupan desa dengan tingkat ketimpangan di dalam desa tersebut. Perlu diperhatikan bahwa tingkat ketimpangan level desa dilihat melalui indeks Gini. Berikut adalah formula perhitungan indeks Gini:

$$Gini = 1 - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i + y_{i-1})$$

di mana $y_i$ adalah proporsi pengeluaran kumulatif individu $i$ dalam suatu $N$ populasi, dalam hal ini adalah populasi desa. Indeks Gini ini bernilai antara 0 (merata sempurna) dan 1 (timpang sempurna). Dengan kata lain, semakin mendekati 1 indeks Gini sebuah desa, semakin timpang kesejahteraan masyarakat di dalam desa tersebut. Berdasarkan nilai indeks Gini inilah desa perdesaan dikelompokkan menjadi lima kuintil.

### 1.3.3 Sumber Data

Data yang digunakan pada analisis ini terdiri dari data survei (rumah tangga) dan sensus (penduduk/individu, rumah tangga dan usaha pertanian, dan desa). Di antara data survei yang digunakan adalah:

1) Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas)
2) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
3) Indonesia Family Life Survey (IFLS)

Sedangkan data sensus yang digunakan adalah:

1) Sensus Penduduk Nasional (SP)
2) Sensus Pertanian
3) Sensus Potensi Desa (Podes)

Khusus untuk mendapatkan data koefisien Gini desa, analisis ini juga memanfaatkan data Peta Kemiskinan Indonesia yang dibangun oleh The SMERU Research Institute. Data Peta Kemiskinan adalah data yang menjadi sumber untuk Peta Kemiskinan SMERU dengan cakupan berupa indikator kemiskinan (tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan) serta ketimpangan (indeks Gini) untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan. Indikator kemiskinan dan ketimpangan dalam data Peta Kemiskinan merupakan hasil estimasi berdasarkan metode *small area estimation* (SAE), atau estimasi wilayah kecil. SAE yang digunakan untuk menghasilkan estimasi indikator kemiskinan dan

ketimpangan dalam data Peta Kemiskinan merupakan metode SAE yang dikembangkan oleh Elbers, Lanjouw, dan Lanjouw (2003) dengan memanfaatkan sumber data dari BPS, yakni Susenas dan SP. Susenas digunakan karena memiliki informasi terkait pengeluaran rumah tangga yang dijadikan sebagai variabel dasar untuk penghitungan kemiskinan dan ketimpangan, sementara SP digunakan karena cakupan observasinya yang menyeluruh (semua populasi). Sumber data selain Susenas dan SP yang digunakan untuk mendukung penghitungan indikator kemiskinan dan ketimpangan dalam data Peta Kemiskinan adalah Podes. Podes dapat menghasilkan variabel agregat tingkat desa/kelurahan, selain dari variabel agregat tingkat desa/kelurahan yang diperoleh dari SP. Variabel agregat tingkat desa/kelurahan digunakan untuk mengurangi *locational effect* yang dapat berpengaruh terhadap galat standar dari hasil estimasi yang menggunakan metode SAE.

Peta Kemiskinan pertama kali dibuat oleh SMERU pada tahun 2003 dengan memanfaatkan SP 2000, Susenas 1999, dan Podes 2000. Peta tersebut menyediakan data tingkat kemiskinan dan ketimpangan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia. Seiring dengan dirilisnya SP 2010, peta kemudian diperbaharui pada tahun 2012. Sebanyak 75.627 desa diestimasi tingkat kemiskinan dan ketimpangannya pada peta kemiskinan 2010. Pada tahun 2015, peta kembali diperbaharui untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama 2010 hingga 2015.

Karena informasi ketimpangan di tingkat desa menggunakan data Peta Kemiskinan, maka jumlah observasi data yang dianalisis mengikuti jumlah desa yang tersedia di data Peta Kemiskinan 2010 dan 2015. Total sebanyak 75.627 desa tersebut terdiri dari 59.575 di perdesaan dan 15.692 di perkotaan, atau sekitar 78% bersifat perdesaan dan 21% bersifat perkotaan. Proporsi ini masih sebanding dengan proporsi desa-kota menurut BPS, 80% dan 60%. Deskripsi lebih jelas atas data lain yang digunakan dalam analisis utama studi ini disajikan dalam Lampiran 1 Tabel A1.

### 1.3.4 Keterbatasan Studi

Studi Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia menjadi salah satu upaya awal untuk menyediakan bukti ilmiah yang komprehensif tentang kondisi ketimpangan dan penghidupan di perdesaan Indonesia. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan studi ini disebabkan masih terbatasnya data yang bisa mewakili level desa dan data terpilah gender. Dari analisis deskriptif yang disajikan, kertas kerja ini menyediakan gambaran tentang aspek modal penghidupan yang diduga terkait dengan ketimpangan moneter yang dihadapi masyarakat perdesaan. Namun, tidak dapat ditarik kesimpulan tentang seberapa kuat asosisasi capaian atau distribusi modal penghidupan tersebut dalam menghasilkan atau mereduksi ketimpangan (moneter). Hal inilah yang akan dijawab dalam Kertas Kerja 2 yang secara khusus akan membahas faktor yang memengaruhi ketimpangan perdesaan di Indonesia.

# II. KETIMPANGAN DAN PERKEMBANGAN PENGHIDUPAN DI DESA

## 2.1 Wilayah Perdesaan di Indonesia Makin Sejahtera namun Makin Timpang

Wilayah perdesaan di Indonesia makin sejahtera namun makin timpang, dengan ketimpangan terbesar dialami oleh desa-desa di Indonesia Timur. Peningkatan kesejahteraan wilayah perdesaan

ditunjukkan oleh penurunan kemiskinan wilayah tersebut di berbagai provinsi di Indonesia antara 2007 dan 2016. Sementara itu, indikator ketimpangan perdesaan semakin mendekati rata-rata ketimpangan nasional pada 2016. Wilayah perdesaan di Papua dan Papua Barat adalah yang paling miskin dan paling timpang diantara semua provinsi di Indonesia. Sementara itu, wilayah perdesaan di Bangka Belitung dan Bali adalah yang paling tidak miskin dan paling tidak timpang, baik pada 2007 maupun 2016 (Gambar 5).

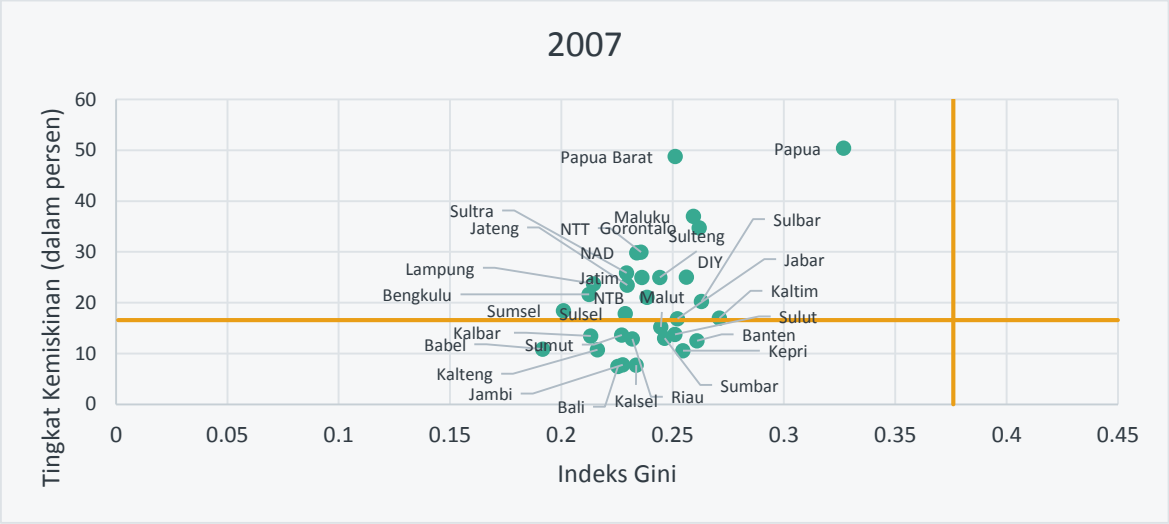


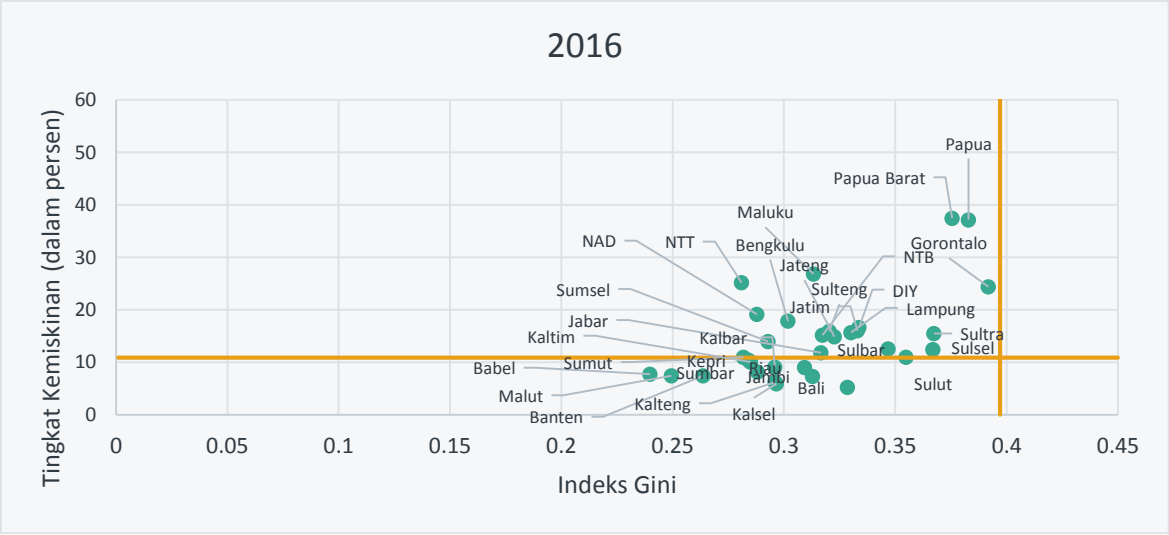


**Gambar 5. Ketimpangan (Indeks Gini) dan Kemiskinan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 dan 2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2007 dan 2016.

Kecenderungan yang sama diperlihatkan oleh perhitungan perubahan ketimpangan menggunakan Indeks Palma (2006-2016), yang menunjukkan bahwa desa-desa di Papua, Papua Barat, dan Gorontalo masuk ke dalam kelompok desa dengan ketimpangan terburuk, baik pada 2006 maupun 2016. Sebaliknya, perkembangan yang baik ditunjukkan oleh Nusa Tenggara Timur yang pada 2006 masuk ke dalam kelompok provinsi dengan ketimpangan desa tertinggi, namun pada 2016 masuk ke dalam kelompok dengan ketimpangan terendah (Gambar 6.).

| | | 2006 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 Palma <1.29 | Q2 Palma <1.42 | Q3 Palma <1.56 | Q4 Palma <1.76 | Q5 Palma>1.98 |
| 2016 | Q1 Palma <1.58 | Sumatera Utara<br>Bali<br>Kalimantan Selatan | Banten | Kepulauan Bangka Belitung<br>DI Yogyakarta | | Nusa Tenggara Timur |
| | Q2 Palma <1.68 | Bengkulu<br>Jawa Tengah<br>Jawa Timur | | Jawa Barat<br>Maluku Utara | Kalimantan Timur | |
| | Q3 Palma <1.91 | Sumatera Selatan | Sumatera Barat<br>Jambi<br>Kepulauan Riau<br>Sulawesi Tengah | Kalimantan Barat | Maluku | |
| | Q4 Palma <2.20 | | Lampung | | Aceh<br>Riau<br>Nusa Tenggara Barat | Kalimantan Tengah<br>Sulawesi Barat |
| | Q5 Palma >2.63 | | | Sulawesi Utara<br>Sulawesi Tenggara | Sulawesi Selatan | Gorontalo<br>Papua Barat<br>Papua |

**Gambar 6. Perubahan Ketimpangan (Indeks Palma), 2006 dan 2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Ketimpangan menjadi indikasi bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan. Kurva insiden pertumbuhan menunjukkan kondisi ketimpangan perdesaan yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Ketimpangan–perbedaan pertumbuhan pendapatan antara kelompok terkaya dengan kelompok termiskin, paling besar secara berurutan dialami oleh wilayah perdesaan di Sulawesi, Jawa, Papua dan Maluku, dan Sumatra. Di Sumatra, ketimpangan didorong oleh pendapatan kelompok terkaya yang tumbuh dengan sangat tinggi. Di Papua dan Maluku, pendapatan kelompok miskin tumbuh dengan sangat lambat–bahkan kelompok termiskin pertumbuhan pendapatannya hanya mencapai 1%-2% saja. Sebaliknya, di NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur), pendapatan kelompok termiskin tumbuh dengan sangat tinggi, bahkan menjadi yang paling tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Ketimpangan yang relatif landai diperlihatkan oleh desa di Kalimantan. Kecenderungan lain yang juga terlihat adalah lonjakan pertumbuhan pendapatan kelompok menengah di desa di Sulawesi (Gambar 7).

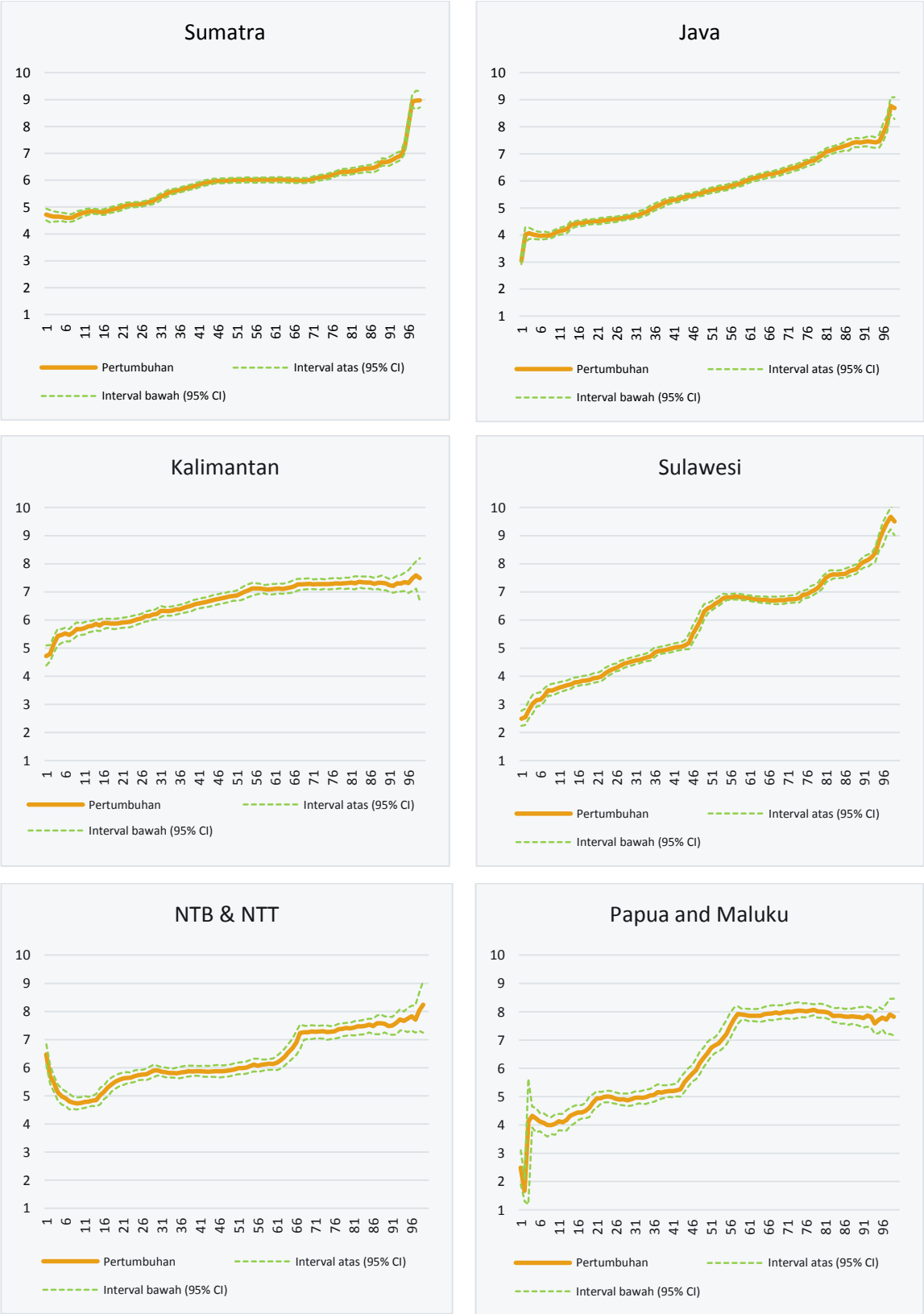


**Gambar 7. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Berbagai Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006 – 2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2006-2016.

## 2.2 Struktur Ekonomi Desa yang Telah Berubah

Struktur perekonomian desa di Indonesia berubah seiring dengan pembangunan yang dialami negara ini dalam beberapa dekade terakhir. Data komposisi tenaga kerja menurut sektor di perdesaan menggambarkan hal ini. Kontribusi sektor pertanian yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan semakin mengecil bersamaan dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa dan industri. Hingga 2016 sebagian besar tenaga kerja di desa masih diserap oleh sektor pertanian, dengan komposisi rata-rata mencapai 55%. Namun persentase tenaga kerja di sektor jasa dan industri meningkat hingga rata-rata persentasenya mencapai 29% dan 16% pada 2016. Kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja lebih besar ditunjukkan oleh desa-desa di wilayah luar Pulau Jawa–dengan rata-rata serapan sebesar 63%, di bandingkan di wilayah Jawa–yang rata-rata serapannya hanya berkisar 48% pada 2016 (Tabel 2).

**Tabel 2. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Sektor Pekerjaan di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2006 dan 2016**

| | Pertanian | | | Industri | | | Jasa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2016 | | 2006 | 2016 | | 2006 | 2016 | |
| **Jawa** | 50.82 | 47.52 | -6.5% | 14.05 | 20.96 | 49.2% | 35.13 | 31.53 | -10.2% |
| **Luar Jawa** | 71.39 | 62.62 | -12.3% | 6.96 | 10.34 | 48.6% | 21.65 | 26.04 | 20.3% |
| **Sumatra** | 71.79 | 63.51 | -11.5% | 6.3 | 9.87 | 56.7% | 21.91 | 26.62 | 21.5% |
| **Jawa** | 50.82 | 47.52 | -6.5% | 14.05 | 20.96 | 49.2% | 35.13 | 31.53 | -10.2% |
| **Kalimantan** | 70.45 | 60.32 | -14.4% | 8.03 | 13.27 | 65.3% | 21.52 | 26.41 | 22.7% |
| **Sulawesi** | 67.63 | 58.69 | -13.2% | 6.52 | 11.67 | 79.0% | 25.86 | 29.65 | 14.7% |
| **NTT, NTB, Papua Barat, Papua** | 74.88 | 71.23 | -4.9% | 8.52 | 8.11 | -4.8% | 16.6 | 20.66 | 24.5% |

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Sebagian besar pekerja sektor pertanian bekerja pada subsektor pertanian tanaman pangan, terutama sebagai petani padi, diikuti oleh petani perkebunan dan petani palawija. Jika dilihat per wilayah, sebagian besar petani di Pulau Jawa adalah petani padi, diikuti oleh petani palawija, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Corak yang berbeda ditunjukkan oleh komposisi pekerjaan subsektor pertanian yang digeluti oleh petani di luar Jawa, yang didominasi oleh petani perkebunan, baru diikuti oleh petani padi, palawija, perikanan, dan hortikultura (Gambar 8).

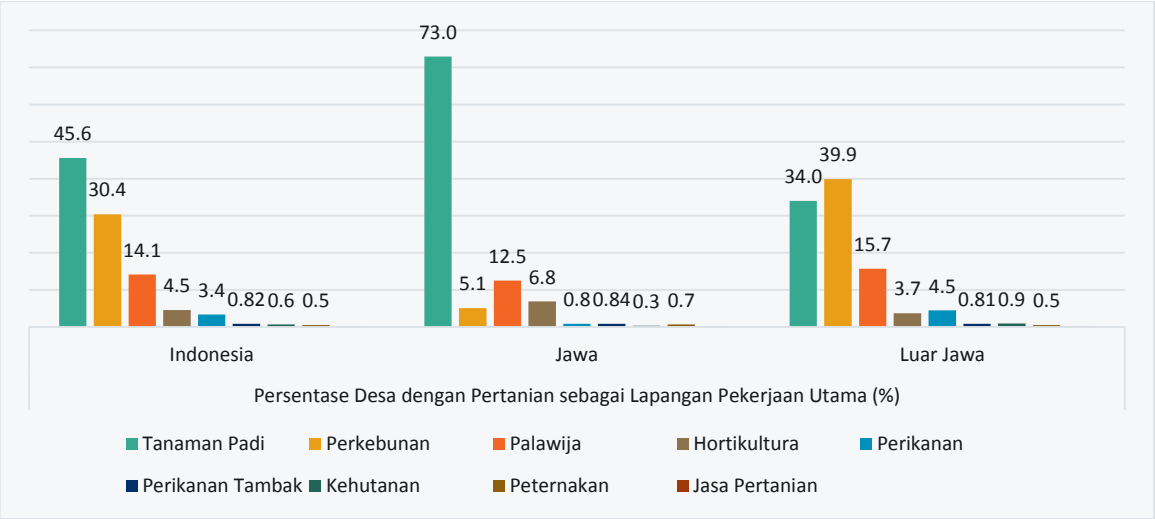


**Gambar 8. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Subsektor Pertanian di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2014**

Sumber: Podes, 2014.

Transisi penghidupan perdesaan di mana kontribusi sektor pertanian menurun seiring dengan pembangunan ekonomi bukan fenomena unik Indonesia, namun berlangsung di berbagai belahan dunia dan sudah dimulai sejak beberapa dekade yang lalu (Anderson, 1987; dan Martin dan Warr, 1990). Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar masih ditemukan di sektor pertanian, namun jumlah tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap total pendapatan terus mengalami penurunan. Fenomena ini salah satunya bisa dijelaskan oleh penuaan tenaga kerja sektor pertanian (Tabel 3).

**Tabel 3. Rata-rata Usia Petani, 2006 dan 2015**

| | Laki-laki | | | Perempuan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2015 | | 2006 | 2015 | |
| **Nasional** | 41 | 43 | ↑ | 41 | 44 | ↑ |
| **Sumatera** | 38 | 40 | ↑ | 39 | 42 | ↑ |
| **Jawa** | 44 | 47 | ↑ | 44 | 48 | ↑ |
| **Kalimantan** | 38 | 40 | ↑ | 37 | 41 | ↑ |
| **Sulawesi** | 39 | 40 | ↑ | 39 | 42 | ↑ |
| **NTB, NTT, Maluku, dan Papua** | 38 | 39 | ↑ | 36 | 38 | ↑ |

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006 dan 2015.

## 2.3 Transisi Penghidupan Masyarakat Perdesaan

### 2.3.1 Migrasi keluar desa dan harapan akan kesejahteraan yang lebih baik

Migrasi dari desa ke kota sering kali menjadi strategi utama untuk keluar dari kemiskinan di desa. Orang yang bermigrasi antarprovinsi menikmati pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan yang setidaknya sama atau lebih baik daripada orang yang tidak bermigrasi (Meng, 2010). Keluarga yang ditinggalkan juga ikut menikmati remitansi yang dikirimkan oleh anggota keluarga yang bermigrasi (Démurger dan Wang, 2016). Melalui remitansi inilah migrasi desa-kota berdampak pada

pembangunan perekonomian desa. Di tengah besarnya hambatan untuk mengakses modal finansial di desa, remitansi bisa menjadi sumber keuangan untuk keluarga yang ditinggalkan agar mereka dapat menjalankan usaha pertanian, memitigasi risiko, dan meningkatkan daya beli (The World Bank, 2007).

Mengamati data individu longitudinal[1] Indonesia, dapat diketahui mobilitas para pekerja dari desa ke kota atau sebaliknya antarperiode waktu, yang ditunjukkan pada Gambar 9. Sekalipun menempati proporsi tertinggi dibandingkan dengan tipe mobilitas lainnya–menetap di kota, migrasi desa-kota, dan migrasi kota-desa, persentase individu bekerja di desa yang memutuskan untuk menetap dan bekerja di desa antarwaktu semakin menurun. Dari 7.887 individu bekerja yang diamati, proporsi yang menetap dan bekerja di desa menurun dari 52% pada 2000–2007 menjadi hanya 45% pada 2007–2014. Hal ini semakin diperkuat oleh kecenderungan perpindahan individu bekerja dari desa ke kota yang lebih besar dibandingkan dengan dari kota ke desa, baik dalam jangka sedang—antara 2000–2007 dan 2007–2014, maupun dalam jangka panjang–antara 2000–2014. Dalam jangka sedang sekitar 9% dari individu yang bekerja di desa memutuskan untuk berpindah lokasi tempat tinggal ke kota. Persentase individu yang bekerja di desa yang memutuskan untuk berpindah dari desa ke kota meningkat dalam jangka panjang menjadi sekitar 16%. Sebaliknya, individu bekerja di kota yang memutuskan untuk berpindah lokasi tempat tinggal jumlahnya sangat kecil, hanya berkisar antara 2% hingga 3% saja dalam jangka sedang maupun panjang.

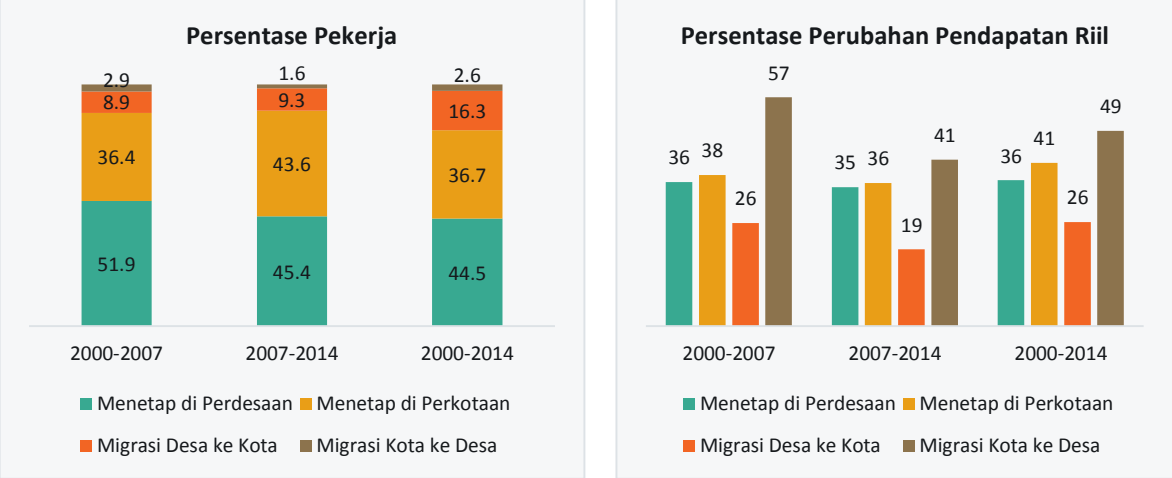


**Gambar 9. Perpindahan Lokasi Tempat Tinggal di antara Pekerja dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil)**

Sumber: Diolah dari IFLS 2000, 2007, dan 2014

Dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatannya secara riil[2] antarperiode waktu, perbaikan kesejahteraan lebih banyak dirasakan oleh individu bekerja di kota yang memilih untuk menetap di kota, dibandingkan dengan individu bekerja di desa yang memilih untuk menetap di desa, dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh terutama dalam jangka sedang. Dalam jangka sedang antara 2000–2007, individu bekerja di kota yang menetap di kota yang kesejahteraannya membaik sebanyak 38%, sementara di desa 36%. Perbedaan yang tidak terlalu jauh juga ditunjukkan dalam

[1]Longitudinal yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sama disurvei dari waktu ke waktu sehingga diketahui dinamika penghidupannya.

[2]Pertumbuhan pendapatan riil yang dimaksudkan adalah selisih pendapatan antarperiode yang sudah dikoreksi dengan inflasi, dihitung dengan membagi nilai pendapatan tahun tersebut dengan indeks harga konsumen tahun yang sama, tetapi dengan tahun dasar 2000 (Widyanti *et al.*, 2009).

jangka sedang antara 2007–2014, yaitu individu bekerja di kota yang kesejahteraannya membaik sebesar 35%, sementara di desa 36%. Ini sekaligus menjelaskan bahwa secara umum juga terjadi sedikit penurunan persentase individu baik di desa maupun di kota yang tingkat kesejahteraannya membaik. Perbedaan yang lebih signifikan ditunjukkan dalam jangka panjang, ditunjukkan oleh persentase individu bekerja di kota yang menetap di kota yang kesejahteraannya membaik mencapai 41%, sementara yang menetap di desa hanya 36% (Gambar 9).

Sementara itu, di antara individu bekerja yang melakukan migrasi, kesejahteraan yang lebih baik ditunjukkan oleh individu bekerja di kota yang memilih untuk pindah ke desa dibandingkan sebaliknya, dengan perbedaan yang sangat mencolok dalam jangka sedang maupun panjang. Sebagai gambaran, individu bekerja di kota yang memilih untuk pindah ke desa yang kesejahteraannya membaik dalam jangka sedang (antara 2000–2007 dan antara 2007–2014) mencapai 57% dan 41%, sementara individu bekerja di desa yang memilih untuk pindah ke kota yang kesejahteraannya membaik dalam jangka sedang di periode yang sama hanya mencapai 26% dan 19%. Pola yang sama ditunjukkan oleh kecenderungan yang terjadi di jangka panjang antara 2000–2014 (Gambar 9).

Pengaruh migrasi terhadap ketimpangan dan kemiskinan salah satunya dijelaskan oleh remitansi. Sebagian ahli berpendapat bahwa migrasi dan remitansi bisa menurunkan kemiskinan dan ketimpangan (Bloom dan Khanna, 2007), dan sebaliknya. Di antara yang menentang kontribusi positif migrasi dan remitansi terhadap kemiskinan dan ketimpangan adalah Lipton (1980) melalui penelitiannya yang mengambil studi kasus di perdesaan India yang menemukan bahwa migrasi merupakan hal mahal hingga hanya orang-orang dari kelompok kesejahteraan atas saja yang lebih banyak bisa mengaksesnya. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong peningkatan ketimpangan di perdesaan (Lipton, 1980). Seperti halnya Lipton, Mollers, dan Meyer melihat adanya hambatan yang dihadapi orang-orang dari rumah tangga menengah bawah untuk mengakses kesempatan bermigrasi. Studi yang dilakukannya di perdesaan Kosovo bahkan memperlihatkan bahwa di antara yang melakukan migrasi, orang-orang dari kelompok kesejahteraan atas adalah yang paling banyak menikmati hasilnya (Mollers dan Meyer, 2014). Hasil yang berbeda didapat oleh studi lain yang dilakukan menggunakan dataset yang meliputi 71 negara berkembang, yang membuktikan bahwa migrasi dan remitansi secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan, tingkat, kedalaman, dan keparahan kemiskinan, namun dengan catatan bahwa migrasi yang dilakukan adalah migrasi internasional (Adams Jr. dan Page, 2005).

Beberapa literatur mencoba mencari penjelasan mengenai hubungan remitansi dengan ketimpangan dan kemiskinan dengan melihat kontribusi remitansi terhadap perubahan kesejahteraan rumah tangga. Salah satunya ditemukan bahwa kontribusi remitansi terhadap kesejahteraan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jumlah tanggungan yang menerima remitansi, jumlah remitansi, dan siapa anggota keluarga yang melakukan migrasi (Mollers dan Meyer, 2014). Hubungan antara migrasi desa-kota dengan ketimpangan bisa dijelaskan baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dengan tingkat ketimpangan perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, urbanisasi akan mendorong peningkatan tingkat ketimpangan secara keseluruhan (Akita, Lukman, dan Yamada, 1999). Terlebih, jika penduduk desa yang bermigrasi ke perkotaan adalah mereka yang produktif dari kelompok kesejahteraan bawah (Eastwood dan Lipton, 2005). Serupa dengan partisipasi pada pekerjaan nonpertanian, migrasi berfungsi sebagai strategi bertahan (*coping*) dan/atau alternatif sumber penghasilan di tengah kondisi lapangan pekerjaan nonpertanian di desa yang umumnya terbatas–pada banyak kasus orang-orang bermigrasi ke daerah yang lebih maju untuk melakukan berbagai pekerjaan nonpertanian.

### 2.3.2 Pekerjaan nonpertanian menjadi pilihan bagi masyarakat yang menetap di perdesaan untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik

Di antara orang-orang yang menetap di desa, bentuk strategi penghidupan lain yang dilakukan adalah menetap di sektor pertanian namun meningkatkan produktivitasnya atau berpindah dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Pekerjaan di sektor pertanian dan nonpertanian di perdesaan saling terkait erat sehingga keduanya bersifat *countercyclical.* Peningkatan tenaga kerja di sektor nonpertanian turut dipengaruhi oleh menurunnya keterlibatan tenaga kerja di sektor pertanian, misalnya karena musim tani yang sudah selesai. Pekerjaan nonpertanian di perdesaan selain berkontribusi dalam menunjang pendapatan/pengeluaran juga berfungsi sebagai alternatif ketika menghadapi guncangan. Sektor nonpertanian di perdesaan biasanya berskala kecil, bersifat informal, dilakukan di rumah, dan kontribusinya terhadap perekonomian desa linear dengan serapan terhadap kelebihan penawaran tenaga kerja di luar masa panen (Carletto *et al.,* 2007).

Transformasi struktural ditandai dengan dua fakta umum, yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDB dan dalam jumlah pekerja, juga semakin melebarnya perbedaan di antara keduanya (The World Bank, 2007). Dua hal ini sangat nyata terjadi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Pada tahun 1980, kontribusi sektor pertanian dalam PDB adalah 24% dan terhadap total pekerja adalah 56,4%. Sampai pada tahun 2014, kontribusinya menurun secara berurutan menjadi 13,3% dan 34,3% (BPS, berbagai tahun). Dengan kata lain, rasio kontribusi pertanian dalam PDB terhadap kontribusi pertanian dalam jumlah pekerja menurun sangat tajam dalam periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan pesat di sektor nonpertanian, realokasi pekerja dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian terjadi dengan sangat lambat. Hal ini diduga menjelaskan stagnasi dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir (Suryahadi, Marshan, dan Indrio, 2018). Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang miskin masih terkonsentrasi di area perdesaan dan di sektor pertanian (The World Bank, 2007).

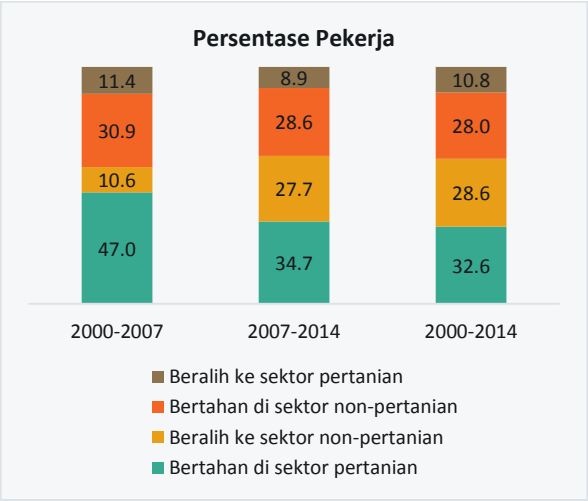


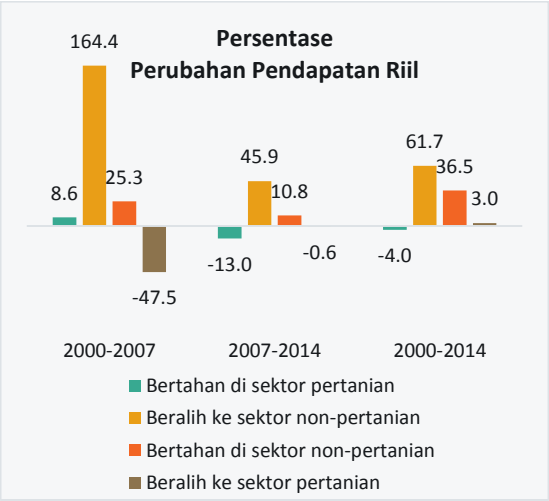


**Gambar 10. Perubahan Sektor Bekerja di antara Pekerja yang Menetap di Perdesaan dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil)**

Sumber: Diolah dari IFLS, 2000, 2007, dan 2014.

Terjadi peningkatan cukup tajam proporsi pekerja yang meninggalkan sektor pertanian, sekalipun secara makro realokasinya terbilang lambat. Masih dominannya proporsi pekerja yang bertahan di sektor pertanian dalam periode pengamatan jangka panjang menunjukkan bahwa peluang kerja di sektor nonpertanian direspons dengan lambat. Hal ini dijelaskan pada Gambar 10 yang

memperlihatkan transformasi struktur pekerjaan yang terjadi di desa pada jangka sedang dan panjang. Pada periode 2000–2007 sebanyak 10,6% dari total proporsi pekerja adalah mereka yang beralih ke sektor nonpertanian. Proporsi ini meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 27,7% pada periode tujuh tahun berikutnya antara 2007–2014. Namun, jika dilihat dalam jangka panjang, dari tahun 2000 ke 2014 persentase pekerja yang beralih sektor ke nonpertanian adalah 28,6%. Angka ini tidak terpaut jauh dari 32,6% yang merupakan proporsi pekerja yang bertahan di sektor pertanian.

Proporsi pekerja yang bekerja di sektor pertanian terus menurun tak lepas dari semakin berkurangnya minat terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Turunnya minat pekerja bekerja di sektor pertanian di perdesaan salah satunya disebabkan oleh rendahnya keuntungan atas investasi di sektor ini. Panel sebelah kanan di Gambar 10 menunjukkan pekerja yang beralih ke sektor pertanian mengalami penurunan pendapatan dalam periode menengah, 2000–2007 dan 2007–2014. Kenaikan pendapatan dialami dalam jangka panjang, namun dengan persentase kenaikan yang sangat kecil, 3% dalam periode 2000–2014. Kecenderungan yang serupa dialami oleh pekerja yang bertahan di sektor pertanian. Walau mengalami kenaikan pendapatan sebesar 8,6% di jangka sedang pertama pada 2000–2007, nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan pendapatan yang dialami oleh pekerja yang beralih ke sektor nonpertanian yang pendapatannya meningkat drastis sebesar 164,4 persen di periode yang sama. Bisa jadi karena pengaruh negatif Krisis Keuangan Asia 2008, keuntungan atas investasi atau upah dari bekerja di sektor nonpertanian lebih rendah pada periode 2007–2014 menjadi 45,9%, atau dalam jangka panjang (2000–2014) sebesar 61,7%. Keuntungan atas investasi sektor nonpertanian yang lebih tinggi menjadikan perpindahan dari pertanian ke nonpertanian di perdesaan sebagai strategi dengan kemungkinan keuntungan paling besar, bahkan lebih dari migrasi desa ke kota sebagaimana ditunjukkan di Gambar 9. Namun, perlu diperhatikan bahwa sangat mungkin terjadi *self-selection bias* yang menyebabkan perkiraan dampak positif dari transisi ke luar dari sektor pertanian lebih besar dari yang sebenarnya terjadi.

Masih diragukan apakah dampak positif dari transisi dari pertanian ke nonpertanian di perdesaan benar karena strategi transisi yang dilakukan seseorang atau karena modal penghidupannya sebelum transisi dilakukan. Besar kemungkinan modal penghidupan orang-orang yang sanggup melakukan transisi sektoral ini lebih besar dari orang yang bertahan di sektor pertanian yang sebenarnya tertarik untuk berpindah sektor tetapi tidak mampu. Akses terhadap peluang pekerjaan/usaha di sektor nonpertanian yang menguntungkan terkait sangat kuat dengan kepemilikan yang lebih tinggi atas sumber daya manusia, akses terhadap modal finansial, dan berbagai bentuk modal penghidupan lainnya (Barrett *et al.*, 2017). Pun demikian, mengindentifikasi kausalitas antara transisi ke sektor pertanian dan kesejahteraan sejauh ini masih sulit dilakukan (The World Bank, 2007).

Implikasi pekerjaan nonpertanian terhadap kemiskinan dan ketimpangan ditentukan oleh akses orang miskin terhadapnya dan oleh potensi penghasilan yang bisa dihasilkannya. Pada umumnya orang-orang miskin menghadapi hambatan sumber daya manusia yang mencegah mereka untuk mengakses pekerjaan nonpertanian yang berkualitas. Pada akhirnya, sektor nonpertanian lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme bertahan (*coping*) saja ketimbang sebagai sumber penghasilan yang layak untuk keluar dari kemiskinan (Carletto *et al.,* 2007). Sebagian ahli mendukung peran pekerjaan nonpertanian dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan, dengan argumen bahwa partisipasi di pekerjaan nonpertanian justru mendorong produktivitas sektor pertanian yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Sebuah studi kasus yang menggunakan data survei rumah tangga dari sebuah provinsi di China membuktikan bahwa orang-orang yang hanya menggeluti pekerjaan pertanian secara murni tanpa melakukan diversifikasi ke pekerjaan nonfarm tidak memperlihatkan peningkatan produktivitas atas pekerjaan pertaniannya, dan sebaliknya (de Janvry, Sadoulet, dan Zhu, 2005). Studi lain dengan konteks Indonesia, walau tidak menjelaskan kausalitas, menemukan

indikasi bahwa keterikatan pada pekerjaan/usaha nonpertanian sebagai langkah penting untuk keluar dari kemiskinan (McCulloch, Weisbord, dan Timmer, 2007).

# III. SUMBER DAYA MANUSIA PERDESAAN

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk perdesaan (Chiritescu, Balan, dan Bucur, 2015). Kualitas sumber daya manusia suatu wilayah akan menjelaskan kekuatan dan daya tahan masyarakatnya dalam menghadapi guncangan dan perubahan yang memengaruhi keberlangsungan pembangunan (Lasse dan Kranzt, 2011). Kaitan antara kualitas sumber daya manusia dengan ketimpangan ekonomi bisa dijelaskan dalam dua arah. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang timpang dipercaya menjadi hambatan tercapainya pembangunan ekonomi yang merata. Kedua, daerah yang pendapatan masyarakatnya timpang memiliki risiko lebih besar mengalami hambatan dalam investasi di bidang pembangunan manusia seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik (Kawachi, Kennedy, dan Lochner, 1997).

Bagian ini akan menjelaskan aspek-aspek sumber daya manusia, seperti rasio beban ketergantungan, akses dan capaian pendidikan, serta akses dan capaian kesehatan. Seperti kecenderungan ketimpangan ekonomi, ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara perdesaan dan perkotaan semakin mengecil—didorong oleh semakin baiknya akses dan capaian pendidikan, serta peningkatan status kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah perdesaan. Sebaliknya, kesenjangan capaian pendidikan dan kesehatan yang cukup besar masih terjadi antarkelompok kesejahteraan dan antargender di dalam perdesaan. Ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang cukup menantang untuk diselesaikan mengingat berbagai tantangan perbaikan tersebut harus dijawab oleh perdesaan di tengah tingginya urbanisasi dan tingginya rasio beban ketergantungan pada rumah tangga dari kelompok kesejahteraan terbawah.

## 3.1 Tantangan Demografi: Urbanisasi dan Rasio Beban Ketergantungan yang Tinggi

Penduduk perdesaan sedianya adalah fitur dominan dalam struktur kependudukan Indonesia, setidaknya semenjak awal 80-an ketika arus urbanisasi mulai berlangsung secara cepat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kecepatan urbanisasi yang tinggi, bahkan melebihi negara-negara yang kini menjadi negara maju pada saat mereka melewati proses industrialisasi (Meng dan Manning, 2012). Puncaknya adalah pada 2014, saat sebagian besar penduduk Indonesia sudah lebih banyak yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan (Hugo, 2014). Perhitungan menggunakan data Susenas memperlihatkan perubahan demografi yang cukup signifikan terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, dari 2006 hingga 2016. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk Indonesia bertambah dari 221 juta jiwa menjadi 257 juta jiwa atau meningkat sebesar 16%. Peningkatan terbesar tampaknya terjadi di wilayah perkotaan karena dalam dekade yang sama komposisi penduduk perdesaan berkurang cukup signifikan dari 56% hingga hanya 49% dari total penduduk Indonesia.

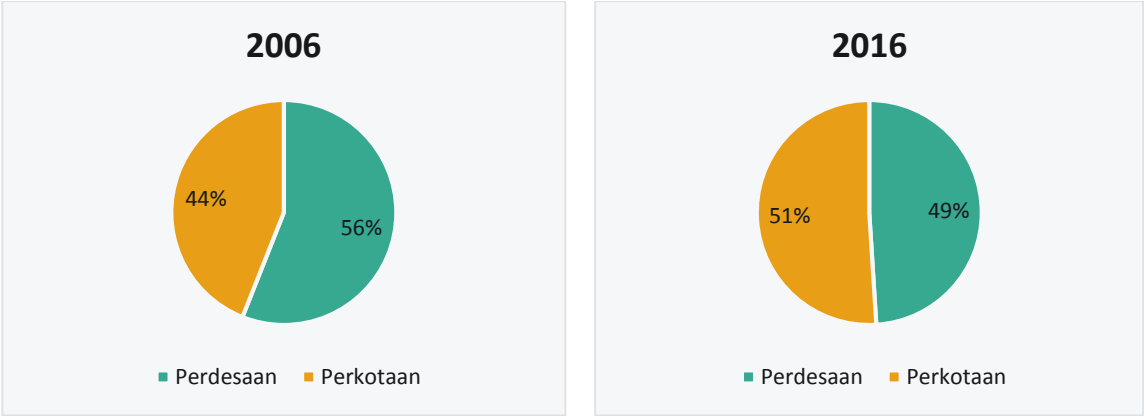


**Gambar 11. Komposisi Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2006 dan 2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan adalah faktor utama urbanisasi. Pemuda dan penduduk usia produktif adalah yang paling banyak melakukan migrasi ke daerah perkotaan. Untuk kasus Indonesia, hal ini didorong oleh penghidupan di perdesaan yang semakin dirasa kurang berprospek seiring dengan semakin sulitnya mengakses kepemilikan lahan dan sangat bergantungnya pekerjaan pertanian terhadap faktor musim. Di lain pihak, daerah perkotaan menawarkan berbagai pekerjaan di sektor informal yang bisa didapat dengan cukup mudah, terlepas dari upah yang rendah (Hugo, 1982). Implikasinya dapat dilihat dari struktur penduduk perdesaan yang menua dan tingginya rasio beban ketergantungan di perdesaan.

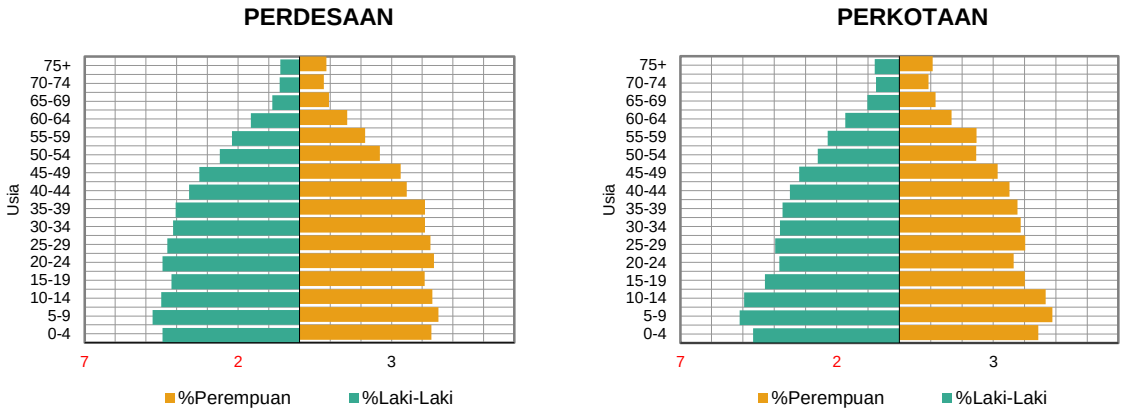


**Gambar 12. Piramida Penduduk**

Sumber: BPS, 2015.

Rasio beban ketergantungan menggambarkan beban potensial yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Rasio beban ketergantungan dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia nonproduktif (>15 tahun dan >65 tahun) dengan jumlah penduduk berusia produktif (15-65 tahun). Berdasarkan Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2015, jumlah penduduk kelompok usia produktif memang lebih banyak di perdesaan (Gambar 12). Walaupun begitu, peningkatan kelompok penduduk lansia dan anak yang tidak diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi (Santacreu, 2016). Dapat dilihat pada Gambar 13 bahwa komposisi penduduk usia lanjut dan anak di perdesaan membuat rata-rata beban ketergantungan di wilayah ini menjadi lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Selain itu, di antara anggota kelompok kesejahteraan terendah di perdesaan, rasio beban ketergantungan secara

konsisten ditemukan sangat tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini mengkhawatirkan karena walaupun lansia dapat tetap berdaya secara ekonomi dan memiliki peran pengasuhan, tanpa diikuti skenario kerja bagi lansia dan jaminan hari tua, kehadiran mereka akan menjadi beban tersendiri bagi penduduk usia kerja di dalam rumah tangga, terutama rumah tangga miskin (Ingham, Chirijevskis, dan Carmichael, 2009).

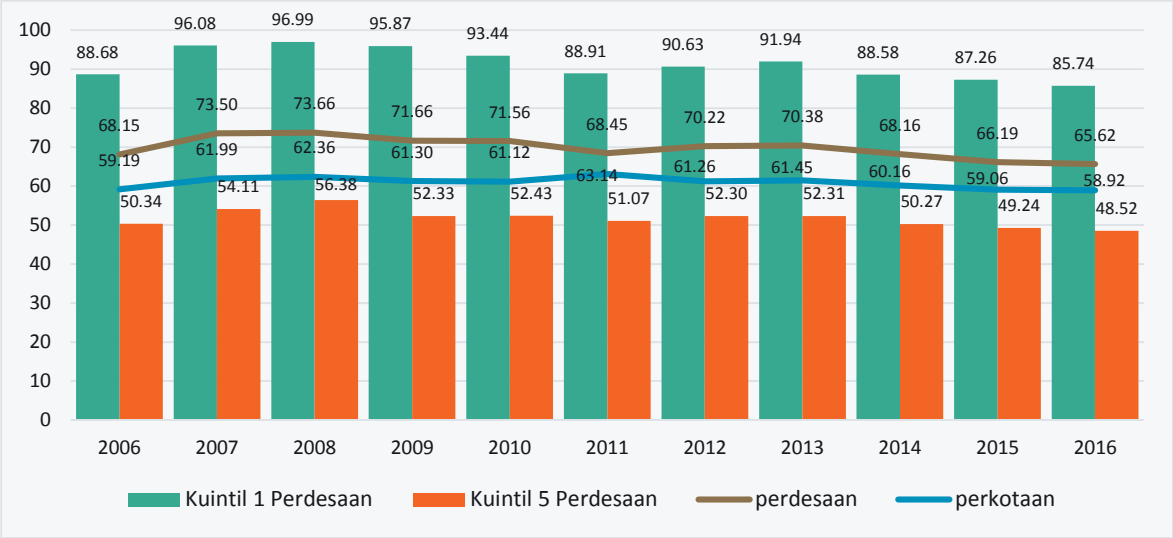


**Gambar 13. Rasio Beban Ketergantungan antarkelompok Pendapatan di Perdesaan, 2006-2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2006-2016.

## 3.2 Pendidikan Masyarakat Perdesaan: Akses yang Lebih Baik dan Tantangan Capaian Pendidikan Tinggi

Pendidikan merupakan aspek sumber daya manusia yang memiliki pengaruh besar terhadap penurunan ketimpangan. Dengan pendidikan yang tinggi, seseorang mampu pindah dari status ekonomi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan (Nakamura dan Murayama, 2012). Dalam studi di 50 negara, investasi pada sektor pendidikan dapat menurunkan ketimpangan dalam suatu negara yang digambarkan dengan penurunan indeks Gini (Sylwester, 2000). Di lain pihak, ketimpangan dalam pendidikan memiliki korelasi dengan ketimpangan dalam pasar kerja dan juga dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini dijelaskan oleh pengembalian modal yang akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendidikan (Nolan *et al.,* 2009). Perbedaan tingkat pendidikan akan memengaruhi tingkat kemampuan bekerja, pengetahuan, dan informasi yang memengaruhi produktivitas kerja seseorang dan pada akhirnya pendapatan (Castelló dan Doménech, 2002).

Berbagai studi banyak membahas hubungan ketimpangan dengan pendidikan dengan penekanan pada peningkatan partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi (Bergh dan Fink, 2009; Annabi, Harvey, dan Lan, 2011; Sylwester, 2000; Yang dan Qiu, 2016). Akan tetapi, di daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia ketimpangan akses pendidikan telah terjadi sejak pendidikan dasar. Perbedaan kualitas sumber daya manusia ini dapat menjelaskan adanya ketimpangan ekonomi antara daerah perdesaan dan perkotaan (Yang dan Qiu, 2016; Nakamura dan Murayama, 2012).

Di level keluarga, akses terhadap pendidikan sendirilah yang menjadi penjelas terhadap peningkatan ekonomi (Pieters, 2011). Perbedaan kemampuan orang tua dan kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya dapat memengaruhi akses terhadap pendidikan yang layak (Nolan *et al.,* 2009). Investasi yang relatif lebih kecil oleh orang tua yang miskin menyebabkan perbedaan keluaran kualitas pendidikan masa depan walaupun anak memiliki kemampuan yang sama (Yang dan Qiu, 2016). Lebih lanjut lagi, dengan tingginya akses pendidikan penduduk pada kelompok kesejahteraan teratas dibandingkan dengan kelompok kesejahteraan terbawah, biaya pendidikan tinggi diprediksi akan semakin tinggi dan menyebabkan orang miskin semakin sulit mengakses pendidikan tinggi dan semakin memperburuk ketimpangan (Nakajima dan Nakamura, 2009). Dengan demikian, perbaikan akses terhadap pendidikan menengah ke atas di area perdesaan, terutama bagi yang berasal dari keluarga termiskin, menjadi faktor yang penting untuk mengatasi masalah ketimpangan, dengan catatan bahwa perbaikan akses terhadap pendidikan dikawal oleh sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Baldacci *et al*., 2008; Annabi, Harvey, dan Lan, 2011).

### 3.2.1 Ketimpangan pendidikan antarkelompok kesejahteraan ditengah semakin membaiknya akses pendidikan di perdesaan

Sekalipun rata-rata lama sekolah di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, keduanya mengalamai peningkatan selama sepuluh tahun terakhir (2006-2016), dengan pertumbuhan tercepat dialami oleh penduduk perdesaan. Pada tahun 2006, rata-rata lama sekolah di perkotaan 1,3 kali rata-rata lama sekolah di perdesan, sedangkan pada tahun 2016 perbandingan tersebut menyempit menjadi 1,24 kali; rata-rata lama pendidikan di perdesaan telah mencapai 7,20 tahun, sementara di perkotaan mencapai 8,95 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan di perdesaan sedang mengejar ketertinggalannya dari di perkotaan, sebagaimana disampaikan oleh Takahiro (2017) bahwa dalam 14 tahun, rata-rata lama pendidikan di perdesaan Indonesia meningkat dari 5,1 tahun pada 1997 menjadi 6,3 tahun pada tahun 2011 .

Perbaikan akses pendidikan di perdesaan dan kesenjangan yang semakin kecil dibandingkan dengan kondisi perkotaan secara konsisten ditunjukkan oleh data angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) yang semakin membaik. Berdasarkan data APK dan APM, akses terhadap semua tingkat pendidikan di Indonesia secara umum meningkat dalam satu dekade terakhir.[3] Secara umum di Indonesia, tingkat pendidikan yang APK-nya mencapai 100% adalah tingkat pendidikan sekolah dasar diikuti oleh pendidikan tingkat SMP yang mencapai 80% partisipasi masyarakat usia sekolah. Hal ini menunjukkan akses penduduk usia 7-15 tahun ke pendidikan dasar yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Di perdesaan, perbaikan APK dan APM terutama terlihat pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar–SD), yang ditunjukkan oleh APK dan APM untuk jenjang pendidikan tersebut di wilayah perdesaan yang nilainya sedikit lebih baik dibandingkan perkotaan. Untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas, APK dan APM desa mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun tetap saja secara absolut capaiannya masih jauh di bawah kota.

Ketika disparitas pendidikan di perdesaan dan perkotaan semakin mengecil, ketimpangan justru terlihat di dalam perdesaan, yaitu penduduk dengan pengeluaran terendah memiliki lama pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Pada tahun 2006, lama pendidikan penduduk kuintil terbawah dan teratas adalah 5,95 dan 8,17,

[3]APK menunjukkan penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang bersekolah sesuai dengan tingkat pendidikannya, sedangkan APM menunjukkan penduduk yang bersekolah pada usia tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengetahui akses terhadap pembangunan program pendidikan, sementara APM lebih spesifik lagi mengukur kesesuaian usia pendidikan dengan tingkat pendidikan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan jumlah penduduk yang menduduki tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan usianya.

sedangkan pada tahun 2016 perbedaan antara dua kuintil tersebut membesar menjadi 6,35 dan 8,88. Perbedaan lama pendidikan yang meningkat dari tahun 2006 ke 2016 menjelaskan persistennya ketimpangan akses pendidikan oleh penduduk di kuintil terbawah di perdesaan. Di antara kelompok kesejahteraan di perdesaan, kenaikan tertinggi memang dialami oleh kelompok penduduk termiskin, namun secara absolut capaiannya masih di bawah kelompok penduduk terkaya. Terdapat ketimpangan capaian pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok kesejahteraan di dalam desa, tak hanya pada jenjang pendidikan tinggi (SMA dan perguruan tinggi), namun juga pada jenjang pendidikan menengah (SMP). Ini sekaligus mengindikasikan bahwa perbaikan capaian pendidikan tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi paling banyak dialami oleh kelompok kesejahteraan tertinggi di perdesaan.

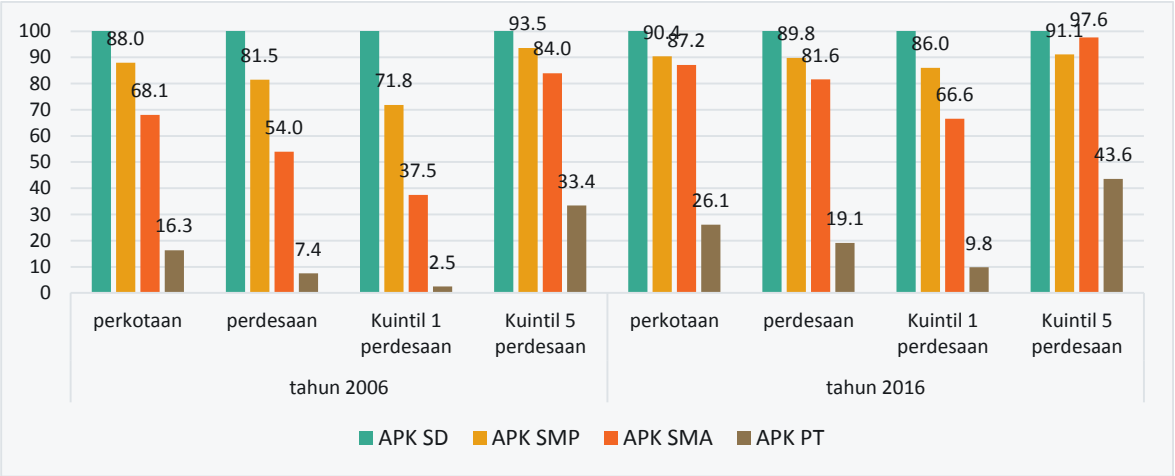


**Gambar 14. Angka Partisipasi Kasar berdasarkan Kelompok Kesejahteraan, 2006 dan 2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

### 3.2.2 Akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih baik

Melihat lebih dalam lagi pada masing-masing kelompok kesejahteraan, terlihat adanya perbaikan akses perempuan perdesaan terhadap pendidikan. Pada kelompok kesejahteraan termiskin di perdesaan ternyata perempuan menunjukkan capaian pendidikan–APK dan APM–yang lebih baik dibandingkan laki-laki, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan atas (SMP, SMA, dan perguruan tinggi). Di kelompok kesejahteraan terkaya di perdesaan, perempuan lebih unggul partisipasinya hanya pada jenjang pendidikan perguruan tinggi (Gambar 15).

Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan di perdesaan sejalan dengan kecenderungan nasional, yang ditunjukkan oleh rasio partisipasi sekolah anak perempuan dan laki-laki yang secara umum semakin mendekati paritas, terutama pada tingkat SMP dan SMA. Terdapat banyak hal yang bisa menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan upah bagi perempuan berpendidikan. Penjelas lainnya adalah pertumbuhan sektor jasa yang sudah melebihi sektor industri semenjak Indonesia pulih dari krisis keuangan Asia, dengan banyaknya kebutuhan di sektor ini terhadap tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan yang jurusannya banyak dipilih oleh perempuan (Alison dan Divya, 2013). Walau demikian perbaikan akses pendidikan bervariasi antardaerah yang berbeda, ketika akses perempuan yang lebih baik lebih banyak ditunjukkan oleh daerah di Pulau Jawa dan Bali. Surbakti dan Devasahayam (2015) menggarisbawahi tiga tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan terhadap perempuan, yakni

pernikahan dini, ketersediaan sarana pendidikan tinggi hingga ke pelosok wilayah, dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Terkait hal ini, tantangan terbesar tentu dihadapi oleh daerah perdesaan. Selain akses infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan perkotaan, daerah perdesaan juga menghadapi angka pernikahan dini yang tinggi. Pada 2013 tingkat pernikahan dini perempuan hingga usia 18 tahun mencapai lebih dari 40%.

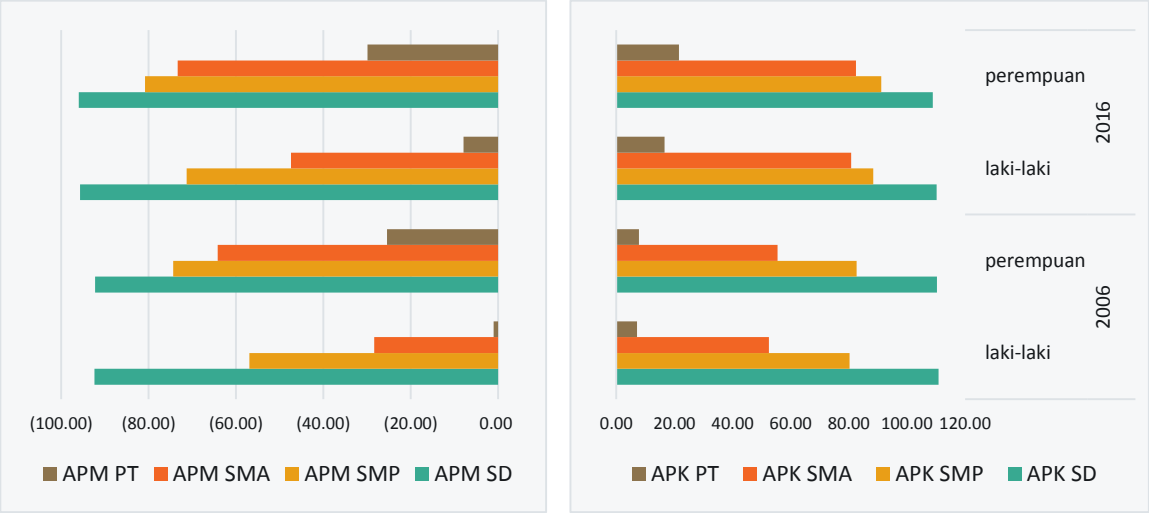


**Gambar 15. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni berdasarkan Kelompok Kesejahteraan dan Gender, 2006 dan 2016**

Sumber: Susenas 2006 dan 2016

*PT = perguruan tinggi; SMA = sekolah menengah atas; SMP = sekolah menengah pertama; SD = sekolah dasar

**GER = gross enrolment rate/angka partisipasi kasar

***NER = net enrolment rate/angka partisipasi murni

### 3.2.3 Walaupun akses pendidikan mengalami peningkatan, tetapi capaian pendidikan penduduk miskin di perdesaan masih tergolong rendah

Hubungan nyata pendidikan dengan kesejahteraan dan pekerjaan yang akan diraih seseorang dengan lebih baik digambarkan oleh ijazah tertinggi yang diraih. Capaian pendidikan penduduk perdesaan yang masih rendah tergambar oleh lebih dari 60% penduduknya yang tidak memiliki ijazah dan hanya lulusan SD. Perkembangan yang cukup baik terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun dari 2006 hingga 2016 ketika terjadi penurunan komposisi penduduk perdesaan tanpa ijazah yang diiringi oleh kenaikan komposisi penduduk perdesaan yang memiliki ijazah SD dan SMA. Jika dilihat lebih jauh, di antara kelompok-kelompok kesejahteraan di perdesaan, orang-orang tanpa ijazah dan/atau orang-orang yang hanya berijazah SD lebih banyak didominasi oleh penduduk termiskin. Pada 2016, 24% dari penduduk termiskin di perdesaan tidak memiliki ijazah, dan 52% lainnya hanya mengantongi ijazah SD saja. Hanya 11% dan 12% saja yang masing-masing memiliki ijazah SMP dan SMA. Angka yang jauh lebih kecil ditemui pada lulusan perguruan tinggi, yang hanya mencapai 1,32%. Capaian pendidikan kelompok termiskin di perdesaan berbeda jauh dari kelompok terkaya yang hanya 13% di antaranya saja yang tidak memiliki ijazah, 38% dengan ijazah SD, 10% dan 25% memiliki ijazah SMP dan SMA, dan sebanyak 13% sudah memiliki ijazah perguruan tinggi (Gambar 16).

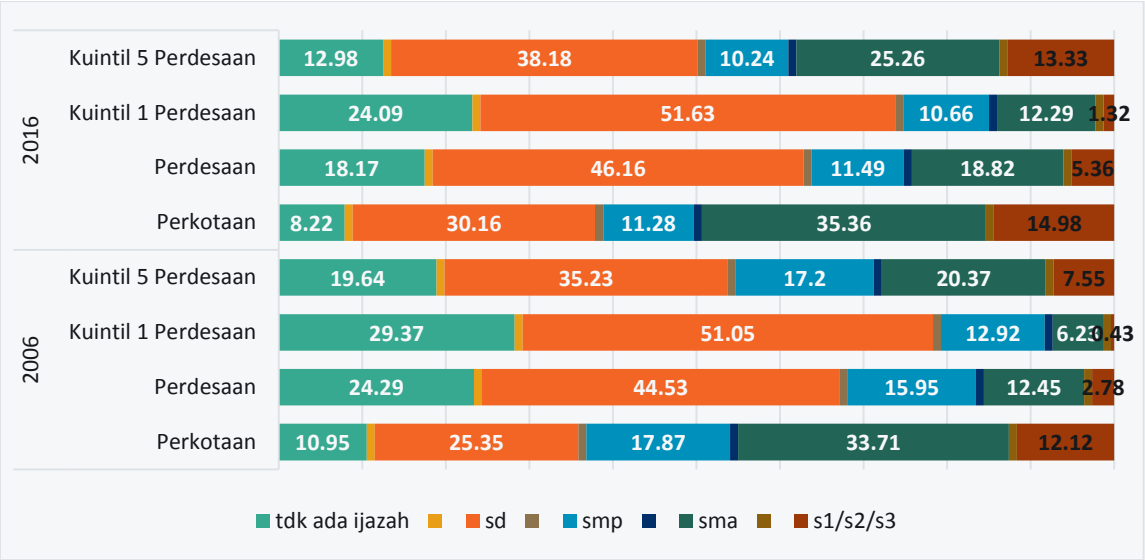


**Gambar 16. Tingkat Pendidikan Tertinggi di Perkotaan dan Perdesaan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran, 2006 dan 2016 (dalam persen)**

Sumber: Susenas 2006 dan 2016.

## 3.3 Kualitas Kesehatan Masyarakat Perdesaan: Paritas dalam Keluhan Kesehatan dan Akses Layanan Kesehatan Dasar, namun Disparitas dalam Capaian Gizi

Berdasarkan berbagai studi, hubungan antara kualitas kesehatan dan ketimpangan ekonomi ditemukan dapat bersifat dua arah. Kualitas kesehatan seseorang dapat menjadi determinan posisi sosial seseorang melalui perbedaan pendapatan, produktivitas, dan pencapaian pendidikan. Sebaliknya adanya ketimpangan ekonomi baik secara absolut maupun relatif ditemukan memiliki dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang diukur melalui angka kematian, angka kesuburan, keluhan sakit, dan lain-lain (Nolan *et al*., 2009).

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa hubungan ketimpangan ekonomi dengan kualitas kesehatan masyarakat ternyata bergantung pada kohesi sosial masyarakat yang digambarkan memburuk dengan adanya ketimpangan (Wilkinson, 2002). Semakin timpang suatu masyarakat secara ekonomi, maka semakin lemah pula kohesi sosial yang ada di dalam masyarakat itu sehingga menyebabkan munculnya stigmatisasi, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan persepsi masyarakat terhadap kesehatan mereka sendiri (Garthwaite dan Bambra, 2017). Semuanya dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat miskin, yang mengakibatkan ketimpangan kualitas kesehatan antara masyarakat kuintil pendapatan teratas dan terbawah (Garthwaite dan Bambra, 2017; Vincens, Emmelin, dan Stafström, 2018). Grafik-grafik berikut ini adalah hasil penghitungan terhadap beberapa proksi kualitas kesehatan masyarakat.

### 3.3.1 Kelompok Termiskin Perdesaan Lebih Banyak Mengeluhkan Kondisi Kesehatan daripada Kelompok Terkaya, tetapi dengan Selisih yang Semakin Mengecil seiring dengan Waktu

Secara umum masyarakat perdesaan lebih banyak mengeluhkan menderita penyakit seperti batuk, pilek, demam, diare, dan lain-lain dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Proporsi masyarakat yang mengeluhkan gangguan kesehatan menurun sebanyak 13,7% di perdesaan dan 14,8% di

perkotaan dalam satu dekade terakhir. Hal ini dapat menunjukkan perbaikan kualitas dan pengetahuan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tidak ditemukan perbedaan yang besar antara kualitas kesehatan masyarakat di pendapatan kuintil teratas dan terbawah berdasarkan laporan keluhan kesehatan. Walaupun demikian, khusus pada daerah perdesaan, persentase masyarakat perdesaan yang mengeluhkan gangguan kesehatan pada kelompok pendapatan 20% terbawah sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat dengan pendapatan 20% teratas (Gambar 17).

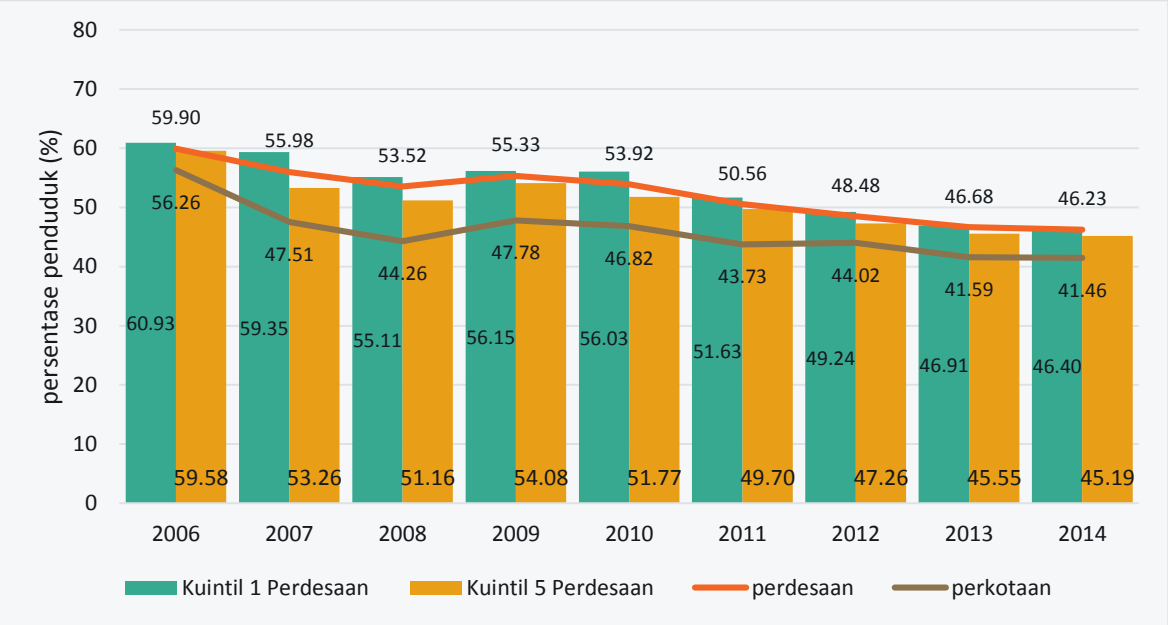


**Gambar 17. Perbandingan Proporsi Keluhan Kesehatan Penduduk Usia Produktif (15-65 tahun) di Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan Kuintil Pengeluaran Per Kapita, 2006-2014**

Sumber: Diolah dari Susenas,2006-2014.

### 3.3.2 Tantangan Pemerataan Capaian Gizi Masyarakat Perdesaan dan Perbaikan Akses Kesehatan Dasar

Terdapat banyak perdebatan terkait hubungan derajat kesehatan yang diukur melalui capaian gizi dengan ketimpangan ekonomi. Alur yang sering dilihat adalah bagaimana kualitas gizi dan juga masalah kesehatan seseorang memengaruhi produktivitas kerja yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan meraih pendapatan (O'Donnell, Van Doorslaer, dan Van Ourti, 2013). Angka anak pendek menjadi salah satu proksi penting yang paling banyak dipakai, selain angka kematian, untuk melihat kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi sebagian besar ditemukan memiliki korelasi yang lemah dengan ketimpangan (Nolan *et al.*, 2009). Penelitian lain menemukan hubungan kuat antara nutrisi dengan produktivitas. Hal ini mendorong perlunya intervensi nutrisi sejak usia dini bahkan sejak masa kehamilan dan masa remaja perempuan dengan tujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan mendukung produktivitas kerja di masa depan (Marotell *et al.*, 2009). Selain itu, beberapa studi juga melihat asosiasi antara intervensi gizi di usia dini terhadap penghasilan yang lebih tinggi pada kelompok laki-laki (Hoddinott, Maluccio, Behrman, Flores, dan Martorell, 2008).

Ketimpangan capaian gizi di Indonesia terlihat jelas tak hanya antarkelompok kesejahteraan, namun juga antara wilayah perkotaan dengan perdesaan, di antara berbagai wilayah kepulauan,

dan juga antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, untuk indikator kekurangan gizi (anak pendek, sangat pendek, kurus, dan sangat kurus), makin rendah tingkat kesejahteraan maka makin besar prevalensinya, namun sebaliknya untuk angka kelebihan gizi (gemuk). Prevalensi kurang gizi di wilayah perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan, namun juga sebaliknya untuk kelebihan gizi. Di antara wilayah kepulauan, kekurangan gizi paling besar prevalensinya di Indonesia Timur, yakni wilayah Nusa Tenggara Timur-Nusa Tenggara Barat, disusul oleh Maluku-Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan baru Jawa-Bali (Tabel 4).

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, prevalensi kekurangan dan kelebihan gizi lebih besar ditunjukkan oleh kelompok laki-laki daripada perempuan. Pola ini pun ditemukan di studi-studi lain di negara berkembang. Beberapa alasan yang dikemukakan meningkatkan faktor risiko pada anak laki-laki adalah kerentanan bayi laki-laki secara biologis dan faktor kultural (Wamani *et al*., 2007). Temuan ini sedikit bertolak belakang dengan temuan di negara lain yang mendapati bahwa status kesehatan anak perempuan cenderung lebih buruk di rumah tangga miskin karena adanya favoritisme terhadap anak laki-laki (Dey dan Chaudhuri, 2008; Najnin, Bennett, dan Luby, 2011).

**Tabel 4. Prevalensi Masalah Gizi antarkelompok Wilayah dan Masyarakat Indonesia, 2013**

| | Pendek (%) | Sangat Pendek (%) | Kurus (%) | Sangat Kurus (%) | Gemuk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kuintil 1** | 48.4 | 25.2 | 14.1 | 6.9 | 10.3 |
| **Kuintil 2** | 42.5 | 20.2 | 13.0 | 5.5 | 11.3 |
| **Kuintil 3** | 38.5 | 17.9 | 11.7 | 5.2 | 11.6 |
| **Kuintil 4** | 32.3 | 15.1 | 11.9 | 5.1 | 11.4 |
| **Kuintil 5** | 29.0 | 14.4 | 10.6 | 4.2 | 13.9 |
| **Perdesaan** | 42.1 | 20.9 | 12.8 | 6.0 | 11.7 |
| **Perkotaan** | 32.5 | 15.2 | 11.4 | 4.6 | 11.8 |
| **Indonesia** | 37.2 | 18.0 | 12.1 | 5.3 | 11.8 |
| **Sumatra** | 42.6 | 48.3 | 25.6 | 15.9 | 7.8 |
| **Jawa-Bali** | 39.9 | 44.2 | 24.5 | 14.4 | 7.0 |
| **NTT-NTB** | 50.3 | 41.9 | 22.5 | 12.6 | 5.7 |
| **Kalimantan** | 42.8 | 39.0 | 21.2 | 14.4 | 7.3 |
| **Sulawesi** | 43.6 | 36.5 | 20.7 | 13.7 | 5.7 |
| **Maluku-Papua** | 44.3 | 46.1 | 23.6 | 12.8 | 6.7 |
| **Laki-laki** | 38.1 | 18.8 | 12.8 | 5.7 | 12.1 |
| **Perempuan** | 36.3 | 17.1 | 11.4 | 4.9 | 11.5 |

Sumber: Diolah dari Riskesdas, 2013.

Melihat lebih dalam di wilayah perdesaan, ketimpangan capaian gizi antarkelompok kesejahteraan di dalam perdesaan terlihat mencolok di berbagai wilayah di Indonesia. Secara umum, untuk berbagai indikator kurang gizi, kelompok termiskin adalah yang terbesar dalam prevalensi anak pendek, sangat pendek, kurus, dan sangat kurus. Angka gizi kronis (anak pendek dan sangat pendek) menjadi ukuran keparahan masalah gizi, dan di antara berbagai kelompok di wilayah yang berbeda, anak-anak di bawah usia lima tahun (balita) dari kelompok termiskin di perdesaan NTT adalah yang paling besar prevalensi anak pendeknya (56,4%). Sementara itu, untuk indikator kelebihan gizi (anak gemuk), anak-anak balita dari kelompok terkaya di perdesaan di Sumatra dan Kalimantan

adalah yang paling banyak mengalami kegemukan dengan prevalensi masing-masing sebesar 17% dan 16% (Gambar 18).

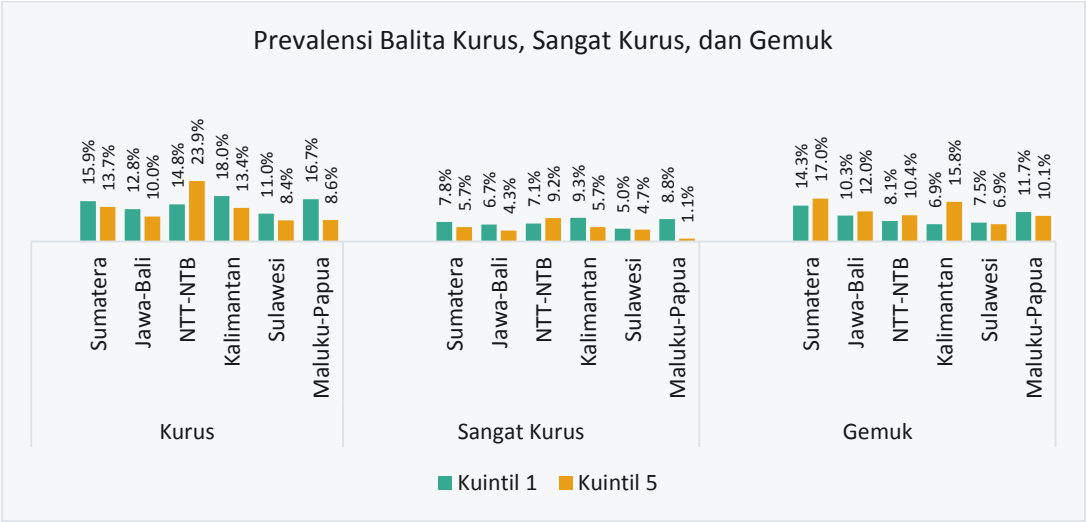


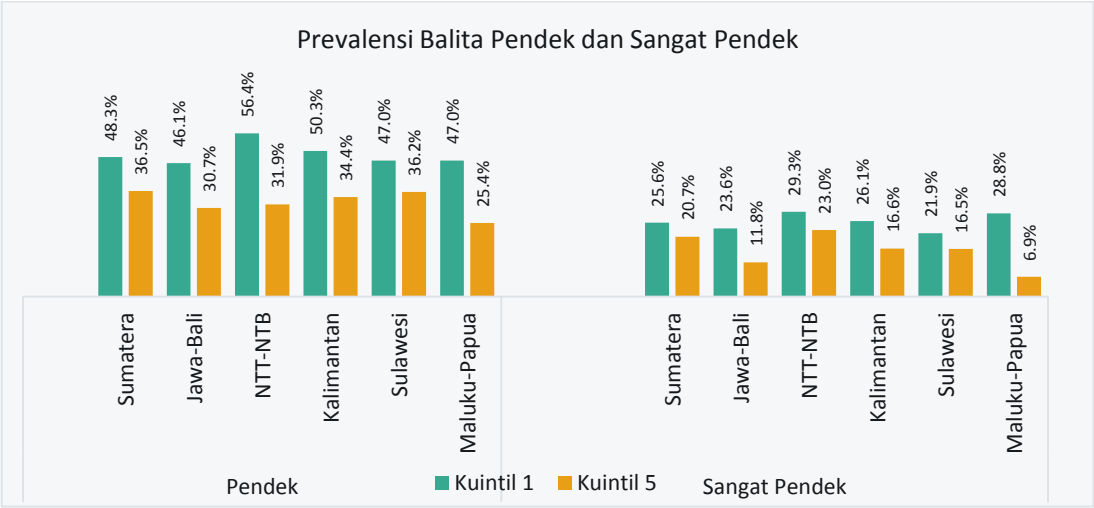


**Gambar 18. Prevalensi Masalah Gizi antarkelompok Kesejahteraan di Perdesaan Indonesia, 2013**

Sumber: Diolah dari Riskesdas, 2013.

Selain mengukur ketimpangan kesehatan masyarakat, observasi terhadap ketimpangan dalam akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga telah dilakukan. Akses kesehatan dasar yang seharusnya bersifat menyeluruh adalah pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan di faskes, akses perempuan terhadap program Keluarga Berencana (KB) dan cakupan imunisasi dasar. Pemeriksaan kehamilan seharusnya dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat dengan nilai minimum empat kali selama kehamilan, sedangkan persalinan seharusnya ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan. Imunisasi dasar yang lengkap seharusnya mencakup 1 kali imunisasi BCG (bacillus Calmette- Guērin), 3 kali imunisasi DPT (diphteria, pertussis, tetanus), 3 kali imunisasi polio, 3 kali imunisasi hepatitis B, dan 1 kali imunisasi campak antara usia 12-24 bulan (Balitbangkes, 2013).

Secara umum terlihat perbaikan akses terhadap tenaga kesehatan yang nyata di daerah perdesaan. Perbedaan presentase akses di kuintil teratas dan terbawah pun semakin lama semakin mengecil

(Gambar 19). Walaupun ibu-ibu di pedesaan pada kuintil terbawah masih sedikit tertinggal dari kuintil teratas dan target nasional, yakni 90% (Infodatin, 2014). Hal ini dapat didorong oleh banyaknya program yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, seperti peningkatan akses ibu untuk pemeriksaan, persalinan dan perawatan nifas di fasilitas kesehatan, dan akses perempuan terhadap program KB (Balitbangkes, 2013).

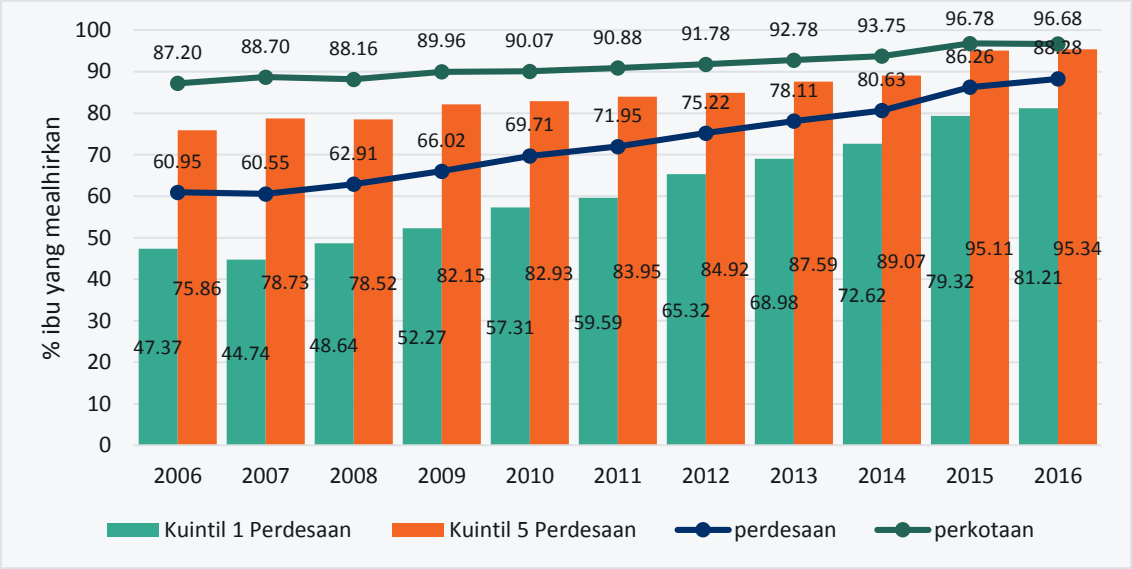


**Gambar 19. Perbandingan Proporsi Kelahiran dibantu Tenaga Kesehatan di Perdesaan, 2006-2016**

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006-2016

Dibandingkan dengan angka cakupan imunisasi lengkap nasional pada tahun 2013, daerah perdesaan dan perkotaan hingga tahun 2014 memiliki angka cakupan yang sama, yakni sekitar 60% (Balitbangkes, 2013). Akan tetapi semenjak tahun 2015 cakupan imunisasi secara keseluruhan menurun hingga lebih dari 20%. Prevalensi penduduk perdesaan kuintil teratas yang memiliki imunisasi lengkap lebih tinggi sekitar 5% dibandingkan penduduk pada kuintil terbawah pengeluaran (Gambar 20). Akses terhadap pelayanan imunisasi dasar lengkap lebih dipengaruhi oleh pengetahuan ibu dan dukungan keluarga maupun masyarakat di sekitarnya dibandingkan oleh status ekonomi (Isnayni, 2017).

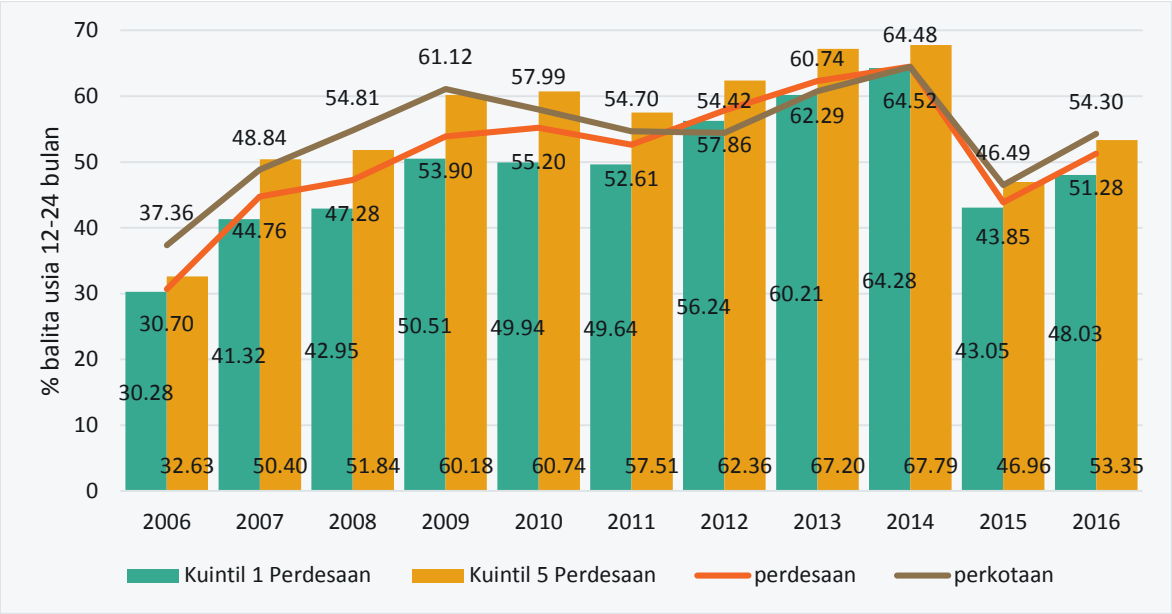


**Gambar 20. Perbandingan Proporsi Cakupan Imunisasi Lengkap Anak Usia 12-24 Bulan di Perdesaan, 2006-2016**

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006-2016.

Hingga tahun 2016, masyarakat termiskin di perdesaan mengalami peningkatan akses terhadap program bantuan kesehatan nasional. Terutama semenjak diberlakukannya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada awal tahun 2014, perbedaan proporsi masyarakat di perdesaan dan perkotaan yang memiliki jaminan sosial semakin mengecil yang menunjukkan perbaikan akses terhadap program bantuan kesehatan. Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin) yang dibentuk pada tahun 2005 dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang dibentuk pada tahun 2008 dianggap tidak mampu memberikan cakupan yang sesuai pada orang miskin sehingga dibentuk jaminan kesehatan yang sifatnya universal (Joedadibrata, 2012). Pada Gambar 21 terlihat adanya peningkatan akses penduduk perkotaan dan perdesaan terhadap jaminan kesehatan universal sebesar 2% dan 5% secara berturut-turut. Penduduk kuintil terbawah memiliki cakupan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) terbesar dibandingkan dengan penduduk kuintil pengeluaran lainnya. Namun, jika melihat jumlah penduduk terkaya di perdesaan yang memiliki jaminan sosial juga meningkat dalam satu dekade terakhir, terlihat adanya ketidaktepatan sasaran pemberian BPJS PBI. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2006, perubahan peningkatan penerima BPJS PBI pada kuintil pertama tidak secepat yang terjadi pada kelompok pendapatan teratas. Hal ini menunjukkan masih kurang maksimalnya pencapaian target BPJS untuk masyarakat miskin di perdesaan.

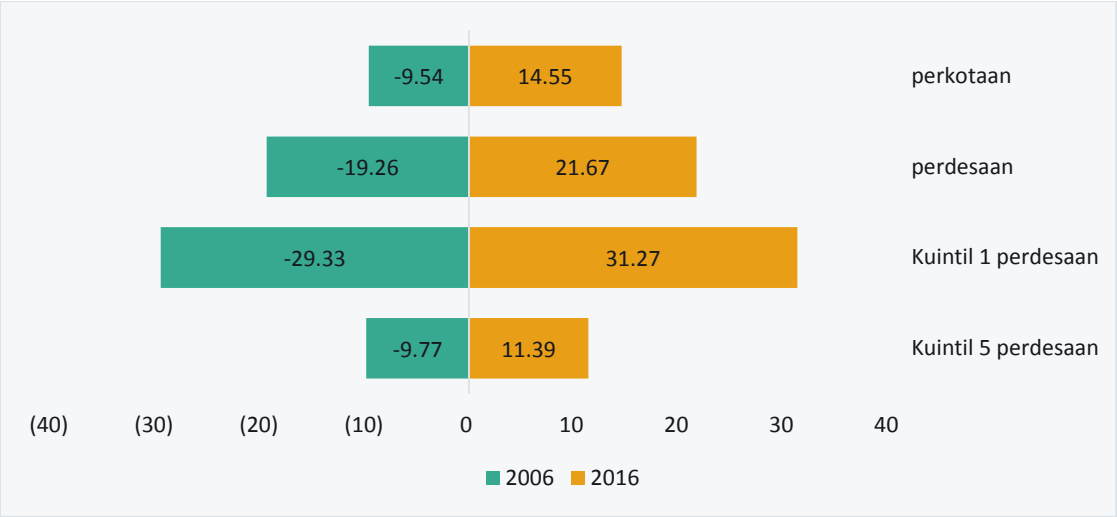


**Gambar 21. Perbandingan Proporsi Keluarga dengan Jaminan Kesehatan di Perdesaan, 2006-2016**

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006 dan 2016.

# IV. SUMBER DAYA ALAM PERDESAAN

Sumber daya alam (SDA) merupakan modal penghidupan yang secara alami tersedia. SDA hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari sumber daya tak terlihat yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang seperti udara, hingga sumber daya yang langsung dimanfaatkan untuk kepentingan produksi seperti kayu dan tanah (DFID, 1999). Di Indonesia, dengan komposisi tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor pertanian, sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan pertanian. Untuk itu akses terhadap lahan yang dapat ditanami menjadi sumber daya alam terpenting bagi masyarakat desa di sebagian besar wilayah Indonesia untuk mendukung penghidupannya (Baumann, 2002). Kerentanan biasanya muncul ketika terjadi penguasaan sumber daya alam yang timpang. Hukum alam yang berlaku adalah orang dengan modal yang lebih kuat akan memiliki akses lebih besar terhadap penguasaan lahan, sebaliknya untuk orang-orang dengan modal terbatas. Pada umumnya modal untuk usaha pertanian tidaklah kecil–terutama karena memerlukan penguasaan lahan dan adanya faktor risiko seperti faktor cuaca dan gangguan hama–sehingga ketika orang miskin mendapat akses modal yang terbatas maka modal tersebut akan cenderung digunakan untuk mengembangkan mata pencaharian di luar pertanian (Maldonado dan Gonzalez-Vega, 2004).

Bagian ini akan membahas kondisi aset sumber daya alam desa dan membandingkannya dengan kondisi ketimpangan di perdesaan. Potensi dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan fokus utama yang akan dibahas mengingat akses terhadap sumber daya alam yang lebih merata akan mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Tampak jelas bahwa ada variasi tingkat kesejahteraan antarjenis topografi yang berbeda. Desa-desa dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih baik umumnya berada di dataran rendah, di kawasan pesisir, atau tidak berbatasan dengan hutan. Namun, pada wilayah ini ketimpangannya cukup tinggi pula. Di sisi lain, daerah yang berlokasi di sekitar kawasan hutan masuk ke dalam kelompok kesejahteraan rendah sekaligus ke dalam kelompok ketimpangan rendah. Dalam hal pemanfaatan lahan, ketimpangan sangat nyata terjadi. Setengah dari keseluruhan lahan di Indonesia dikuasai oleh segelintir rumah tangga

pertanian, menyisakan sebagian besar rumah tangga pertanian lainnya yang rata-rata hanya mengelola kurang dari setengah hektar lahan pertanian.

## 4.1 Kesejahteraan dan Ketimpangan antardesa dengan Tipologi Wilayah yang Berbeda

Pengelompokan desa berdasarkan tipologi wilayahnya memperlihatkan kecenderungan kesejahteraan dan ketimpangan yang berbeda antardesa dengan kondisi kontur wilayah, lokasi relatif terhadap laut, dan lokasi relatif terhadap hutan yang berbeda. Keterkaitan antara tipologi wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat antara lain dijelaskan dari dimensi ekologi dan dari dimensi sosial. Hal ini termasuk potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dan aspek budaya masyarakat yang tergambar dari pola migrasi, kebiasaan masyarakat di masing-masing wilayah dalam mengelola sumber daya alam wilayahnya, serta dukungan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan modal sosial mereka. Selanjutnya, berbagai faktor ini akan memengaruhi interaksi ekonomi melalui ongkos produksi, pasar barang, dan pasar tenaga kerja yang menjelaskan struktur perekonomian suatu masyarakat di tiap lokasi yang berbeda (Ives, 2001; dan Hoover, 1948).

Dilihat dari topografi, lokasinya terhadap laut, dan lokasinya terhadap hutan, dari 60 ribu desa berstatus perdesaan di Indonesia, sebagian besar di antaranya adalah desa-desa di dataran rendah, bukan daerah pesisir, dan berlokasi di luar hutan (Tabel 3). Keragaman kondisi geografis desa menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang ditopang oleh karakteristik masing-masing desa. Potensi sumber daya alam ini yang kemudian perlu dilihat apakah memiliki peranan terhadap ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan. Tipologi desa ini kemudian akan diamati sebarannya berdasarkan kelompok tingkat kesejahteraan dan kelompok tingkat ketimpangannya.

**Tabel 5. Tipologi Desa**

| Tipologi | Keterangan | Perdesaan (%) | Perkotaan (%) |
|---|---|---|---|
| **Topografi** | Dataran rendah | 73.29 | 92.95 |
| | Dataran tinggi | 26.71 | 7.05 |
| **Lokasi terhadap laut** | Bukan pesisir | 84.03 | 88.44 |
| | Pesisir | 15.97 | 11.56 |
| **Lokasi terhadap hutan** | Di luar hutan | 70.53 | 94.37 |
| | Di dalam/sekitar hutan | 29.47 | 5.63 |
| **Jumlah desa** | | 59,575 | 15,692 |

Sumber: Diolah dari Podes 2014.

Desa-desa di dataran rendah cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik namun kesenjangan ekonominya relatif lebih tinggi daripada desa-desa di dataran tinggi. Gambar 22 menunjukkan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita masyarakat desanya, hampir setengah dari desa-desa di dataran rendah (45,34%) tergolong ke dalam kelompok desa kaya dan terkaya. Sebaliknya, lebih dari seperempat desa-desa di dataran tinggi (31,51%) termasuk ke dalam kelompok desa termiskin dan hampir seperempat lainnya (23,25%) adalah desa miskin. Karakteristik dataran tinggi di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan

ekonomi. Wilayah dataran tinggi umumnya terpapar oleh hambatan pembangunan fisik, antara lain jaraknya yang jauh dengan pusat perekonomian, pegunungan yang curam, kondisi tanah yang rapuh, dan curah hujan musiman yang tinggi. Hambatan lain terkait dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, isolasi, dan migrasi yang tinggi di beberapa wilayah (Hoover, 1948; FAO, 2002).

Seiring dengan tingkat kesejahteraan yang diraihnya, di lain pihak desa-desa di dataran rendah menghadapi ketimpangan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa di dataran tinggi (Gambar 22). Jika desa-desa tersebut dibagi menjadi 5 kelompok ketimpangan, desa-desa yang berlokasi di dataran rendah tersebar merata pada kelompok ketimpangan menengah-tinggi. Hanya sebagian kecil, yaitu 16,06% desa berdataran rendah yang berada di kelompok 20% tingkat ketimpangan terendah. Sementara itu, lebih dari 30% desa berdataran tinggi tergolong dalam kelompok desa dengan tingkat ketimpangan paling rendah.

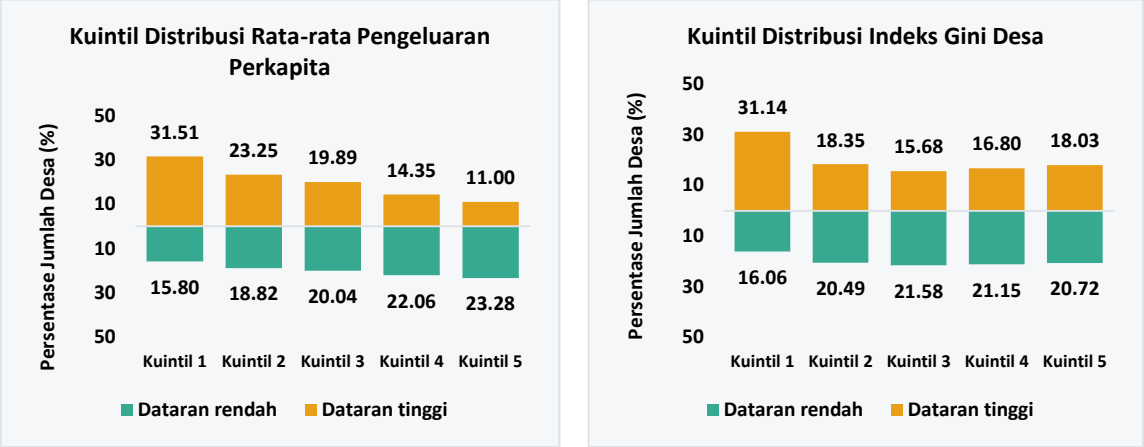


**Gambar 22. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Topografi Wilayah 2014**

Sumber: Diolah dari Podes 2014 dan Peta Kemiskinan 2015.

Jika dilihat berdasarkan lokasinya terhadap laut, terdapat cukup banyak desa di kawasan pesisir yang masuk ke dalam kelompok desa terkaya sekaligus tertimpang. Sebagaimana digambarkan pada Gambar 23, 26% desa yang berlokasi di kawasan pesisir berada pada kelompok kesejahteraan tertinggi. Desa-desa pesisir lainnya tersebar dengan relatif merata ke dalam kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedang, dan tinggi, dengan persentase sebaran berkisar antara 17% hingga 19%. Salah satu hal yang dapat menjelaskan cukup tingginya jumlah desa pesisir yang masuk ke dalam kelompok kesejahteraan tertinggi adalah bahwa kemungkinan desa-desa tersebut masuk ke dalam bagian wilayah ibu kota atau pusat pertumbuhan yang umumnya berada di pesisir pantai dan cenderung mengalami percepatan pembangunan sosial-ekonomi dibandingkan dengan desa-desa yang berada di wilayah terpencil atau bukan pesisir (Chongvilaivan dan Kim, 2016). Sementara itu, dilihat dari ketimpangan ekonomi yang dihadapi, desa-desa di daerah pesisir lebih banyak yang masuk ke dalam kelompok desa dengan ketimpangan tinggi dibandingkan yang rendah.

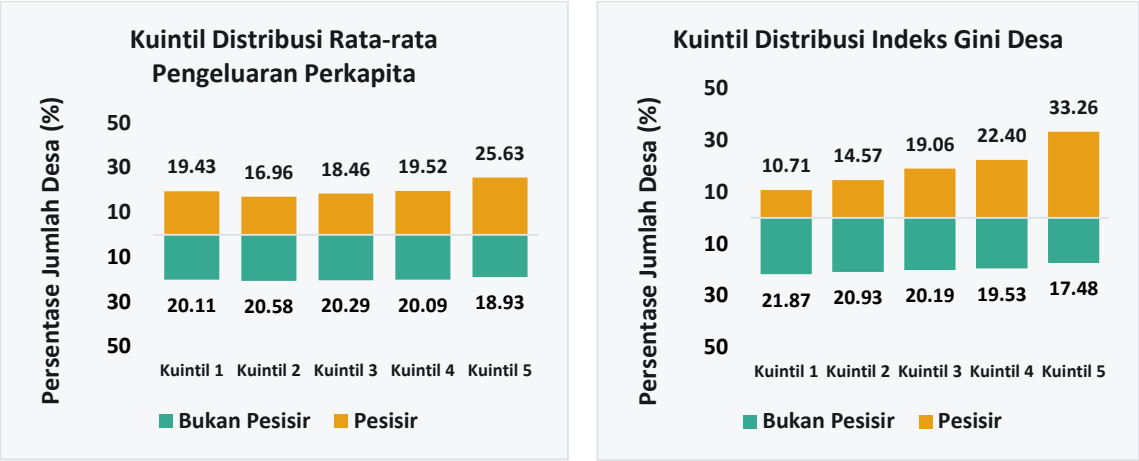


**Gambar 23. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Laut 2014**

Sumber: Diolah dari Podes 2014 dan Peta Kemiskinan 2015.

Dilihat dari lokasi desa relatif terhadap hutan, sekitar 30% dari desa-desa yang berlokasi di dalam atau sekitar hutan masuk ke dalam kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan terendah dan sekaligus tingkat ketimpangan terendah. Di luar kelompok dominan tersebut, desa-desa lain yang berlokasi di dalam atau sekitar hutan tersebar secara relatif merata di antara kelompok-kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan rendah, sedang, tinggi, hingga tertinggi. Kondisi sebaliknya dihadapi oleh desa-desa yang berlokasi jauh dari hutan; hanya sebagian kecil di antara desa-desa tersebut masuk ke dalam kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan terendah. Di antara sebagian kecil desa tersebut, tingkat kesejahteraan dan ketimpangan yang terpaut jauh hanya terjadi pada kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan terendah, yaitu masing-masing rata-ratanya hanya sebesar 16%. Hal ini mirip dengan kecenderungan yang dialami desa-desa yang berlokasi di dalam atau sekitar hutan. Sementara itu, sebagian besar desa yang berlokasi jauh dari hutan tersebar merata di antara kelompok-kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, sedang, tinggi, hingga tertinggi dengan rata-rata distribusi masing-masing kelompok mencapai sekitar 20% hingga 22% (Gambar 24). Ketimpangan ekonomi yang rendah di antara desa-desa yang berlokasi di dalam/sekitar hutan salah satunya dijelaskan oleh akses rumah tangga miskin terhadap sumber daya hutan yang bisa diperoleh secara gratis. Perhitungan pendapatan yang memasukkan pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan hutan akan menghasilkan indeks ketimpangan yang lebih rendah dan sebaliknya jika pendapatan dari hutan tidak masuk dalam perhitungan (Cavendish, 1999; Fisher, 2004).

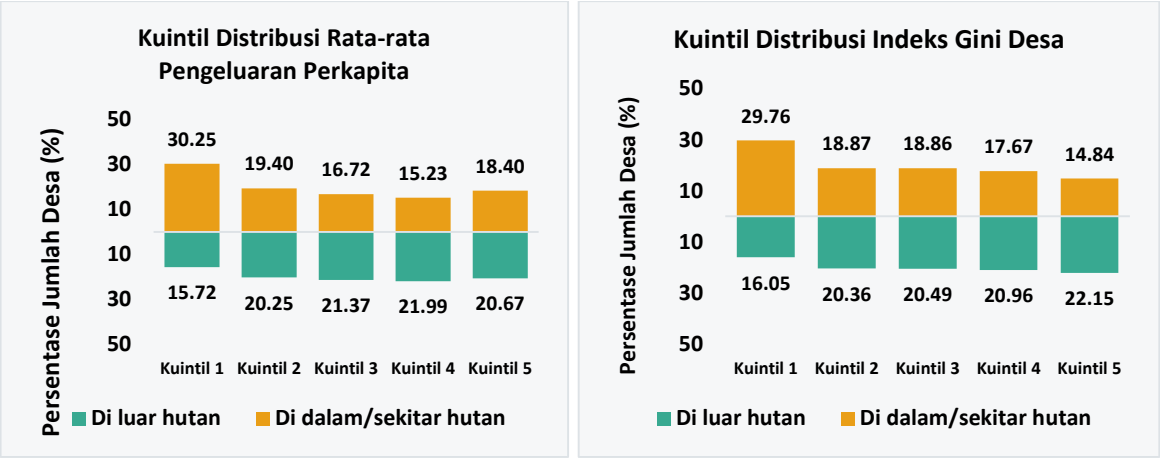


**Gambar 24. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Hutan 2014**

Sumber: Diolah dari Podes 2014 dan Peta Kemiskinan 2015.

Menurut data Podes 2011, dari 75.267 desa yang diobservasi dalam studi ini, pada 2011 sebanyak 17.136 desa (22,8%) berada di dalam atau sekitar hutan. Sementara itu, menurut data Podes 2014, jumlahnya mengalami peningkatan pada 2014 menjadi 18.439 desa atau sekitar 24,5% dari total desa yang diobservasi Gambar 25 menunjukkan terjadinya pertambahan desa observasi yang berada di dalam/sekitar hutan. Deforestasi saat ini masih merupakan topik yang banyak diperdebatkan. Perdebatan umumnya terjadi akibat perbedaan definisi dan perhitungan dalam mengukur deforestasi. Namun, jika dilihat dengan lebih dalam, persentase desa observasi yang berlokasi di dalam/sekitar hutan dan berfungsi sebagai hutan lindung mengalami penurunan dari 49,1% pada 2011 menjadi 43,4% pada 2014, sementara terjadi peningkatan persentase desa yang berada di dalam/sekitar hutan produksi, yaitu 50,86% pada 2011 menjadi 56,6% pada 2014. (Gambar 25).

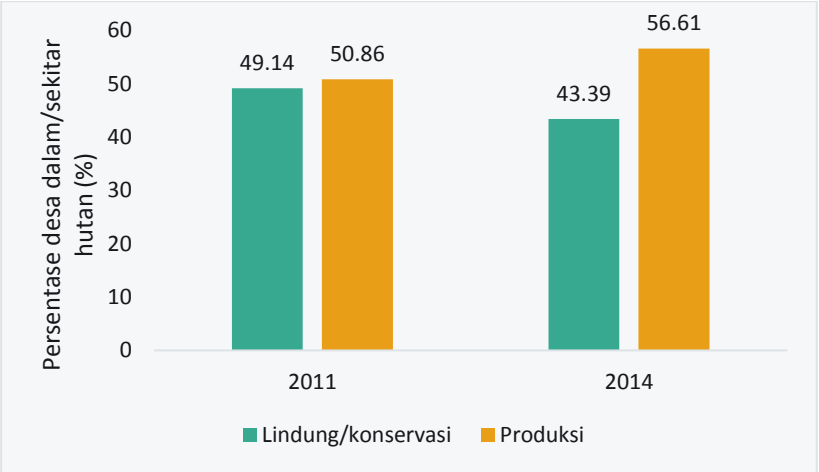


**Gambar 25. Desa yang Ada di dalam/sekitar Hutan menurut Fungsi, 2011-2014**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan 2014.

## 4.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa: Ketimpangan Akses Lahan Pertanian dan Kebutuhan akan Pengelolaan Irigasi yang Baik

Sumber daya alam merupakan modal penghidupan yang penting bagi masyarakat desa. Akses terhadap sumber daya alam menentukan kemampuan masyarakat desa dalam memperoleh sumber makanan, bekerja dan mengakumulasi modal penghidupan lainnya, dan juga berfungsi sebagai pengaman terhadap goncangan baik yang berupa bencana alam maupun yang berasal dari ketidaksempurnaan pasar (Cotula, *(ed.)*, 2006). Di antara berbagai sumber daya alam, tanah dan air menjadi perhatian utama karena lahan dan air adalah faktor produksi utama pertanian yang merupakan sektor dominan di perdesaan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia, permintaan terhadap keduanya juga meningkat. Di banyak tempat di seluruh dunia, lahan dan air kerap menjadi objek perebutan penguasaan. Tak berhenti disitu, persoalan menjadi semakin kompleks dengan kenyataan bahwa aktivitas ekonomi manusia dan perubahan iklim membuat daya dukung lahan semakin berkurang dan sumber daya air semakin menipis. Terkait hal tersebut, perbaikan manajemen akses dan pemanfaatan lahan dan sumber air menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan (FAO, 2011).

### 4.2.1 Akses Lahan yang Timpang

Akses terhadap penguasaan lahan menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan rumah tangga pertanian dalam menjalankan penghidupannya dan meningkatnya kesejahteraannya (Dorosh *et al.* and Razafindravonoma *et al.*, 2001 dalam Randrianarisoa dan Minten, 2001). Tabel 6 menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan pertanian di Indonesia. Ketimpangan akses terhadap lahan di Indonesia terlihat dari penguasaan sebagian besar lahan dengan luas yang besar (di atas dua hektare) oleh sekelompok kecil rumah tangga pertanian. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa secara nasional, 52% lahan dikuasai hanya oleh 11,47% rumah tangga pertanian. Sedangkan di perdesaan, 52% lahan dikuasai oleh 13% rumah tangga pertanian.

**Tabel 6. Penguasaan Lahan Nasional, 2013**

| | Kategori lahan | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | <0.5 ha | 0.5 - 1 ha | 1 – 2 ha | >2 ha | |
| **Nasional** | | | | | |
| **Rumah tangga pertanian** | 56.24 | 17.39 | 14.17 | 12.2 | 100 |
| **Penguasaan lahan** | 12.42 | 13.27 | 20.72 | 53.59 | 100 |
| **Perkotaan** | | | | | |
| **Rumah tangga pertanian** | 74.27 | 12.81 | 7.44 | 5.48 | 100 |
| **Penguasaan lahan** | 22.03 | 15.47 | 16.91 | 45.59 | 100 |
| **Perdesaan** | | | | | |
| **Rumah tangga pertanian** | 52.6 | 18.32 | 15.53 | 13.55 | 100 |
| **Penguasaan lahan** | 11.31 | 13.01 | 21.16 | 54.52 | 100 |

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013.

Dilihat dari sebarannya berdasarkan pulau besar di Indonesia, ketimpangan penguasaan lahan paling tinggi terjadi di Sulawesi, Sumatera, NTB dan NTT, serta Papua dan Maluku. Sementara di Kalimantan, penguasaan lahan antar rumah tangga pertanian terlihat cukup merata, baik di wilayah

perdesaan maupun perkotaan (Tabel 7). Jawa merupakan kasus khusus, karena penguasaan lahan di wilayah ini justru didominasi oleh lahan dengan luasan sempit. Sebanyak 75% rumah tangga pertanian di Jawa menguasai lahan pertanian sempit. Hal ini wajar karena lahan di Jawa relatif terbatas sementara penduduknya cukup padat.

**Tabel 7. Penguasaan Lahan Pertanian di Setiap Wilayah, 2013**

| | | <0.5 ha | 0.5 - 1 ha | 1 – 2 ha | >2 ha | <0.5 ha | 0.5 - 1 ha | 1 – 2 ha | >2 ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sumatra** | | | | **Jawa** | | | |
| TOTAL | Rumah tangga pertanian | 30.27 | 18.92 | 25.26 | 25.53 | 76.21 | 15.94 | 5.90 | **1.94** |
| | Penguasaan lahan | 4.33 | 8.55 | 21.60 | 65.50 | 36.83 | 26.64 | 18.88 | **17.63** |
| PERKOTAAN | Rumah tangga pertanian | 51.19 | 15.51 | 16.41 | 16.88 | 81.53 | 12.07 | 4.52 | **1.87** |
| | Penguasaan lahan | 7.21 | 8.74 | 17.28 | 66.77 | 38.68 | 23.02 | 16.44 | **21.85** |
| PERDESAAN | Rumah tangga pertanian | 27.72 | 19.34 | 26.34 | 26.59 | 74.63 | 17.09 | 6.31 | **1.96** |
| | Penguasaan lahan | 4.07 | 8.53 | 22.01 | 65.39 | 36.38 | 27.55 | 19.49 | **16.58** |
| | | **Kalimantan** | | | | **Sulawesi** | | | |
| TOTAL | Rumah tangga pertanian | 47.88 | 23.83 | 19.06 | 9.21 | 25.32 | 16.13 | 23.58 | **34.95** |
| | Penguasaan lahan | 12.18 | 20.15 | 31.26 | 36.39 | 2.42 | 5.22 | 14.39 | **77.94** |
| PERKOTAAN | Rumah tangga pertanian | 79.00 | 12.17 | 6.07 | 2.74 | 43.71 | 13.42 | 17.54 | **25.31** |
| | Penguasaan lahan | 32.13 | 21.29 | 20.38 | 26.20 | 3.03 | 4.50 | 10.98 | **81.49** |
| PERDESAAN | Rumah tangga pertanian | 44.25 | 25.18 | 20.58 | 9.97 | 22.83 | 16.51 | 24.40 | **36.26** |
| | Penguasaan lahan | 11.17 | 20.10 | 31.81 | 36.91 | 2.35 | 5.32 | 14.83 | **77.50** |
| | | **NTB & NTT** | | | | **Papua and Maluku** | | | |
| TOTAL | Rumah tangga pertanian | 31.73 | 20.54 | 25.41 | 22.30 | 57.60 | 16.31 | 14.30 | **11.78** |
| | Penguasaan lahan | 4.52 | 10.27 | 24.88 | 60.32 | 10.25 | 13.89 | 23.67 | **52.17** |
| PERKOTAAN | Rumah tangga pertanian | 51.95 | 17.53 | 17.44 | 13.05 | 74.44 | 10.70 | 9.21 | **5.63** |
| | Penguasaan lahan | 7.52 | 12.10 | 23.16 | 57.22 | 17.48 | 15.30 | 24.85 | **42.35** |
| PERDESAAN | Rumah tangga pertanian | 29.89 | 20.82 | 26.13 | 23.14 | 56.39 | 16.71 | 14.67 | **12.22** |
| | Penguasaan lahan | 4.34 | 10.16 | 24.99 | 60.51 | 9.97 | 13.84 | 23.63 | **52.57** |

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013.

Ketersediaan lahan yang semakin sempit mendorong kenaikan harga lahan di pasaran. Pada akhirnya, hanya orang-orang yang lebih mampu secara ekonomi yang bisa memperolehnya, dan orang-orang miskin hanya bisa menguasai lahan yang lebih sempit atau sama sekali tidak memiliki lahan (Randrianarisoa and Minten, 2001). Penguasaan lahan di Indonesia jauh lebih timpang

dibandingkan tingkat konsumsi. Indeks Gini untuk konsumsi pada tahun 2013 adalah sebesar 0,3, yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks Gini penguasaan lahan yang sebesar 0,63 (Gambar 26). Janvry dan Sadoulet (1993) berpendapat bahwa dalam kasus negara berkembang ketimpangan dalam penguasaan lahan akan menguntungkan pemilik lahan dari dampak peningkatan pertumbuhan sektor pertanian. Argumen tersebut diperkuat dengan temuan Adams Jr. (2002) dengan kasus ketimpangan lahan di wilayah perdesaan Mesir.

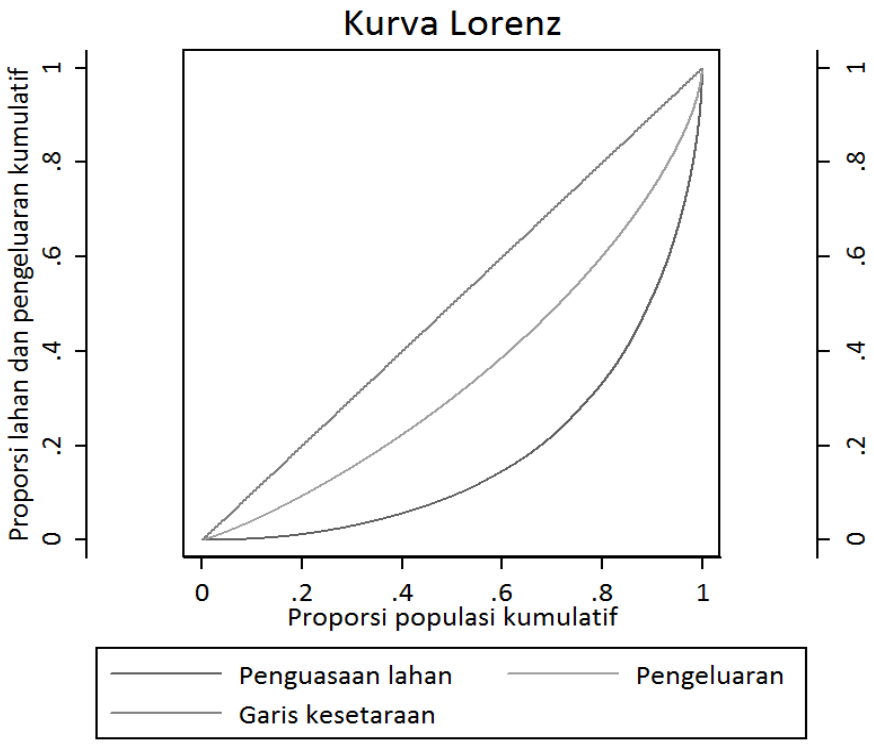


**Gambar 26. Distribusi Penguasaan Lahan di antara Rumah Tangga Sektor Pertanian**

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013 dan Susenas 2013.

### 4.2.2 Kebutuhan akan Manajemen Air yang Lebih Baik

Dalam hal sumber daya air, manajemen penggunaan sumber daya air untuk aktivitas produksi perlu untuk segera diperbaiki karena tingginya kerusakan jaringan irigasi. Kerusakan jaringan irigasi meningkat cukup drastis hanya dalam tiga tahun, dari yang awalnya hanya terjadi di 250 desa pada 2011, menjadi 1.378 desa pada 2014. Di antara desa-desa yang mengalami kerusakan jaringan irigasi, 80% di antaranya terjadi di desa-desa berkontur dataran rendah. Kerusakan jaringan irigasi menjadi indikasi manajemen penggunaan air untuk pertanian yang buruk (Tabel 8). Namun hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa di banyak tempat di Indonesia kerusakan irigasi juga terkait dengan kegiatan alih fungsi lahan. Tingginya kerusakan jaringan irigasi di desa-desa dataran rendah sejalan dengan perkembangan pembangunan dan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian yang memang lebih banyak terjadi di wilayah dataran rendah. Hal ini menjadi fenomena yang sulit dihindarkan seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan kependudukan, terutama di daerah-daerah di Pulau Jawa dan daerah di sekitar kota-kota besar, yang memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan lahan permukiman dan kawasan industri sangat tinggi (LANDac, 2015). Sementara itu, berbagai peraturan perundangan yang ada–UU No. 11/1974 tentang pengairan, PP No. 121/2015, dan UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, secara tegas mengharuskan semua komponen masyarakat untuk menjaga dan mengatur sumber daya air dan penggunaan lahan untuk menjaga kelestarian fungsinya.

**Tabel 8. Persentase dan Jumlah Desa dengan Jaringan Irigasi yang Mengalami Kerusakan berdasarkan Kondisi Topografi, 2011 dan 2014**

| Topografi | Sungai | Saluran Irigasi | Danau/Waduk/sSitu/ Bendungan |
|---|---|---|---|
| 2011: | | | |
| Dataran rendah | 74.07% | 81.20% | 71.08% |
| Dataran tinggi | 25.93% | 18.80% | 28.92% |
| Jumlah desa yang sungai, irigasi, dan waduknya tidak/belum dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian | 27,123 | 250 | 2,068 |
| 2014: | | | |
| Dataran rendah | 78.36% | 84.23% | 76.56% |
| Dataran tinggi | 21.64% | 15.77% | 23.44% |
| Jumlah desa yang sungai, irigasi, dan waduknya tidak/belum dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian | 30,082 | 1,756 | 2,717 |

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan 2014.

# V. INFRASTRUKTUR FISIK DAN PENDUKUNG PEREKONOMIAN PERDESAAN

Infrastruktur memiliki peran sangat krusial dalam pembangunan perdesaan. Ia bisa mendukung aktivitas perekonomian desa, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Selain itu, infrastruktur menjamin akses terhadap layanan dasar sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur perdesaan selalu menjadi hal yang menantang untuk dilakukan, mengingat Indonesia memiliki cakupan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan. Di samping itu, setiap wilayah memiliki kondisi dan potensi alam yang beragam dan unik. Kondisi wilayah seperti itu menuntut pembangunan infrastruktur yang bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Teorinya adalah bahwa pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengurangi kemiskinan. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa ketimpangan, baik ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan di dalam wilayah, dengan sendirinya berkurang. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur malah berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan (Bajar dan Rajeev, 2015). Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengurangan ketimpangan tergantung pada jenis infrastruktur dan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah (Bajar dan Rajeev, 2015; United Nations, 2016). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang inklusif mutlak diperlukan.

Dalam hal pembangunan infrastruktur dasar, ketimpangan antara perdesaan-perkotaan atau di antara wilayah perdesaan itu sendiri masih sangat nyata terjadi. Pada saat hampir seluruh wilayah perkotaan memiliki jalan terluas berupa aspal, juga memiliki jaringan telekomunikasi yang baik, sampai pada tahun 2011 masih ada setengah wilayah perdesaan yang permukaan jalan terluasnya

tidak beraspal dan tidak memiliki sinyal telepon yang memadai. Desa dengan kualitas sinyal baik umumnya berada di kelompok perdesaan dengan rata-rata pengeluaran 20% tertinggi secara nasional. Oleh karena itu, wilayah perdesaan dengan jaringan telekomunikasi baik, cenderung memiliki jumlah orang miskin lebih sedikit. Di sisi lain, akses listrik masyarakat perdesaan sudah hampir menyamai perkotaan, sekalipun dalam aspek disparitas antarwilayah dan antarkelompok kesejahteraan belum tampak ada perbaikan berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastuktur fisik yang membuka peluang ekonomi masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat di dalam kelompok kesejahteraan teratas. Keberadaan infrastruktur pendukung perekonomian seperti pasar dan kompleks pertokoan masih bias pada wilayah maju—kelompok desa terkaya. Keberadaan lembaga keuangan perbankan (bank komersial dan bank perkreditan rakyat/BPR) masih terbatas, namun keberadaan koperasi di wilayah perdesaan sudah lebih baik—walau pun juga masih bias wilayah maju.

## 5.1 Jalan, Komunikasi, dan Listrik yang Membuka Kesempatan sekaligus Membawa Risiko Ketimpangan

Arti penting kehadiran infrastruktur jalan dan komunikasi di perdesaan adalah untuk membuka akses terhadap kesempatan perekonomian yang lebih luas. Data yang dihasilkan dari Podes dan Peta Kemiskinan berikut menunjukkan bahwa desa-desa dengan kondisi jalan yang lebih baik pada tahun 2011 memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik pada tahun 2015 (Gambar 27). Sejalan dengan studi-studi sebelumnya, keberadaan infrastruktur jalan yang baik berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat di Nepal (Charlery, Qaim, dan Smith-Hall, 2016). Proyek pembangunan jalan desa juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Bangladesh (Khandker, Bakht, dan Koolwal, 2006) dan Kamboja (Runsinarith, 2008). Dampak dari adanya jalan desa terhadap pengurangan kemiskinan terjadi melalui kenaikan tingkat produksi pertanian dan upah, terjadinya penurunan biaya input dan transportasi, serta harga produk yang lebih bersaing. Selanjutnya pada Gambar 27 juga jelas terlihat bahwa desa-desa di wilayah perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih baik dengan rata-rata 95% memiliki jalan beraspal dan sinyal yang baik. Pada saat yang sama secara rata-rata baru sekitar 60% desa di wilayah perdesaan yang memiliki aspal dan sinyal yang bagus.

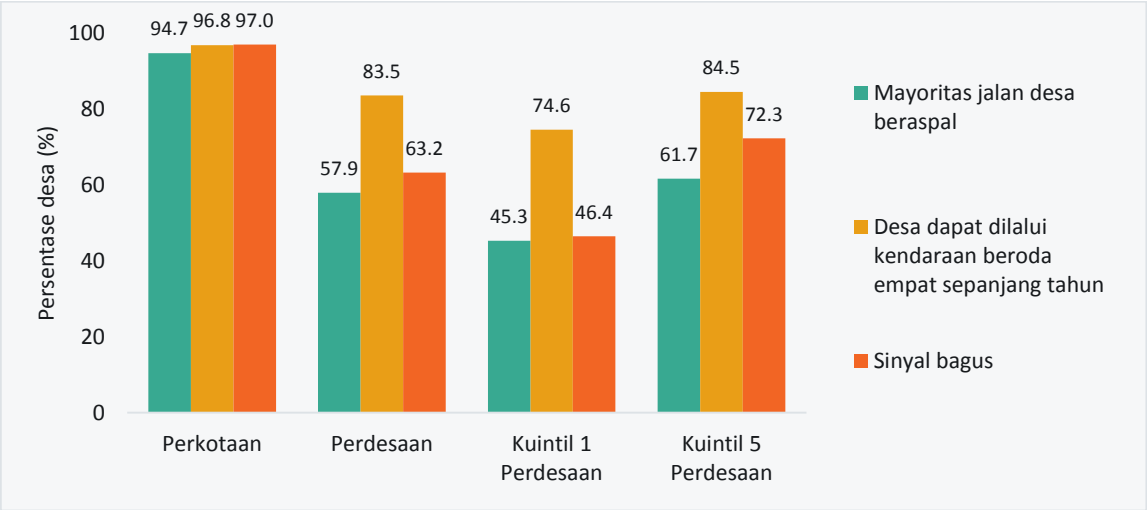


**Gambar 27. Persentase Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dengan Kondisi Baik pada 2011 dan Kelompok Kesejahteraannya pada 2015**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

Pola yang sama ditunjukkan oleh korelasi antara kualitas sinyal komunikasi pada tahun 2011 dengan kondisi kesejahteraan desa pada tahun 2015 pada grafik berikut. Desa-desa dengan kualitas sinyal yang baik umumnya berada di kelompok kesejahteraan teratas. Gambar 28 juga menunjukkan korelasi negatif antara keberadaan sinyal yang baik dengan tingkat kemiskinan. Artinya, desa-desa dengan sinyal yang lebih baik memiliki kemungkinan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

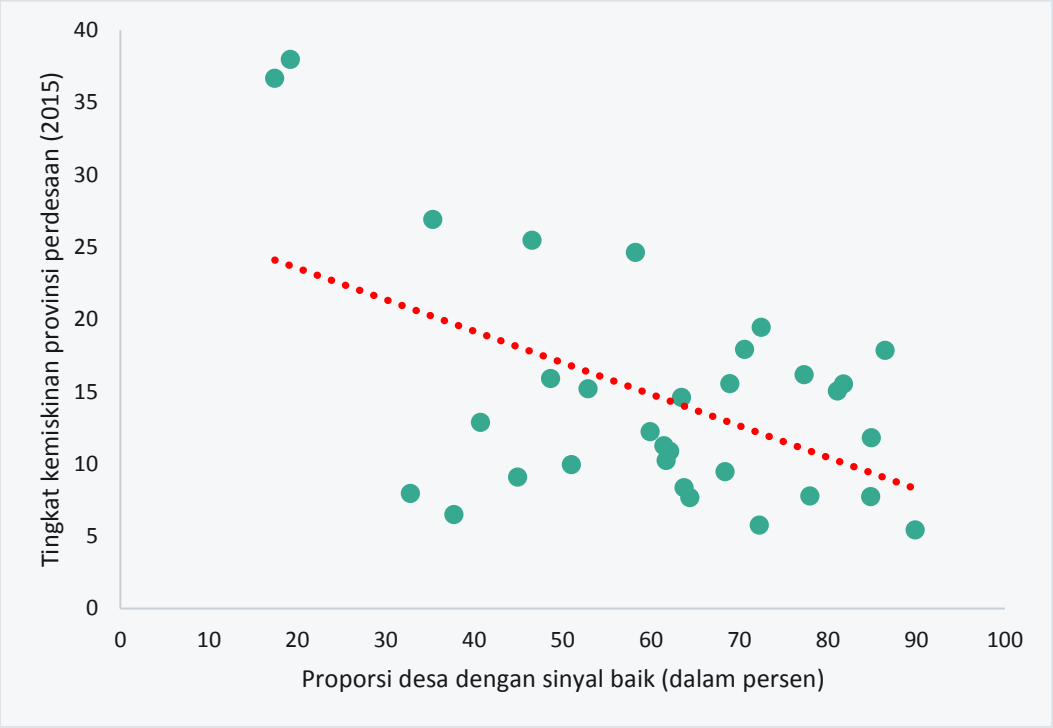


**Gambar 28. Hubungan antara Proporsi Desa dengan Kualitas Sinyal Komunikasi yang Baik pada 2011 dengan Tingkat Kesejahteraannya pada 2015**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Susenas 2015.

Ketika melihat kondisi ketimpangan pada tahun 2014, desa dengan jalan beraspal berkualitas baik justru memiliki ketimpangan pendapatan yang relatif lebih tinggi. Hal yang sama juga berlaku untuk desa yang dapat dilalui roda empat sepanjang tahun (Gambar 29). Ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas jalan justru membawa risiko terjadinya ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Hal yang sama juga terjadi untuk kualitas sinyal yang merupakan indikator akses terhadap komunikasi. Desa-desa dengan kualitas sinyal yang lebih baik pada 2011 memiliki tingkat ketimpangan yang juga relatif lebih tinggi pada tahun 2015. Salah satu permasalahan infrastruktur di Indonesia adalah adanya alokasi sumber daya yang tidak merefleksikan kebutuhan (ADB, 2016). Hal ini memiliki konsekuensi pada kencenderungan peningkatan ketimpangan dalam hal akses terhadap infrastruktur.

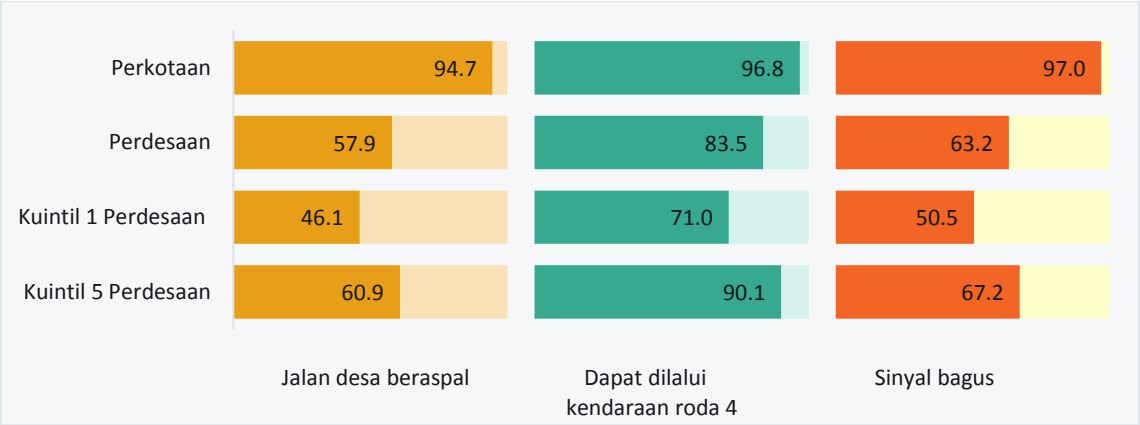


**Gambar 29. Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dan Komunikasi yang Kondisinya Baik (dalam persen) Berdasarkan Kuintil Indeks Gini, 2014**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

Data yang lebih baik diperoleh untuk akses terhadap infrastruktur listrik yang bisa dilihat hingga tingkat rumah tangga. Secara umum, akses rumah tangga di perdesaan terhadap listrik terus mengalami peningkatan dan semakin mendekati kondisi yang dimiliki oleh rumah tangga di perkotaan, namun demikian capaiannya masih berada di bawah rumah tangga perkotaan. Di dalam perdesaan sendiri, akses listrik yang lebih baik dirasakan oleh rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan sebaliknya (Gambar 30).

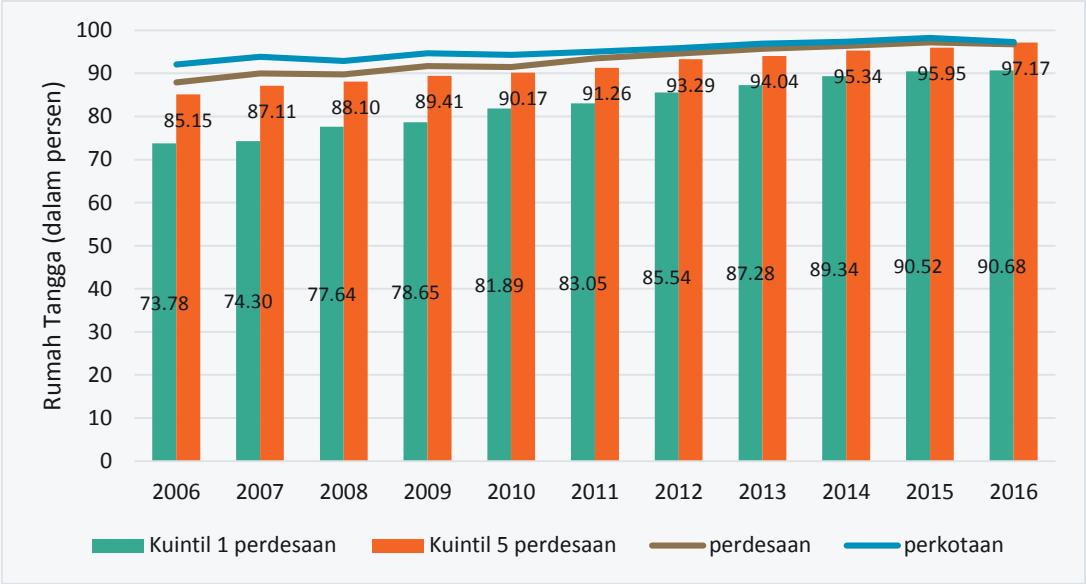


**Gambar 30. Akses Listrik Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan di Desa, 2006-2016**

Sumber: Diolah dari Susenas 2006-2016.

Selain itu, sebaran desa tanpa aliran listrik antar wilayah di Indonesia juga memperlihatkan akses listrik yang timpang antara desa-desa di daerah Pulau Jawa dan desa-desa di luar Pulau Jawa. Desa-desa di Pulau Jawa relatif tidak memiliki masalah dalam akses terhadap aliran listrik dari perusahaan listrik negara, lain halnya dengan desa-desa di luar Pulau Jawa. Di antara semua wilayah, Papua dan Papua Barat adalah yang terburuk dengan sekitar 70 desa di wilayahnya yang tidak terjangkau aliran

listrik dari perusahaan listrik negara dan 24% desa yang sama sekali tidak terjangkau aliran listrik (Gambar 31).

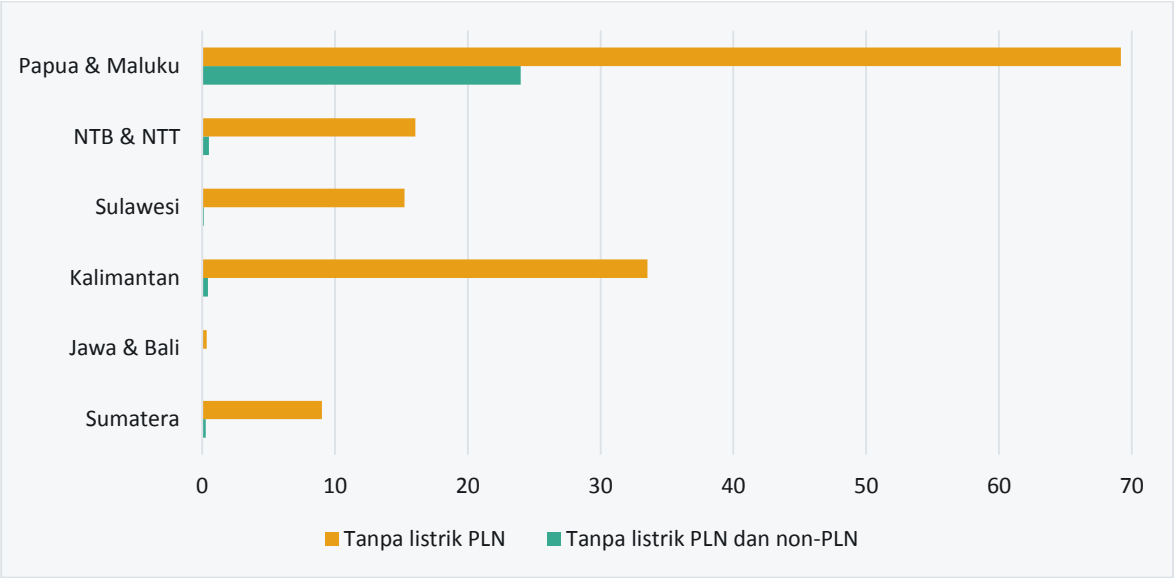


**Gambar 31. Persentase Desa Tanpa Aliran Listrik, 2014**

Sumber: Diolah dari Podes 2014.

Hasil perhitungan yang disampaikan di atas sekali lagi memberi gambaran bahwa infrastruktur memang membawa kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat perdesaan, namun keberadaan infrastruktur belum tentu berdampak pada pengurangan ketimpangan. Banyak penelitian yang membuktikan dampak positif infrastruktur terhadap pertumbuhan. Bahkan sebagian ahli juga percaya bahwa pembangunan infrastruktur akan membawa pengaruh signifikan terhadap negara atau daerah-daerah berpendapatan rendah sehingga memungkinkan mereka untuk menyusul daerah yang lebih maju (Raychaudhuri dan De, 2010). Studi yang dilakukan oleh Calderon dan Serven (2004) memperlihatkan kontribusi signifikan dari infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Amerika Latin (Calderon dan Serven, 2004). Namun, terdapat beberapa prasyarat agar pembangunan infrastruktur bisa benar-benar dirasakan secara merata oleh semua orang, sehingga fungsinya tidak hanya sebatas mendorong pertumbuhan, namun juga bisa berkontribusi dalam pengurangan ketimpangan. Pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar akses yang lebih terbuka terhadap pasar dan daerah lain bisa dirasakan manfaatnya secara merata. Kualitas sumber daya manusia yang rendah di kalangan kelompok miskin--diwakili, antara lain, oleh capaian pendidikan dan keterampilan kerja--tentu akan mengurangi kesempatan mereka untuk turut menikmati pertumbuhan (Datt dan Ravallion, 2002). Hal lainnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk dapat mengakses infrastruktur. Misalnya ditemukan bahwa akses terhadap listrik lebih banyak dinikmati oleh kelompok terkaya di desa (Cook, 2011).

## 5.2 Diskrepansi Infrastruktur Pendukung Perekonomian Perdesaan

Terkait infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian perdesaan, beberapa aspek menjadi perhatian utama, yakni ketersediaan lembaga keuangan di desa serta keberadaan pertokoan dan pasar. Meskipun keberadaan lembaga keuangan belum tentu menjamin akses layanan keuangan

untuk semua masyarakat, ketersediaan lembaga keuangan menjadi modal dasar untuk masyarakat memiliki pilihan-pilihan dalam pembiayaan modal usahanya, misalnya kredit keuangan mikro.

Akses terhadap layanan keuangan yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan sehingga akan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Salah satu cara untuk memperbaiki akses tersebut adalah dengan menyediakan lembaga keuangan di perdesaan. Dampak akses terhadap layanan keuangan pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih terlihat pada intervensi layanan kredit mikro. Studi dari Heriyaldi dan Yusuf (2013) yang menggunakan data longitudinal membuktikan bahwa kehadiran lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat desa. Hal ini menguatkan argumen bahwa kehadiran lembaga keuangan di wilayah perdesaan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun demikian, keberadaan lembaga keuangan di perdesaan saat ini masih belum diikuti oleh pemahaman mengenai layanan keuangan (*financial literacy*) yang baik, terutama pada masyarakat miskin (Djankov *et al.*, 2008). Hilangnya titik temu antara keberadaan dan pengetahuan mengenai cara mengakses lembaga keuangan adalah kesenjangan yang dapat menjadi sumber permasalahan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Akses terhadap lembaga keuangan yang tidak merata ditunjukkan oleh sebaran keberadaan lembaga keuangan yang bervariasi di antara desa-desa dengan tingkat kesejahteraan berbeda. Di antara bank komersial, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan koperasi, penetrasi bank komersial baik di desa-desa dalam wilayah perdesaan ataupun perkotaan adalah yang paling rendah, sementara koperasi adalah yang paling tinggi; begitupun prevalensi koperasi untuk berada di desa-desa termiskin merupakan yang tertinggi di antara dua jenis lembaga keuangan lainnya. Proporsi desa termiskin yang memiliki koperasi adalah 21.3%, sedangkan yang memiliki bank komersial dan BPR sama-sama sebesar 0.8% (Gambar 32). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di desa-desa termiskin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan. Pun demikian, di antara berbagai jenis lembaga keuangan yang tersedia di desa, koperasi memiliki jangkauan yang lebih baik walaupun masih bias desa maju.

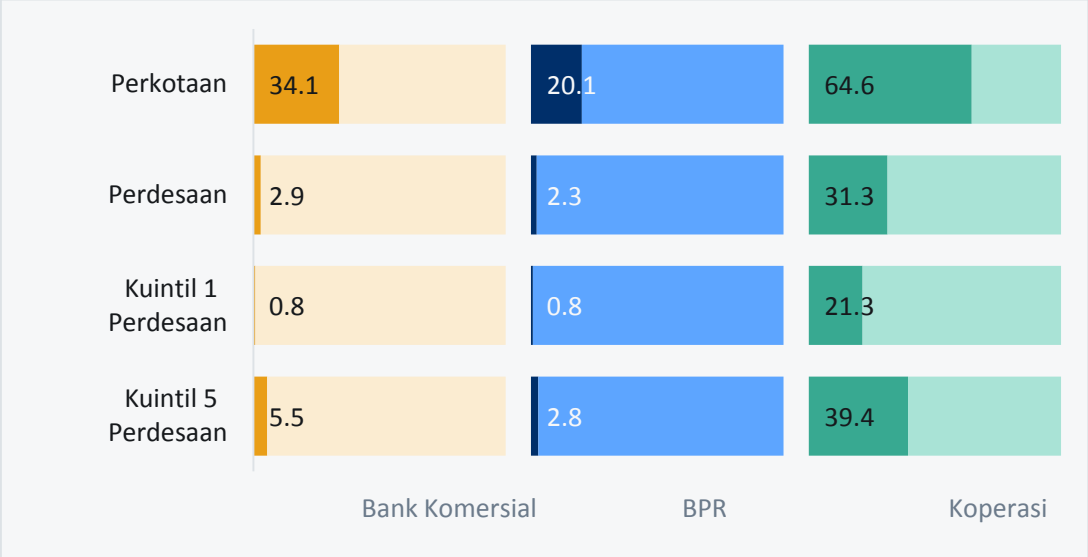


**Gambar 32. Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Finansial 2011 Berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen)**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

Diskrepansi yang besar juga ditemui dalam hal akses terhadap pasar dan pertokoan. Gambar 33 menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh desa di daerah perkotaan Indonesia memiliki kompleks pertokoan dan sepertiganya memiliki pasar dengan bangunan permanen. Sementara itu, di perdesaan kompleks pertokoan dan pasar masing-masing hanya tersedia di kurang dari 7% dan sekitar 15% wilayah perdesaan. Jika dibandingkan antarkelompok kesejahteraan, tidak lebih dari 3% desa di wilayah perdesaan termiskin memiliki akses terhadap kompleks pertokoan, dibandingkan dengan desa-desa di wilayah perdesaan terkaya yang 12%-nya memiliki kompleks pertokoan. Sebaran pasar di wilayah perdesaan masih lebih merata dibandingkan sebaran pertokoan. Sebesar 13% desa-desa di kelompok 20% desa termiskin memiliki akses terhadap pasar dengan bangunan permanen. Sementara itu, di antara kelompok 20% desa terkaya, lebih dari 20%-nya sudah memiliki pasar dengan bangunan permanen.

Dalam kajian ekonomi geografi, terutama yang berkaitan dengan penghidupan di perkotaan maupun perdesaan, pasar (ataupun pertokoan) merupakan salah satu komponen penting mengingat keberadaannya dapat menjadi kekuatan utama di balik penciptaan ekonomi dan penghidupan. Pasar bertindak sebagai ”tempat sentral” dan memiliki fungsi distribusi untuk menyediakan barang dan jasa bagi populasi di sekitarnya (FAO, 1995). Secara umum di wilayah perdesaan, pasar dapat pula berperan sebagai mekanisme utama untuk perakitan produk lokal yang hasilnya didistribusikan kembali sebagai sumber produksi di perkotaan.

Diskrepansi dalam hal akses terhadap pasar yang terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antara perdesaaan terkaya dan termiskin erat kaitannya dengan diskrepansi yang terjadi pada aspek infrastruktur fisik secara umum. Miyazaki dan Shimamura (2014) mengidentifikasi bagaimana pasar, dalam hal ini pasar pangan, berperan sebagai penghubung dalam proses pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan di tujuh provinsi Indonesia pada tahun 2007 dan 2010. Perdesaan miskin cenderung rendah perkembangan pasarnya. Di sisi lain, perdesaan miskin juga terbebani oleh buruknya kondisi infrastruktur seperti jalan yang dapat mencegah integrasi pasar di sekitarnya. Dengan kondisi integrasi pasar yang relatif rendah, pilihan infrastruktur seperti irigasi berperan lebih penting dibandingkan jalan beraspal dalam menjaga pasokan pangan masyarakat lokal, terutama ketika terjadi guncangan kenaikan harga pangan.

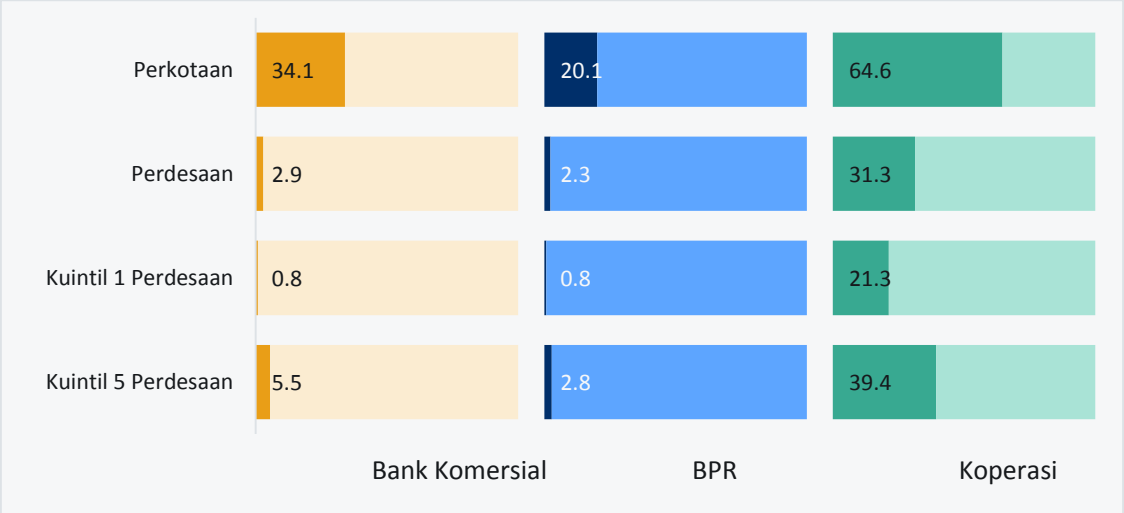


**Gambar 33. Keberadaan Komplek Pertokoan dan Pasar 2011 berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen)**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

# VI. MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA: PARTISIPASI, TOLERANSI, POLA RELASI

Pertemanan, jaringan sosial, keikutsertaan dalam suatu kelompok masyarakat, ataupun bentuk relasi sosial lain yang terjalin berlandaskan rasa saling percaya merupakan suatu modal sosial yang dapat menentukan kemajuan suatu masyarakat (Woolcock, 1998 dalam Easterly, Ritzen, dan Woolcock, 2006; Green, Preston, dan Sabates, 2003). Hal ini mengingat bahwa norma, kepercayaan, dan jaringan merupakan faktor-faktor produktif yang menjadikan proses koordinasi, komunikasi, dan transaksi antarindividu lebih efisien (Muntaner, 2004); dengan pula halnya dengan permasalahan asimetri informasi dan ketidakpastian yang bisa dihindari. Secara spesifik, kepercayaan antarindividu ini dapat mengurangi biaya transaksi dan hukum (transaction cost dan legal cost) dalam investasi ataupun transaksi jual beli (Dearmon dan Gier, 2009) dan meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusia (Bjornskov dan Meon, 2015) sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Cui, 2007).

Adanya variasi temuan terkait hubungan modal sosial dan pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang mengindikasikan bahwa dampak modal sosial tergantung pada wilayah juga tingkat dan distribusi pendapatan (Knack dan Keefer, 1997; Putnam, 2000). Pada masyarakat dengan distribusi pendapatan yang lebih timpang, Razmi dan Graffary (2015) menunjukkan bahwa tingkat modal sosial ditemukan lebih rendah. Namun perbedaan tingkat pendapatan, karakteristik masyarakat, juga keragaman sosial-budaya bisa mengecilkan kekuatan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan modal sosial tersebut (Loakimidis dan Heijke, 2016).

Bagian ini akan membahas kondisi modal sosial masyarakat perdesaan dan keterkaitannya dengan ketimpangan ekonomi. Merujuk pada beberapa studi lain (Easterly, Ritzen, dan Woolcock, 2006; Ahlerup, Olsson, dan Yanagizawa, 2009), indikator-indikator yang biasa digunakan untuk mengukur modal sosial adalah partisipasi masyarakat dalam organisasi, tingkat kepercayaan antar individu, keragaman etnis dan agama, masalah sosial, dan dukungan informal. Keterlibatan masyarakat perdesaan di dalam kegiatan kemasyarakatan lebih tinggi daripada di perkotaan, namun disparitas gender masih nyata terlihat di wilayah perdesaan. Ini berbeda dengan partisipasi dalam pemilihan umum yang hampir tidak menunjukkan adanya variasi antar gender. Bahkan terjadi lonjakan cukup tinggi untuk partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dari tahun 2007 ke 2014 di kalangan kelompok termiskin, baik di perkotaan ataupun di perdesan. Sekalipun aksi kolektif di perdesaan cukup tinggi, dukungan sosial antar masyarakat di perdesaan ternyata tidak lebih tinggi daripada di perkotaan. Di sisi lain, tingkat primordialisme masyarakat secara umum sangat tinggi, sehingga kesamaan agama dan etnis masih menjadi keriteria utama dalam memilih pemimpin/perwakilan, juga dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Mengonfirmasi temuan Dincer and Hotard (2011), keberagaman agama di dalam suatu wilayah berhubungan tidak linear dengan ketimpangan ekonomi. Semakin beragam agama yang dianut masyarakat di suatu wilayah, semakin timpang pula pendapatannya; hingga di satu titik tertentu, keberagaman agama tersebut justru berasosiasi dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah. Di akhir, prevalensi terjadinya konflik antar masyarakat di perdesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan, terlebih di luar Pulau Jawa. Selain itu, tampak adanya asosiasi positif antara ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, sebagaimana studi sebelumnya mengonfirmasi kemungkinan hubungan dua arah di antara keduanya.

## 6.1 Partisipasi Sosial yang Tinggi, namun Kepercayaan Sosial yang Rendah

Sudah dikemukakan bahwa partisipasi dalam kegiatan sosial merupakan bentuk jejaring sosial yang dapat menjadi sebuah modal sosial sehingga akses terhadap dukungan sosial atau sumber daya lain yang tersedia menjadi lebih terbuka. Gambar 34 berikut ini menunjukkan persentase orang di tiap kategori yang berpartisipasi dalam kegiatan atau organisasi kemasyarakatan, seperti arisan, kerja bakti, Karang Taruna, Siskamling, rapat desa, kegiatan PNPM, dll. pada tahun 2007 dan 2014.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan proporsi masyarakat yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari tahun 2007 ke tahun 2014, dengan proporsi laki-laki yang ikut terlibat dalam kegiatan/organisasi sosial lebih besar daripada perempuan. Sekitar 75% laki-laki ikut berperan dalam kegiatan sosial pada tahun 2007 dan meningkat menjadi sekitar 82% pada tahun 2014. Sementara itu, hanya sekitar 60% perempuan pada tahun 2007 yang turut serta dalam acara-acara sosial. Sekalipun meningkat pada tahun 2014 menjadi sekitar 71%, keterlibatan wanita dalam aktivitas sosial masih jauh di bawah pria.

Norris dan Inglehart (2003) menjelaskan bahwa perempuan sedikit berasosiasi dengan masyarakat karena mereka tidak bisa, tidak ingin, atau tidak pernah diminta untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa jenis kelompok atau organisasi kemasyarakatan memang tersegregasi berdasarkan jenis kelamin, seperti posyandu yang umumnya dikelola oleh perempuan, kerja bakti yang cenderung melibatkan laki-laki, atau poskamling (pos keamanan lingkungan) yang hanya dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, pemahaman konvensional mengenai pembagian peranan tradisional antara laki-laki dan perempuan bisa juga ikut berkontribusi atas rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan dibandingkan laki-laki (Healy, Haynes, dan Hampshire, 2007).

Dibandingkan dengan di perkotaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan masyarakat di perdesaan secara umum lebih tinggi. Hal ini karena kedekatan antar individu dalam masyarakat perdesaan dan rasa memiliki yang lebih besar daripada di perkotaan. Selain itu, hal ini juga terkait dengan perbedaan struktur ekonomi di perdesaan yang lebih komunal daripada di wilayah perkotaan (Bosworth, 2014). Dengan asumsi bahwa masyarakat urban sudah lebih berkembang secara ekonomi dan terbuka terhadap nilai-nilai modern, dikotomi tradisional atas peranan perempuan dan laki-laki pun mulai memudar (Spain, 2014; Lilius, 2016), sehingga dapat diamati mengecilnya disparitas keterlibatan sosial antara laki-laki dan perempuan di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaan, terlebih pada tahun 2014. ada 2007 proporsi laki-laki yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan di wilayah perkotaan hampir 25% lebih banyak daripada proporsi perempuan. Sementara itu, pada 2014 ketika proporsi laki-laki meningkat 8% poin proporsi perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial meningkat 14% poin. Dengan demikian, di antara keduanya hanya terpaut 7% saja pada 2014. Hal ini kontras dengan di wilayah perdesaan yang disparitas di antara keduanya justru melebar dalam kurun waktu tujuh tahun, dari 14% pada 2007 menjadi 26% pada 2014.

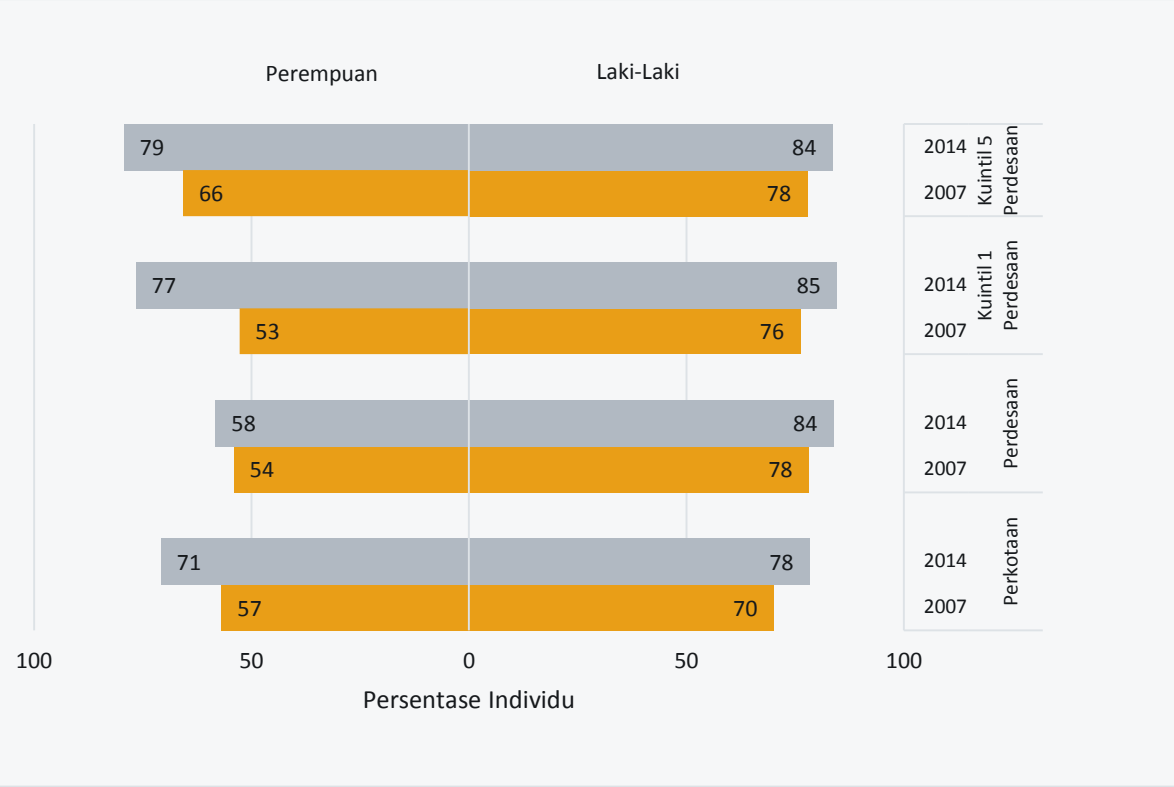


**Gambar 34. Partisipasi di Setidaknya Satu Jenis Kegiatan Kemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014**

Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori.

Terkait dengan tingkat kesejahteraan secara relatif, menarik diamati bahwa terdapat perbedaan pola keterlibatan sosial antara laki-laki dan perempuan. Di antara laki-laki tidak tampak perbedaan keterlibatan sosial yang berati antara yang berada di kelompok terkaya dan kelompok termiskin . Pada tahun 2007, sebesar 76% laki-laki di kuintil 1 mengaku berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di perdesaan; sedangkan di kuintil 5 terdapat 78% laki-laki. Begitupun pada tahun 2014 hanya terdapat perbedaan tipis saja, yaitu sebesar 85% di kuintil 1 dan 84% di kuintil 5. Hal berbeda ditemukan di antara sampel perempuan di perdesaan, terutama pada tahun 2007. Pada tahun ini, perempuan di kelompok teratas 13% poin lebih besar daripada perempuan di kelompok terbawah dalam mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Namun, perbedaan di antara keduanya jauh mengecil pada tahun 2014 menjadi 2% saja (Gambar 34).

Keterlibatan dalam aktivitas publik berkaitan dengan kondisi kesejahteraan karena untuk membangun dan menjaga relasi sosial tersebut terdapat biaya-biaya sosial yang harus dipenuhi (Cleaver, 2005; Story and Carpiano, 2017). Fakta bahwa hubungan di antara kedua hal tersebut lebih nyata terlihat di antara perempuan daripada laki-laki menyiratkan bahwa biaya-biaya jejaring sosial yang harus dipenuhi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Ketimpangan akses terhadap kegiatan sosial antara perempuan miskin dan kaya menunjukkan ketidakmampuan perempuan miskin dalam mengatasi hal-hal terkait kendala biaya dan fisik (Kozel dan Parker, 2000; Story dan Carpiano, 2017). Lebih daripada itu, ketimpangan akses ini menggambarkan hambatan yang mereka hadapi untuk menjangkau bentuk-bentuk modal penghidupan lain, yaitu modal keuangan, modal manusia, modal alam, dan modal fisik. Modal sosial menjadi sumber daya yang paling penting bagi orang miskin karena kepemilikan terhadap keempat modal lain sangat terbatas (Warren, Thompson, dan Saegert, 2001). Hal ini mengingat melalui

ruang-ruang publik tersebut, masyarakat miskin dan rentan seharusnya dapat memanfaatkan relasi dan koneksi untuk memperoleh informasi untuk memperbaiki strategi penghidupan mereka, membuka kesempatan untuk ikut menyuarakan perspektif mereka, juga sebagai substitusi modal lain untuk menghadapi guncangan dan kerentanan (Cleaver, 2005; Story and Carpiano, 2017). Suatu misal melalui perkumpulan arisan, masyarakat miskin dapat memperoleh sejumlah uang yang bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha baru atau melalui pertemuan-pertemuan desa masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan atau pelatihan-pelatihan gratis.

Selain partisipasi dalam aksi kolektif, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, baik untuk memilih presiden, kepala daerah, atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga cukup tinggi, yaitu sekitar 80% untuk laki-laki dan 60% untuk perempuan. Keikutsertaan dalam pemilu oleh laki-laki relatif stabil selama tujuh tahun periode 2007-2014. Sedangkan di antara perempuan, terjadi lonjakan cukup dramatis terutama di wilayah perkotaan (meningkat 14% poin) dan di perdesaan untuk perempuan kelompok miskin (meningkat 20% poin) (Gambar 35).

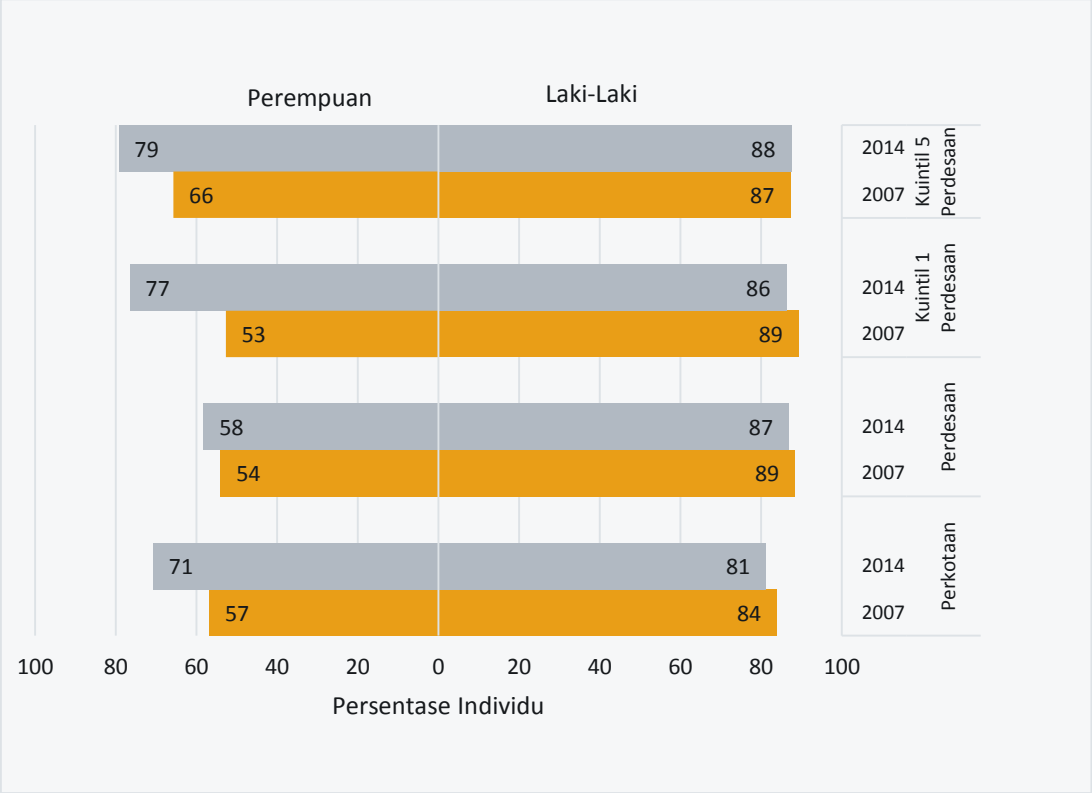


**Gambar 35. Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014**

Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori.

Bibler, Mohan, dan Ryan (2014) menjelaskan salah satu rintangan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah masih banyaknya perempuan yang tidak memiliki dokumen kependudukan resmi sebagai prasyarat untuk menjadi pemilih sah, seperti buku nikah, kartu keluarga, atau kartu tanda penduduk. Selain itu, kesibukan perempuan dalam menjalankan peran pengasuhan di area domestik menghalangi perempuan untuk mendapatkan waktu luang untuk pergi ke tempat pemungutan suara.

Lebih jauh lagi tentang preferensi dalam pemilihan umum, lebih dari 70% masyarakat memilih pemimpin/wakil rakyat berdasarkan kesamaan agama, dan sekitar 50% memilih berdasarkan kesamaan etnis. Dalam kurun waktu tujuh tahun, dari 2007 ke 2014, terjadi sedikit penurunan tren prevalensi masyarakat yang menjadikan agama sebagai kriteria utama pemilihan pemimpin/wakil rakyat, sebaliknya sedikit kenaikan tampak pada kriteria kesamaan etnis. Berdasarkan gender, tampak lebih banyak proporsi perempuan yang menunjukkan priomordialisme dalam menggunakan hak politiknya. Hal ini konsisten hampir di semua kategori lokasi atau tingkat kesejahteraan, kecuali di perdesaan dalam hal preferensi agama. Pada kategori ini, porsi perempuan 7% poin lebih rendah dari laki-laki pada tahun 2007 dan 10% poin lebih rendah pada tahun 2014. Dibandingkan di perkotaan, di perdesaan terdapat lebih banyak masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang mengakui cenderung memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama atau etnis, terlebih lagi di antara masyarakat perdesaan yang berada di kelompok paling miskin (Gambar 36).

Dengan cukup tingginya hasrat priomordialisme masyarakat seperti ini, tak mengherankan bahwa banyak kandidat pemimpin yang masih menggunakan agama dan etnis sebagai modal untuk menarik suara masyarakat. Aspinall, Dettman, dan Warburton (2011) menemukan fenomena ini pada studi kasus pemilihan walikota Medan, Sumatra Utara. Mereka menjelaskan bahwa pada putaran terakhir ketika dua kandidat walikota memiliki agama dan suku/ras berbeda, dalam hal ini Islam versus Buddha, tim sukses menggunakan dalih agama untuk memenangkan calon mereka. Strategi kampanye ini terbukti efektif dan kandidat muslim menang dengan margin yang cukup besar. Hal identik juga terjadi di Jakarta pada tahun 2012 ketika elemen agama digunakan sebagai alat untuk menolak kandidat nonmuslim dan beretnis Tionghoa (Putra, 2016), kemudian hal yang sama berulang kembali pada tahun 2017 (Kato, 2017; Sulistiyanto, 2018). Pepinski, Liddle, dan Mujani (2012) membuktikan bahwa beragama Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, benar dapat memberikan keuntungan secara politis, walaupun tetap dibatasi oleh pengetahuan pemilih terhadap kebijakan ekonomi yang diusung oleh kandidat.

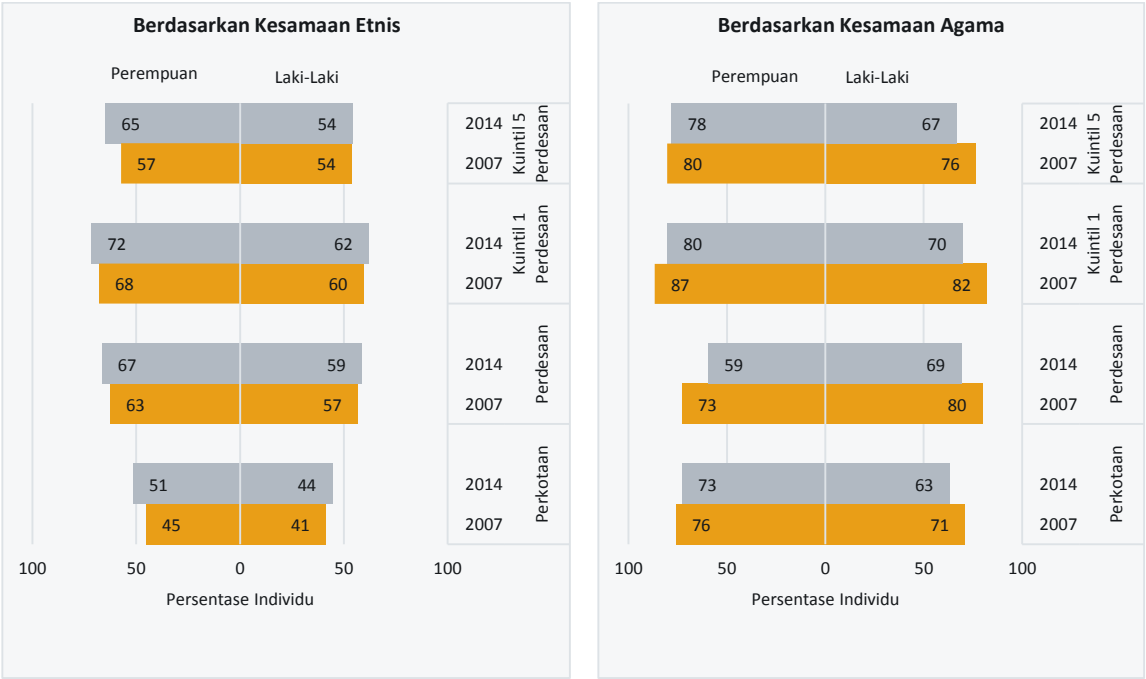


**Gambar 36. Preferensi dalam Memilih Pemimpin/wakil rakyat Rakyat Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014**

Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori.

Besarnya porsi masyarakat yang menjadikan kesamaan etnis, terutama agama, sebagai kriteria utama pemilihan pemimpin/wakil rakyat bisa jadi merupakan bentuk penolakan sosial terhadap kelompok agama/etnis tertentu yang dapat mengancam kohesi sosial. Putra *et al.* (2016) menekankan besarnya peranan identitas agama yang diikuti dengan prasangka negatif terhadap kelompok agama lain dalam menciptakan bahkan memperburuk konflik antar kelompok di Indonesia. Meskipun demikian, identitas suatu kelompok atau prasangka dan sterotip terhadap kelompok tertentu merupakan suatu hal yang dinamis; tergantung pada kepentingan politis dari kelompok-kelompok yang terlibat (Wagner, Holtz, dan Kashima, 2009).

Gambar 37 memberikan gambaran tentang prasangka yang ditujukan dan stereotip yang disematkan pada kelompok lain dalam wujud ketidakpercayaan dan penolakan terhadap kehadiran kelompok lain tersebut di dalam kehidupan suatu kelompok tertentu. Ditemukan bahwa secara umum hampir 95% masyarakat tidak percaya dengan orang yang terlahir dengan etnis berbeda atau memeluk agama yang berbeda, baik secara informal dalam bertetangga, atau dalam hal lebih formal seperti sewa menyewa. Ketidakpercayaan ini juga dimanifestasikan dengan upaya penolakan ketika tempat peribadatan umat agama lain dibangun di daerah sekitar rumahnya. Menarik untuk diamati bahwa tidak tampak ada perbedaan signifikan dalam prevalensi eksklusivisme antargender, antarlokasi, atau antartingkat kesejahteraan. Begitupun tidak tampak ada perubahan tren dan pola antarwaktu, dari 2007 ke 2014.

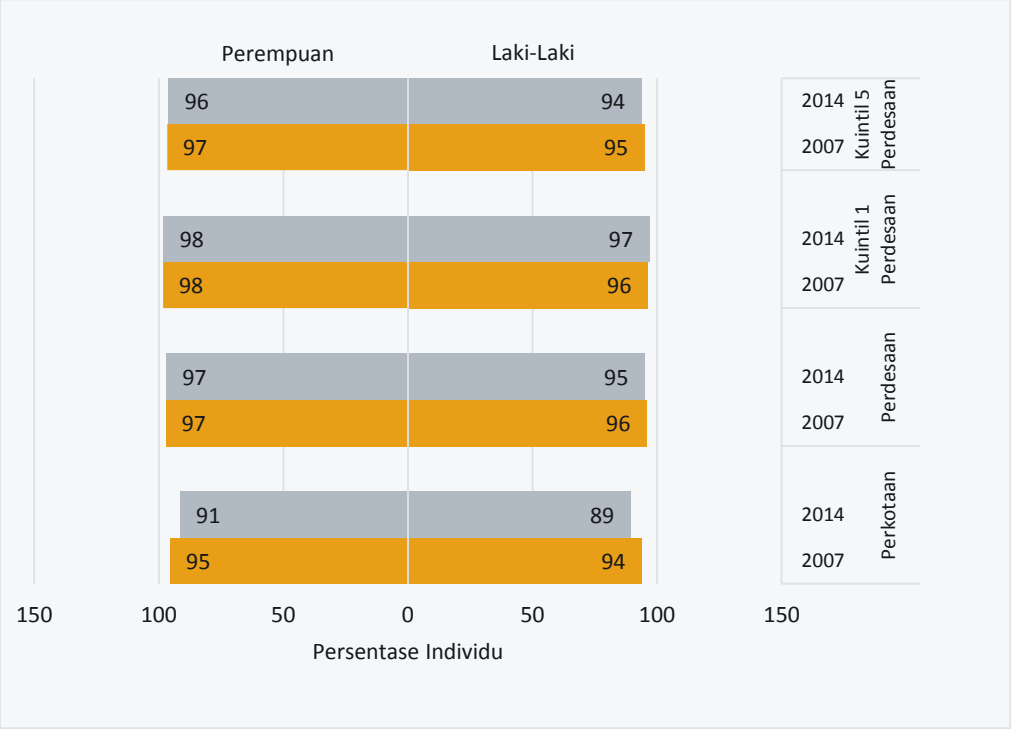


**Gambar 37. Sikap tidak Percaya kepada Orang dengan Agama/Etnis Berbeda Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014**

Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori. Variabel diturunkan dari beberapa indikator, di antaranya adalah: ketidakpercayaan terhadap umat agama/etnis lain atau keberatan bertetangga dengan umat agama/etnis lain atau keberatan menyewakan tanah/rumah terhadap umat agama/etnis lain atau keberatan dengan dibangunnya tempat peribadatan agama lain di lingkungan tempat tinggal.

Dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, kemungkinan untuk intoleran terhadap orang dengan agama/etnis berbeda memang tampak lebih besar di antara masyarakat desa yang berada

di 20% kelompok termiskin. Namun, perbedaannya dengan masyarakat di kelompok kesejahteraan teratas sangat tipis. Temuan ini tidak sesuai dengan beberapa studi lain yang mengonfirmasi keterkaitan antara toleransi terhadap kelompok lain dan tingkat kesejahteraan. Milligan (2012) melakukan analisis antarnegara dan antarindividu dalam suatu negara tentang hubungan antara toleransi terhadap etnis/agama lain dan tingkat kesejahteraan. Hasilnya adalah sikap toleransi ditemukan berasosiasi positif dengan tingkat kesejahteraan suatu negara, dan hubungan tersebut lebih kuat di antara orang-orang berpenghasilan lebih tinggi.

Eksklusivisme merupakan bibit dari sikap radikalisme dalam beragama (Palmer-Fernandez, 2004). Terkait dengan hal ini, terdapat variasi temuan studi mengenai asosiasi tingkat kesejahteraan dengan sikap radikalisme. Beberapa pihak meyakini bahwa kemiskinan meningkatkan risiko seseorang menjadi radikal (Mousseau, 2011). Di lain pihak, beberapa studi di negara-negara Islam menemukan bahwa hubungan tersebut tidak tampak (Chiozza, 2010 dalam Rink dan Sharma, 2016). Bahkan, tidak sedikit juga yang menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bahwa masyarakat kelas menengah lah yang lebih mendukung aksi terorisme berbasis agama (Blair *et al.*, 2013) atau bahwa masyarakat dalam kelompok paling miskin memiliki kemungkinan paling kecil untuk mendukung aksi terorisme ketimbang kelompok-kelompok yang lebih sejahtera (Fair dan Shepherd, 2006). Dengan kata lain, terdapat hal-hal lain yang lebih terkait dengan sikap primordialisme atau eksklusivisme di luar tingkat kesejahteraan.

## 6.2 Hubungan Tidak Linier antara Keberagaman Identitas Sosial dan Ketimpangan Ekonomi

Putnam (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu aspek kehidupan bermasyarakat, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan, yang memungkinkan anggota dari suatu masyarakat untuk melakukan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Seberapa efektif langkah masyarakat untuk mencapai tujuan bersama tersebut ditentukan oleh tingkat kohesi sosial atau sejauh mana masyarakat terintegrasi dan bersatu. Dalam hal ini, keberagaman di dalam masyarakat, baik secara kesukuan, agama, atau ras, bisa dipandang dari dua sudut yang berbeda. Menurut teori kontak, keberagaman mampu mengikis perbedaan di dalam/antar kelompok masyarakat dan mendorong semangat solidaritas antar grup atau yang disebut sebagai *bridging social capital*, sehingga mengurangi etnosentrisme. Di sisi lain, dalam teori konflik diyakini bahwa keberagaman akan mempertajam perbedaan antarkelompok oleh karenanya akan menguatkan solidaritas di dalam kelompok itu sendiri, atau *bonding social capital*, sehingga justru akan meningkatkan etnosentrisme (Putnam, 2007). Etnosentrisme inilah yang membahayakan kohesi sosial, yang dikhawatirkan akan mengancam tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, keberagaman sosial ini sering dikaitkan dengan capaian politik atau ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan publik, dan umumnya ditemukan bahwa keberagaman sosial bedampak negatif terhadap capaian-capaian tersebut (Alesina dan Ferrara, 2005; Easterly, 2006). Namun, bagaimana itu berdampak pada distribusi pendapatan masih menuai banyak perdebatan.

Dincer dan Hotard (2011) menjelaskan bahwa keragaman identitas sosial (etnis-agama) dan ketimpangan ekonomi tidak berasosiasi dalam hubungan yang linear. Sebaliknya mereka membuktikan adanya hubungan U-terbalik (kuadratik) antara *Ethnic Fractualization* (ERFe) dan *Religion Fractualization* (ERFe) dengan ketimpangan pendapatan di 58 negara di Afrika, Asia, dan Amerika latin. Artinya, semakin beragam etnis-agama dalam suatu wilayah, semakin timpang kesejahteraan masyarakatnya, namun pada titik tertentu keberagaman tersebut justru identik dengan ketimpangan yang lebih rendah. Lebih jauh lagi ditemukan bahwa ketimpangan pendapatan tersebut akan sampai pada titik maksimum ketika ERFe (ERFr) mencapai angka 0,44 (0,34). *Ethnic-Religion Fractualization* mengindikasikan keberagaman etnis-agama di suatu wilayah

yang diwujudkan dalam angka 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, semakin beragam jenis etnis-agama di wilayah tersebut.

Gambar 38 di bawah ini menggambarkan *quadratic fitted line* yang menunjukkan prediksi korelasi antara ERFe dengan indeks Gini berdasarkan sebaran data di tingkat kabupaten Indonesia di masing-masing tahun 2000 dan 2010. Hampir tidak diidentifikasi adanya pola kuadratik dalam hubungan antara keragaman etnis dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Indonesia di kedua tahun, sebagaimana ditemukan oleh Dincer dan Hotard (2011) . Sebaliknya, prediksi indeks Gini tampak tetap sekalipun nilai ERF semakin besar. Adanya kesamaan identitas yang cukup kuat untuk menyatukan berbagai etnis yang beragam tersebut dapat menjadi penjelas dari terpisahnya keragaman etnis dan ketimpangan moneter karena dengan demikian perbedaan belum tentu menghasilkan perselisihan yang berpengaruh buruk terhadap perekonomian (Dincer dan Hotard, 2011).

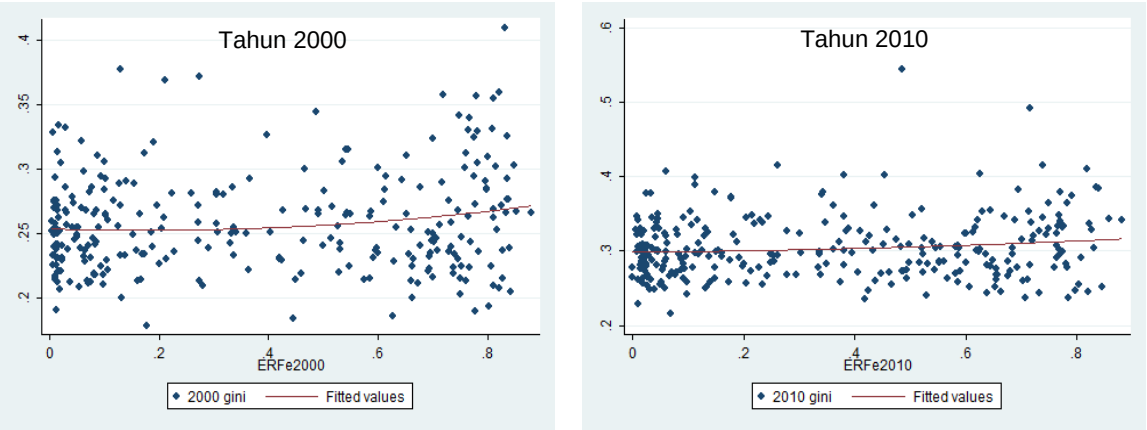


**Gambar 38. Fitted Line antara Ethnic Fractualization Index dan Indeks Gini**

Sumber: Diolah dari Sensus 2000 dan 2010.

Pola kuadratik U-terbalik, sekalipun tidak sempurna, didapati pada korelasi antara ERFr dan Gini sebagaimana tampak pada Gambar 39 di bawah ini. Semakin beragam agama yang dipeluk oleh masyarakat di suatu kabupaten, semakin timpang pula distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Hingga pada satu titik maksimum tertentu, keragaman tersebut justru diasosikan dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2000, titik balik tersebut adalah ketika ERFr indeks mencapai angka 0,384, dan ketika mencapai 0,354 pada tahun 2010. Artinya, kabupaten-kabupaten dengan ERFr lebih dari 0,384 (0,354) cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Hubungan U-terbalik antara keberagaman dan ketimpangan mengindikasikan bahwa keberagaman tidak selalu berdampak buruk pada capaian ekonomi, yang ditunjukkan salah satunya oleh ketimpangan pendapatan ini. Argumen yang sering mengemuka adalah bahwa dari keberagaman akan lahir inovasi yang berujung pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia (Ottaviano dan Prarolo, 2009), walaupun ini tidak secara langsung menjelaskan lebih rendahnya ketimpangan pendapatan pada daerah dengan keberagaman sangat tinggi. Jika ketimpangan pendapatan ini menjadi indikasi dari konflik antar kelas, maka penjelasan yang mungkin relevan adalah polarisasi kelompok, bahwa dampak buruk dari keberagaman akan lebih besar ketika hanya terdapat dua kelompok yang berbeda (Montalvo dan Reynal-Querol, 2014). Argumen ini berakar pada argumen Horowitz (1985) bahwa konflik sosial lebih jarang terjadi pada masyarakat yang sangat homogen atau sangat heterogen dimana aktivitas *rent-seeking* menjadi tidak menguntungkan, dan benturan antar kelas lebih bisa dihindari (Montalvo dan Reynal-Querol, 2005).

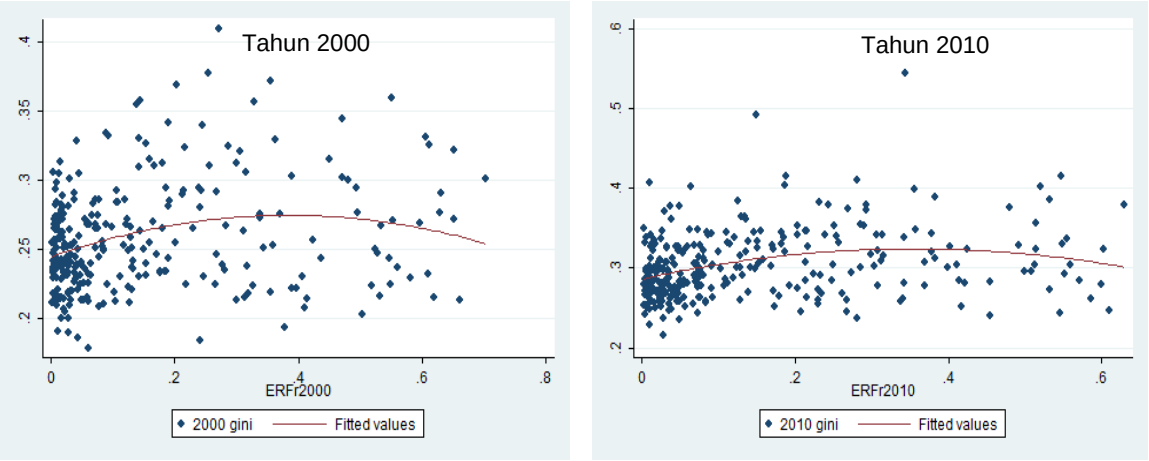


**Gambar 39. Fitted Line antara Religion Fractualization Index dan Indeks Gini**

Sumber: Diolah dari Sensus 2000 dan 2010.

## 6.3 Dukungan Sosial antara Masyarakat Perdesaan Tidak Lebih Tinggi daripada Masyarakat Perkotaan

Dukungan sosial merupakan bagian dari modal sosial karena melalui jaringan sosial ini masyarakat dapat saling membantu untuk mengatasi masalah sehari-hari (Kawachi, Subramanian, dan Kim 2008; dan Dominguez dan Watkins, 2003). Dengan anggapan bahwa hubungan kekerabatan dan interaksi sosial di perdesaan lebih kuat daripada di perkotaan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 34, maka begitupun dukungan sosial di desa diduga akan lebih kuat dibading di kota. Pun demikian, dugaan ini tidak dibuktikan pada Gambar 40 berikut. Hampir tidak ada perbedaan prevalensi seseorang mendapat bantuan informal dari anggota keluarga lain antara yang tinggal di perdesaan atau perkotaan, yaitu sama-sama dalam kisaran 14%. Bahkan masyarakat di perkotaan memiliki peluang 2,6% lebih besar untuk mendapatkan bantuan dari tetangga/teman dibandingkan masyarakat di perdesaan.

Beberapa studi berusaha mengidentifikasi dampak dari dukungan sosial di perkotaan dan menemukan adanya dampak signifikan dari dukungan sosial tersebut, seperti terhadap pengurangan kerawanan makanan (King, 2017) atau kesehatan mental (Chadwick and Collins, 2015). Meskipun demikian, Chadwick and Collins (2015) menggarisbawahi bahwa ukuran kota berbanding terbalik dengan ketersedian dukungan sosialnya. Dengan kata lain, semakin besar suatu kota semakin kecil dukungan sosial yang tersedia. Di sisi lain, Kim *et al.* (2004) mengungkapkan bahwa pada desa-desa di Korea dengan tingkat migrasi dari desa ke kota yang tinggi, penurunan dukungan sosial cukup besar untuk menyebabkan depresi di kalangan masyarakat daerah pengirim migran. Bentuk penurunan dukungan sosial yang digunakan adalah hidup sendiri, jarang bertemu (kurang dari sebulan sekali) dengan tetangga, teman, atau saudara, dan tidak memiliki teman atau tetangga dekat. Artinya, gelombang migrasi desa-kota bisa menjadi salah satu faktor yang mengendorkan ikatan sosial antara masyarakat desa sehingga ketersediaan dukungan sosialnya pun berkurang.

Perbedaan lain yang terlihat antara masyarakat perdesaan dan perkotaan adalah pada bentuk bantuan yang diberikan. Masyarakat perdesaan lebih cenderung mendapatkan bantuan dalam bentuk barang/makanan daripada uang atau pinjaman, baik di antara masyarakat kelompok terkaya maupun kelompok termiskin. Di perkotaan, sekalipun proporsi dukungan dalam bentuk makanan/barang tetap lebih tinggi daripada bentuk uang, tapi masih lebih kecil daripada di

perdesaan, yaitu 50,8% dibandingkan 54,9% untuk bantuan dari anggota keluarga dan 59,1% dibandingkan 66% untuk bantuan dari teman/tetangga. Dengan adanya kemudahan transaksi finansial berbasis teknologi yang kemungkinan lebih dinikmati oleh masyarakat urban, fakta tersebut bisa menjadi indikasi bahwa keakraban sosial masyarakat perkotaan tidak terjalin secara langsung seperti di desa di mana saling memberi dalam bentuk barang/makanan lebih mungkin terjadi.

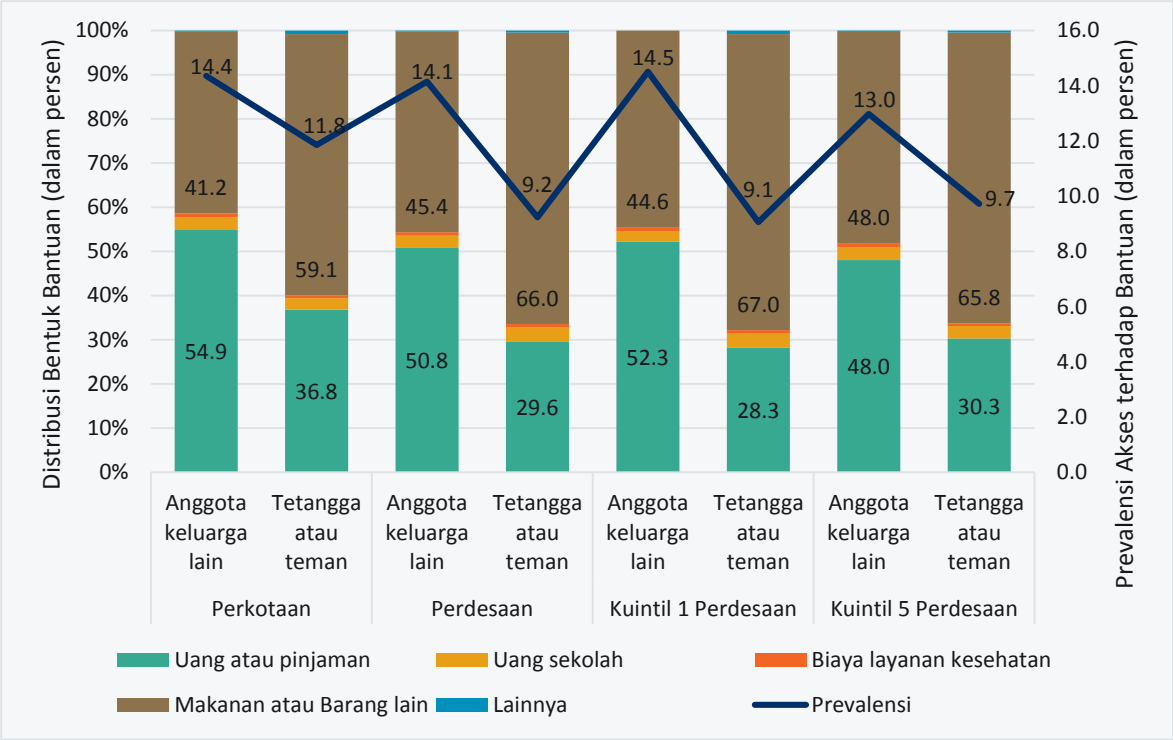


**Gambar 40. Distribusi dan Prevalen atas Dukungan Informal dari Masyarakat 2014**

Sumber: Diolah dari IFLS 2014.

Selain itu, jenis bantuan tampak jelas terkait dengan sumber bantuannya, yaitu bantuan uang/pinjaman lebih cenderung berasal dari keluarga/kerabat sedangkan barang dan makanan berasal dari tetangga/teman. Banyak temuan studi dari negara lain (seperti Interlenghi dan Salles-Costa, 2015; Garasky, Morton, dan Greder , 2006; Morton *et al.*, 2005) yang menunjukkan peranan dukungan sosial dalam bentuk instrumental (mengikuti pengelompokan dukungan sosial oleh Harpham, 2008) untuk mengurangi risiko kerawanan makanan (King, 2017). Dalam hal ini, tetangga mengetahui siapa di antara orang di sekitarnya yang lebih membutuhkan makanan kemudian tergerak untuk berbagi. Ketepatan target bantuan tersebut menjadikan dukungan masyarakat secara informal ini menjadi efektif untuk mengatasi kerawanan makanan. Mekanisme tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memonitor ketepatan sasaran dari bantuan formal pemerintah dalam hal pangan, seperti Raskin.

## 6.4 Hubungan Dua Arah antara Konflik Sosial dan Ketimpangan Ekonomi

Blattman dan Miguel (2010) menyimpulkan bahwa konflik kekerasan berpengaruh terhadap keluaran ekonomi melalui perusakan modal sumber daya manusia dan modal fisik, pergeseran

belanja pemerintah dan investasi swasta, serta gangguan pada kehidupan ekonomi dan relasi sosial. Beberapa studi antarnegara yang mencoba menghubungkan konflik dengan pertumbuhan ekonomi adalah Collier (1999) yang menemukan hubungan negatif antara durasi perang sipil dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Imai dan Weinstein (2000) memperkuat kesimpulan studi Collier dan menemukan satu faktor pendukung penting lainnya, yaitu luas atau tidaknya daerah konflik. Perang sipil yang berlangsung di seluruh area memberikan dampak yang jauh lebih besar bila dibandingkan perang sipil yang berlangsung di satu area saja. Abadie dan Gardeazabal (2003) menemukan dampak negatif dari konflik teroris ETA (Euskadi Ta Askatasuna) pada pertumbuhan ekonomi di Basque. Sementara itu, Lopez dan Wodon (2005) melihat dampak pembunuhan massal (genosida) di Rawanda terhadap PDB per kapita dan menemukan bahwa periode genosida diikuti oleh turunnya PDB per kapita, tetapi tidak untuk jangka waktu panjang.

Di Indonesia, intensitas konflik kekerasan terlihat semakin tinggi terjadi di beberapa provinsi setelah Orde Baru, walaupun setelah tahun 2002 terjadi penurunan tren. Tadjoeddin dan Murshed (2007) mengelompokkan konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia menjadi dua: episodik dan rutin. Konflik episodik adalah konflik etnis dan separatis yang secara tipikal berasosiasi dengan jumlah kejadian yang rendah namun dampak korban jiwanya besar, sedangkan konflik rutin memiliki karakteristik sebaliknya. Gambar 41 menunjukkan kondisi terkini dari konflik sosial yang terjadi di provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi yang mengalami insidens tinggi selama tahun 2011 dan 2014 adalah Kep. Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

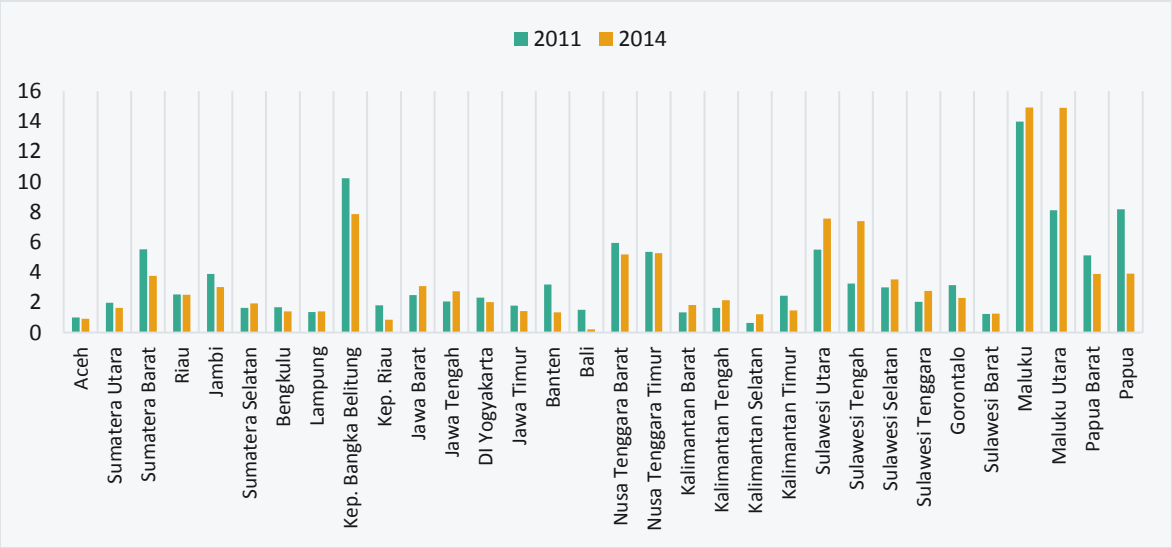


**Gambar 41. Insiden konflik per Provinsi 2011 dan 2014 (Persentase dari total Konflik)**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan 2014.

Tabel 9 menunjukkan jenis-jenis konflik yang terjadi di wilayah Indonesia selama setahun dari tengah tahun 2013 hingga 2014. Pola konflik yang sama terjadi baik di wilayah nasional, perkotaan, maupun perdesaan. Hanya saja, ada sedikit perbedaan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa yaitu wilayah Luar Jawa memiliki insidens konflik antar kelompok masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Jawa. Hal ini berbeda dengan studi Barron, Kaiser, dan Pradhan (2009) yang melihat aspek konflik yang sama namun menemukan bahwa wilayah Jawa mengalami insidens yang lebih tinggi dibandingkan dengan Luar Jawa. Perbedaan ini terjadi karena data yang digunakan Barron *et al.* (2009) adalah Potensi Desa 2003, sedangkan studi ini menggunakan data

terkini, yaitu data tahun 2014. Hal ini pula yang menggambarkan bahwa pola konflik di Indonesia sudah mulai berubah dari yang sebelumnya berbentuk konflik episodik sebelum tahun 2005 menjadi konflik rutin setelah tahun 2005 hingga sekarang (Tadjoeddin *et al.*, 2016).

**Tabel 9. Jenis Konflik berdasarkan Wilayah**

| Jenis konflik | Persentase Konflik (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nasional | Perkotaan | Perdesaan | Jawa | Luar Jawa |
| Antar kelompok masyarakat | 41.97 | 41.74 | 42.07 | 38.85 | **43.23** |
| Antar desa/kelurahan | 34.88 | 27.33 | 38.31 | 32.76 | **35.74** |
| Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan | 3.18 | 2.22 | 3.61 | 1.38 | **3.91** |
| Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah | 2.75 | 1.38 | 3.37 | 1.26 | **3.35** |
| Pelajar/mahasiswa | 10.43 | 20.13 | 6.02 | 19.89 | **6.61** |
| Antar suku | 1.76 | 1.69 | 1.78 | 0.46 | **2.28** |
| Lainnya | 5.03 | 5.51 | 4.82 | 5.40 | **4.89** |
| **Jumlah** | **3,019** | **944** | **2,075** | **870** | **2,149** |

Sumber: Diolah dari Podes 2014.

Terdapat hubungan dua arah antara kemiskinan dan konflik. Konflik dapat menyebabkan kemiskinan (Elbadawi dan Sambanis, 2002) karena konflik berpotensi mengurangi jumlah modal (modal fisik dan manusia) serta berkurangnya investasi di masa depan. Berkurangnya kedua hal ini pada akhirnya akan berpeluang menyebabkan rendahnya kondisi sosial ekonomi di masa depan, dan memperbesar peluang jatuh ke kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan juga berpotensi memperbesar peluang terjadinya konflik. Biaya atas kesempatan yang hilang dari konflik relatif kecil di negara yang miskin dan tingkat pertumbuhannya rendah (Elbadawi dan Sambanis, 2002). Sementara itu, pemimpin dari negara dengan tingkat perekonomian rendah cenderung untuk menimbulkan konflik agar dapat terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (Hess dan Orphanides, 1995). Collier *et al.* (2003) dan Braithwaite *et al.* (2011) juga menyebutkan bahwa negara dengan tingkat perekonomian yang rendah berpeluang untuk terjebak dalam siklus kemiskinan dan konflik.

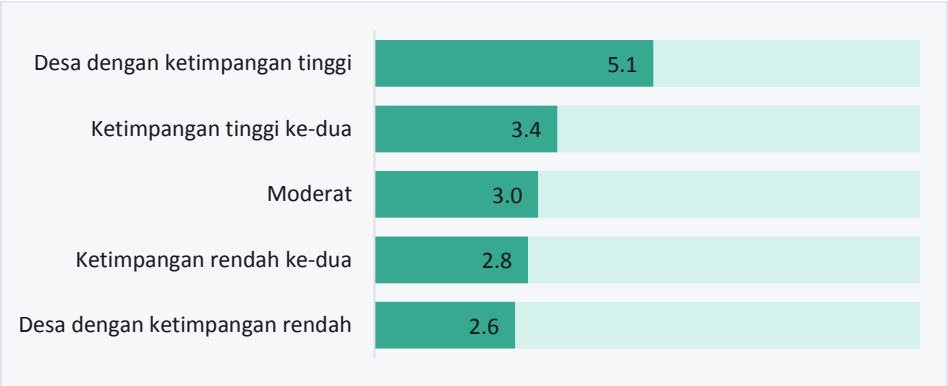


**Gambar 42. Desa yang Mengalami Konflik pada 2011 Berdasarkan Kelompok Ketimpangan Desa 2015 (%)**

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

Berdasarkan data Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015, terlihat bahwa desa-desa yang berada di kelompok ketimpangan tinggi cenderung mengalami konflik (Gambar 42). Ini menguatkan studi sebelumnya yang mencoba melihat konflik dan ketimpangan dari dua arah. Studi Tadjoeddin *et al.* (2016) mengkonfirmasi bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia memicu terjadinya konflik, sedangkan Elbadawi (1999) melihat bahwa konflik memiliki potensi untuk memicu peningkatan kemiskinan mengingat konflik mengurangi jumlah modal fisik dan manusia akibat kerugian yang ditimbulkannya.

# VII. KESIMPULAN DAN STUDI LANJUTAN

Studi ini menemukan bahwa perdesaan Indonesia sebenarnya semakin sejahtera dalam satu dekade terakhir. Namun, peningkatan kesejahteraan itu tidak diiringi dengan distribusi kesejahteraan yang merata. Ketimpangan yang ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan antarkelompok kesejahteraan di antaranya dapat dijelaskan oleh penguasaan modal yang lebih didominasi oleh kelompok terkaya sehingga merekalah yang lebih banyak menikmati keuntungan dari kemajuan ekonomi dan pembangunan perdesaan Indonesia. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi perdesaan adalah adanya transformasi struktural yang ditandai dengan peningkatan proporsi masyarakat desa yang beralih dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Meskipun demikian, peralihan sektor ini diduga hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki kapasitas modal penghidupan yang mumpuni sehingga keuntungannya pun terkonsentrasi pada masyarakat kelompok terkaya tersebut.

Analisis tabulasi silang antara indikator modal penghidupan dan kelompok kesejahteraan (20% terkaya dan 20% termiskin) di perdesaan mengungkap ketimpangan dalam penguasaan di kesemua jenis modal penghidupan, di beberapa indikator. Disparitas gender sangat nyata hampir di semua indikator modal sosial, kecuali penggunaan hak politik. Di sisi lain, perempuan perdesaan mampu mengejar ketertinggalan dalam akses terhadap pendidikan, bahkan di antara kelompok yang paling miskin. Sedangkan antarregional, ketimpangan paling nyata terjadi dalam aspek ketersediaan infrastruktur fisik dasar dan pendukung perekonomian.

Dalam satu dekade periode studi ini (2006-2016), beberapa kemajuan sudah dicapai oleh perdesaan. Dalam hal kapasitas sumber daya manusia, terjadi perbaikan akses pendidikan di perdesaan, bahkan dengan percepatan yang jauh lebih tinggi daripada di perkotaan. Disparitas akses antar kelompok kesejahteraan semakin mengecil dalam hal layanan dasar kehamilan dan persalinan. Begitupun dalam hal layanan imunisasi dasar, tidak diamati perbedaan antara desa dan kota. Sedangkan dalam penyediaan infrastruktur dasar, akses rumah tangga di perdesaan terhadap listrik terus mengalami peningkatan dan semakin mendekati kondisi rumah tangga perkotaan.

Di sisi lain, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi oleh desa-desa dalam wilayah perdesaan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ketimpangan tajam terjadi dalam hal penguasaan lahan. Setengah dari keseluruhan lahan di perdesaan Indonesia dikuasai oleh segelintir rumah tangga pertanian; sebagian besar rumah tangga pertanian sisanya rata-rata hanya mengelola kurang dari setengah hektar lahan pertanian. Ketimpangan penguasaan lahan ini bahkan lebih buruk daripada ketimpangan pendapatan sebagaimana tecermin pada indeks Gini lahan yang bernilai 0,63, sementara indeks Gini konsumsi bernilai 0,3 (2013). Selain itu, mengingat akses dan corak penghidupan erat terkait dengan tipologi geografis suatu wilayah, kedua hal tersebut turut berkontribusi dalam menghasilkan disparitas kesejahteraan antardesa.

Sekalipun sudah terjadi perbaikan capaian pendidikan di perdesaan dalam satu dekade terakhir, ketimpangan akses pendidikan masih terjadi antarkelompok kesejahteraan; masyarakat desa dalam kelompok kesejahteraan atas lebih banyak menikmati kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sampai pada tahun 2016 mayoritas masyarakat termiskin desa masih tidak memiliki ijazah atau hanya memiliki ijazah SD, sedangkan yang berhasil menyelesaikan pendidikan 12 tahun tidak lebih dari 13 persen saja. Dalam hal capaian gizi, ketimpangan tidak hanya nyata antarkelompok kesejahteraan, tetapi antara perdesaan-perkotaan dan antarregional Indonesia.

Di antara tantangan dalam penyediaan infrastruktur fisik adalah masih ditemukannya ketidakmerataan dalam sebaran lembaga keuangan ataupun pasar dan pertokoan. Bank komersial masih dominan berlokasi di wilayah perdesaan dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Sekalipun proporsi desa yang memiliki koperasi masih lebih tinggi dibandingkan yang memiliki bank komersial, keberadaannya sebagai lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan termiskin pun masih terbatas; begitupun ketersediaan pasar dan pertokoan, yang masih didominasi oleh wilayah perkotaan atau perdesaan maju. Selain itu, di tengah lonjakan rumah tangga pengguna listrik, ketimpangan terhadap akses listrik ini masih terjadi, baik antarkawasan regional atau antarkelompok kesejahteraan di dalam perdesaan itu sendiri.

Tantangan tidak kalah berat juga bersumber dari penguasaan modal sosial di dalam masyarakat perdesaan. Dikotomi tradisional dalam peranan gender kemungkinan menghalangi peran aktif perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, ancaman terhadap kohesi sosial muncul dari sikap primordialisme masyarakat, dengan kesamaan agama dan etnis masih menjadi keriteria utama dalam memilih pemimpin/wakil rakyat, juga dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Sikap primordialisme ini akan sangat berbahaya di tengah keragaman identitas masyarakat. Dalam hal ini, ditemukan adanya hubungan U-terbalik antara keragaman agama dan ketimpangan ekonomi. Artinya, semakin beragam agama yang dianut masyarakat di suatu wilayah, semakin timpang pula pendapatannya; hingga di satu titik tertentu, keberagaman agama tersebut justru berasosiasi dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah. Pada akhirnya, hal yang harus diwaspadai adalah konflik sosial. Pada periode pelaksanaan studi ini, ditemukan bahwa prevalensi konflik antarkelompok masyarakat di perdesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan, terlebih di luar Pulau Jawa. Selain itu, tampak ada asosiasi positif antara ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, yang bisa jadi merupakan hubungan dua arah sebagaimana dikonfirmasi oleh studi sebelumnya.

Sebagai penutup, pembangunan perdesaan yang inklusif mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan ikut menikmati peluang perbaikan penghidupan dan ikut merayakan peningkatan pertumbuhan perdesaan. Kertas kerja pertama ini merupakan sebuah upaya untuk memilah aspek-aspek yang menjadi sumber dari ketidakmerataan kesejahteraan di perdesaan Indonesia. Setidaknya, dari studi ini diharapkan akan ditemukan faktor-faktor yang kemungkinan menghalangi masyarakat kelompok termiskin untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, dan menghambat proses pengurangan ketimpangan perdesaan.

Studi ini mengidentifikasi beberapa hal yang diduga terkait atau turut berkontribusi dalam ketimpangan ekonomi perdesaan, di antaranya adalah rendahnya capaian pendidikan kelompok termiskin perdesaan, dominasi kelompok terkaya dalam penguasaan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih tersebar di desa-desa maju, serta ancaman kohesi sosial yang bersumber dari keberagaman identitas yang diiringi dengan sikap primordialisme dan berujung pada konflik sosial. Temuan ini selanjutnya akan disempurnakan oleh kertas kerja kedua yang akan menguji kekuatan kontribusi dari masing-masing faktor tersebut dan membandingkan besarannya dalam menjelaskan perubahan ketimpangan perdesaan. Berdasarkan temuan dari kertas kerja kedua tersebut, implikasi kebijakan yang lebih konkret dapat diformulasikan.

# DAFTAR ACUAN


Abadie, A. dan J. Gardeazabal (2003) 'The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country.' *American Economic Review* 93 (1): 113-32.

ADB (2016) 'Indonesia: Country Water Assessment.' Asian Development Bank.

Adams Jr.,R. H., dan J. Page (2005) 'Do International Migration dan Remmittances Reduce Poverty in Developing Countries?' *World Development* 33(10): 1645-1669.

Adams Jr., R. H. (2002) 'Nonfarm Income, Inequality, and Land in Rural Egypt.' *Economic Development and Cultural Change* 50(2): 339-363.

Anderson, K. (1987) 'On Why Agriculture Declines with Economic Growth.' *Agricultural Economics* 1: 195-207. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.

Annabi, N., S. Harvey, and Y. Lan (2011) 'Public Expenditures on Education, Human Capital and Growth in Canada: An OLG Model Analysis.' *Journal of Policy Modeling* 33:825–65.

Ahlerup, P., O. Olsson, dan D. Yanagizawa. (2009) 'Social Capital vs Institutions in the Growth Process.' *European Journal of Political Economy* 25: 1-14.

Akita, T., R. A. Lukman, dan Y. Yamada (1999) 'Inequality in the Distribution of Household Expenditures in Indonesia: A Theil Decomposition Analysis.' *The Developing Economies* 37 (2): 197-221.

Alesina, A. dan E. L. Ferrara (2005) 'Ethnic Diversity and Economic Performance.' *Journal of Economic Literature* 43(3): 762-800.

Alevizou, G., K. Alexiou, dan T. Zamenopoulos (2016) 'Making sense of assets: Community Assets Mapping and related Approaches.' *Working Paper*. London: The Open University and The AHRC.

Alison, E. dan N. Divya (2013) 'Collective Action and Women's Agency'. *Women's Voice, Agency, & Participation Research Series* 2013 No.4. The World Bank.

Aspinall, E., S. Dettman, dan E. Warburton (2011) 'When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study from Indonesia.' *South East Asia Research* 19:27–58.

Bajar, S., dan M. Rajeev (2016) 'The Impact of Infrastructure Provisioning on Inequality in India: Does the Level of Development Matter?' *Journal of Comparative Asian Development* 15(1): 122-155.

Baldacci, E., B. Clements, S. Gupta, and Q. Cui (2008) 'Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries.' *World Development* 36:1317–1341.

Balitbangkes (2013) 'Hasil RISKESDAS 2013.' Jakarta, Indonesia: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Barrett, C.B., L. Christiaensen, M. Sheahan, dan A. Shimeles (2017). 'On the Structural Transformation of Rural Africa.' *Journal of African Economies*, 26(1): 111-135.

Barron, P., K. Kaiser, dan M. Pradhan (2009) 'Understanding Variations in Local Conflict: Evidence and Implications from Indonesia.' *World Development* 37(3): 698-713.

Baumann, P. (2002) 'The Sustainable Livelihoods Approach and Improving Access to Natural Resources for the Rural Poor: A Critical Analysis of Central Concepts and Emerging Trends.' Rome: Food and Agricultural Organization.

Bergh, A. dan G. Fink (2009) 'Higher education, elite institutions and inequality.' *European Economic Review* 53(3), pp.376-384.

Bibler, S., V. Mohan, dan K. Ryan (2014) 'Keseteraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik'. International Foundation for Electoral Systems.

Bjornskov, C., dan P.G. Meon (2015) 'The Productivity of Trust.' *World Development* 70: 317-331.

Blair, G., C. C. Fair, N. Malhotra, dan J. N. Shapiro (2013) 'Poverty and Support for Militant Politics: Evidence from Pakistan.' *American Journal of Political Science* 57(1): 30-48.

Blattman, C., dan E. Miguel (2010) 'Civil War.' *Journal of Economic Literature* 48(1): 3-57.

Bloom, D. E., T. Khanna (2007) 'Urban Revolution: Rapid urbanization may prove a blessing, provided the world takes notice and plans accordingly.' *Finance and Development* (September): 9-14.

Bosworth, G. (2014) 'Social Capital and Rural Development in the Knowledge Society.' H. Westlund dan K. Kobayashi, dan E.ElgaRr (eds.) *Reviews Social Policy & Administration*, 48: 928-929.

BPS (2017) 'Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia.' Badan Pusat Statistik.

Braithwaite, J., V. Braithwaite, M. Cookson, L. Dunn (2010) 'Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding.' Australian National university.

Calderon, C. dan L. Serven (2004) 'The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution.' *Policy Research Working Papers.* The World Bank.

Carletto, G., K. Covarrubias, B. Davis, M. Krausova, K. Stamoulis, P. Winters, dan A. Zezza (2007) 'Rural Income Generating Activities in Developing Countries: Re-assessing the Evidence.' *Journal of Agricultural and Development Economics* 4(1): 146-193.

Castello, A., and R. Domenech (2002) 'Human Capital Inequality and Economic Growth: Some New Evidence.' *The Economic Journal* 112(478): 187-200.

Cavendish, W. (1999) 'How Do Forests Support, Insure, and Improve the Livelihoods of the Rural Poor: A Research Note.' Bogor: Central for International Forestry Research.

Chadwick, K. A., dan P. A. Collins. (2015) 'Examining the Relationship between Social Support Availability, Urban Center Size, and Self-Perceived Mental Health of Recent Immigrants to Canada: A Mixed-Methods Analysis.' *Social Science & Medicine* 128: 220–30.

Charlery, L. C., M. Qaim, and C. Smith-Hall (2016) 'Impact of infrastructure on rural household income and inequality in Nepal.' *Journal of Development Effectiveness* 8(2): 266-286.

Chirițescu, V., M. Bălan, dan C. S. Bucur (2015) 'The Quality of Human Resources-A Determinant of Sustainable Rural Development in Romania.'

Chongvilaivan, A. dan J. Kim (2016) 'Individual Income Inequality and Its Drivers in Indonesia: A Theil Decomposition Reassessment.' *Social Indicators Research* 126(1): 79-98.

Cleaver, F. (2005) 'The Inequality of Social Capital and the Reproduction of Chronic Poverty.' *World Development* 33(6): 893-906.

Collier, P., V,L. Elliot, H. Hegre, A. Hoeffler, M. Reynal-Querol, dan N. Sambanis (2003) 'Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. A World Bank Policy Research Report.' The World Bank and Oxford University Press.

Collier, P. (1999) 'On the Economic Consequences of Civil War.' *Oxford Economic Papers* 51(1): 168-83.

Cook, P. (2011), 'Infrastructure, Rural Electrification, and Development'. *Energy for Sustainable Development*, 15(3), pp. 304-313.

Cotula, L. (ed.) (2006) 'Land and water rights in the Sahel: Tenure challenges of improving access to water for agriculture.' Livelihood Support Programme Working Paper 25. Food and Agriculture Organization.

Cowell, F. A. (2007) 'Income Distribution and Inequality.' London School of Economics.

Cui, W. (2017) 'Social Trust, Institution, and Economic Growth: Evidence from China'. *Emerging Markets Finance and Trade,* 53:6, 1243-1261, DOI:10.1080/1540496X.2016.1264299

Dabla-Norris,E., K. Kochhar, N. Suphaphiphat, F. Ricka, dan E. Tsounta (2015) 'Cause and Consequenses of Income Inequality: A Global Perspective.' *IMF Staff Discussion Note*. International Monetary Fund.

Djankov, S., P. Miranda, E. Seira, and S. Sharma (2008) 'Who Are the Unbanked?' *World Bank Policy Research Working Paper* No. 4647

Datt, G. dan M. Ravallion (2002) 'Is India's Economic Growth Leaving the Poor Behind?' *Journal of Economic Perspective* 16(3): 89-108.

Dearmon, J., dan K. Grier (2009) 'Trust and Development.' *Journal of Economic Behavior & Organization* 71: 210-220.

de Haan, A. dan S. Thorat (2013) 'Inclusive Growth: More than Safety Nets.' SIG Working Paper 2013/1. Ottawa: International Development Research Centre.

Démurger, S. dan X. Wang. (2016) 'Remittances and Expenditure Patterns of the Left Behinds in Rural China.' *China Economic Review* 37: 177-90.

de Janvry, A. E. Sadoulet, dan N. Zhu (2005) 'The Role of Non-Farm Incomes in Reducing Rural Poverty and Inequality in China.' CUDARE Working Papers. University of California Barkeley.

Dey, I. dan R.N.Chaudhuri (2008) 'Gender inequality in nutritional status among under five children in a village in Hooghly district, West Bengal.' *Indian J Public Health* 52(4), pp.218-20.

DFID (1999) 'Sustainable Livelihoods Guidance Sheets.' Department for International Development.

Dincer, O. C. dan M. J. Hotard (2011) 'Ethnic and Religious Diversity and Income Inequality.' *Eastern Economic Journal* 37(3): 417-430.

Dominguez, S. dan C. Watkins (2003) 'Creating Networks for Survival and Mobility: Social Capital among African-American and Latin-American Low-Income Mothers.' *Social Problem* 50: 111-135.

Easterly, W., J. Ritzen, dan M. Woolcock (2006) 'Social Cohesion, Institutions, and Growth.' *Economics and Politics* 18(2): 103-120.

Eastwood, R., dan M. Lipton (2000) 'Rural-Urban Dimensions of Inequality Change.' Working Paper No.200. UNU World Institute for Development Economics Research.

Elbadawi, I. dan N. Sambanis (2002) 'How Much War Will We See? Explaining the Prevalence of Civil War.' *The Journal of Conflict Resolution* 46(3): 307-34.

Elbers, C., J. O. Lanjouw, dan P. Lanjouw (2003) 'Micro-Level Estimation of Poverty and Inequality.' *Econometrica* 71(1): 354-364.

Fair, C. C. dan B. Shepherd (2006) 'Who Supports Terrorism? Evidence from Fourteen Muslim Countries.' *Studies in Conflict & Terrorism* 29(1): 51-74.

Fantom, N., dan U. Serajuddin (2016) 'The World Bank's Classification of Countries by Income.' *Policy Research Working Paper* (7528). The World Bank.

FAO (1995) 'Retail Markets Planning Guide.' FAO Agricultural Services Bulletin 121. Food and Agricultural Organization.

FAO (2002) 'Highland-Lowland Interactive Systems'. Draft of Document for FAO-FORC/IYM 2002.

FAO (2011) 'The state of the worls's land and water resource for food and agriculture (SOLAW): Managing system at risk.' Food and Agriculture Organization.

Fisher, M. (2004) 'Household Welfare and Forest Dependence in Southern Malawi.' *Environment and Development Economics* 9(2): 135-154.

Garasky, S., L. W. Morton, dan K. A. Greder. (2006) 'The Effects of the Local Food Environment and Social Support on Rural Food Insecurity.' *Nutrition* 1: 83-103.

Garthwaite, K., and C. Bambra (2017) 'How the Other Half Live': Lay Perspectives on Health Inequalities in an Age of Austerity.' *Social Science & Medicine* 187:268–75.

Ginting, E., dan P. Aji (2015) 'Summary of Indonesia's Economic Analysis.' ADB Papers on Indonesia (2). Asian Development Bank.

Green, A., J. Preston, dan R. Sabates (2003) 'Education, Equality and Social Cohesion: A Distributional Approach.' *Compare* 33(4): 453-470.

Harpham, T. (2008) 'The Measurement of Community Social Capital through Surveys.' *Social Capital and Health*: 51-62.

Haughton, J. H., dan S. R. Khandker (2009). "Handbook on Poverty and Inequality". Washington, DC: World Bank.

Healy, K., M. Haynes, dan A. Hampshire (2007) 'Gender, Social Capital and Location: Understanding the Interactions.' *International Journal of Social Welfare* 16(2): 110–18.

Heriyaldi, H. and Yusuf, A. (2013) 'Does Micro Finance Institution Improve Welfare? A Double Difference Analysis of Indonesian Community-level Data', *Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS)* No 201307, Department of Economics, Padjadjaran University

Heshmati, A. (2004) 'Inequality and Their Measurement.' *IZA Discussion Paper Series* (1219). Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA).

Hess, G.D., dan A. Orphanides (1995) 'War Politics: An Economic, Rational-Voter Framework.'*The American Economic Review* 85(4): 828-846.

Hoddinott, J., J. A. Maluccio, J. R.Berhrman, R. Flores, and R. Martorell (2008) 'Effect of a nutrition intervension during early childhood on economic productivity in Guatemalan adults.' *Lancet* 371: 411-416.

Hoover, E. (1948) 'The Location of Economic Activity.' Mcgraw-Hill Book Company Inc.

Horowitz, D. L. (1985) 'Ethnic Groups in Conflict.' Berkeley: University of California Press.

Hugo, G. (2014) 'World Migration Report 2015: Urban Migration Trends, Challenges, Responses and Policy in the Asia-Pacific.' *Background Paper*. International Organization for Migration.

Hugo, G. (1982) 'Circular Migration in Indonesia.' *Population and Development Review* 8: 59-83.

Imai, K. dan J. M. Weinstein (2000) 'Measuring the economic impact of civil war.' *CID Working Papers (51)*. Center for International Development, Harvard University.

Infodatin (2014) 'Maternal Health Issues.' Jakarta: Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan.

Ingham, B., A. Chirijevskis, dan F. Carmichael (2009) 'Implication of an increasing old-age dependency ratio: The UK and Latvian experiences compared.' *Pensions* 14(4): 221-230.

Interlenghi, G., d.S., dan R. Salles-Costa (2015) 'Inverse Association between Social Support and Household Food Insecurity in a Metropolitan Area of Rio de Janeiro, Brazil.' *Public Health Nutrition* 18: 2925-2933.

Isnayni, E. (2017) 'Relationship Mothers' Knowledge, Family's Income, Family Role and Basic Immunization Status.' *Jurnal Berkala Epidemiologi* 4(3): 360-370.

Ives, J. D. (2001) 'Highland-Lowland Interactive System.' Draft of Document for FAO-FORC/IYM 2002.

Janvry, A. de dan E. Sadoulet (1993) 'Rural Development in Latin America: Relinking Poverty Reduction to Growth', dalam *Including the Poor*, ed. M. Lipton and J. van der Gaag (Washington, D.C.: World Bank, 1993).

Joedadibrata, D. (2012) 'A Study of the Shift towards Universal Social Policy in Indonesia.' International Institute of Social Studies.

Kato, H. (2017) 'The Challenge to Religious Tolerance: Fundamentalists' Resistance to A Non-muslim Leader in Indonesia.' *Comparative Civilizations Review* (77): 77-89.

Kawachi, I., S.V. Subramanian, dan D. Kim (2008) 'Social Capital and Health: A Decade of Progress and Beyond.' *Social Capital and Health*, New York: Springer.

Kawachi, I., B. P. Kennedy, K. Lochner (1997) 'Social Capital, Income Inequality, and Mortality. *American Journal of Public Health* 87(9):1491-1498.

Khandker, S. R., Z. Bakht, G. B. Koolwal (2006) 'The Poverty Impact of Rural Roads: Evidence from Bangladesh.' *World bank Policy Research Working Paper* 3875.

Kim, J.M., R. Stewart, I. S. Shin, J.S. Yoon, dan H.Y. Lee (2004) 'Lifetime Urban/Rural Residence, Social Support and Late-Life Depression in Korea.' *International Journal of Geriatric Psychiatry* 19(9): 843–51.

King, C. (2017) 'Informal Assistance to Urban Families and the Risk of Household Food Insecurity.' *Social Science & Medicine* 189: 105-113.

Knack, S. dan P. Keefer (1997) 'Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation.' *Quarterly Journal of Economics* 112(4): 1251-1288.

Kozel, V. dan B. Parker (2000) 'Integrated Approaches to Poverty Assessment in India.'

Lilius, J. (2016) 'Domesticfication of Urban Space? Mothering and Fathering While on Family Leave in the Inner City of Helsinki.' *Gender, Place & Culture* 23(12): 1763-1773.

LANDac (2015) 'Food Security and Land Governance Factsheet: Indonesia.' Land Governance for Equitable and Sustainable Development (LANDac).

Lipton, M. (1980) 'Migration from Rural Areas of Poor Countries: The Impact on Rural Productivity and Income Distribution.' *World Development* 8: 1-24.

Loakimidis, M. dan H. Heijke (2016) 'Income Inequality and Social Capital, Are They Negatively Related? European Cross-Country Analyses 2006-2012.' *Journal of Developing Areas* 50(1): 215-235.

Lopez, H. dan Q. Wodon (2005) 'The Economic Impact of Armed Conflict in Rwanda.' *Journal of African Economies* 14(4): 586–602.

Nakajima, T., and H. Nakamura (2009) 'The Price of Education and Inequality.' *Economics Letters* 105:183–85.

Nakamura T., dan Y. Murayama (2012) 'Education Cost, Intergenerational Mobility, and Income Inequality.' Economics Letters 112:266–269.

Maldonado, J. H., dan C. Gonzalez-Vega (2004) 'Linking poverty, naturalresource, and financial markets: a model of land use by rural households in El Salvador.' Paper presented for presentation at the Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association.

Martin, W. and P. Warr (1990) 'The Declining Economic Importance of Agriculture.' Australian National University.

Martorell, R., P. Melgar, J.A. Maluccio, A.D. Stein dan J.A.Rivera (2009) 'The nutrition intervention improved adult human capital and economic productivity.' *The Journal of nutrition* 140(2), pp.411-414.

McKay, A. (2002) 'Defining and Measuring Inequality.' Briefing Paper (1). Overseas Development Institute and University of Nottingham.

McCulloch, N., J. Weisbrod, C. P. Timmer. (2007) 'Pathways Out of Poverty during an Economic Crisis: An Empirical Assessment of Rural Indonesia.' *World Bank Policy Research Working Paper* 4173, March 2007

Meng, X. (2010) 'The Great Migration: Rural-Urban Migration in China and Indonesia.' Cheltenham, UK: Northampton, MA: Edward Elgar.

Meng, X., and C. Manning (eds.) (2012) 'The Great Migration: Rural-Urban Migration in china and Indonesia. *Canadian Studies in Population* 39 (3-4): 129-130.

Milligan, S. (2012) 'Economic Inequality, Poverty, and Tolerance: Evidence from 22 Countries.' *Comparative Sociology* 11: 594–619.

Miyazaki, S. dan Y. Shimamura (2014) 'Risk, Infrastructure, and Rural Market Integration: Implications of Infrastructure Provision for Food Markets and Household Consumption in Rural Indonesia.' *JICA-RI Working Paper* (81). Japan International Cooperation Agency.

Mollers, J. and W. Meyer (2014) 'The effects of migration on poverty and inequality in rural Kosovo.' *IZA Journal of labor and Development* 3: 1-18.

Montalvo, J. G. dan M. Reynal-Querol (2005) 'Ethnic Diversity and Economic Development.' *Journal of Development Economics* 76(2): 293-323.

Morse, S., N. McNamara, and M. Acholo (2009) 'Sustainable Livelihood Approach: A critical analysis of theory and practice.' *Geographical paper* (189). The University of Reading.

Morton, L.W., E. A. Bitto, M. J. Oakland., dan M. Sand. (2005). "Solving the Problems of Iowa Food Deserts: Food Insecurity and Civic Structure". *Rural Sociology,* 70: 94-112.

Moser, C. dan A. A. Dani (2008) 'Assets, Livelihoods, and Social Policy.' Washington DC: World Bank.

Mousseau, M. (2011) 'Urban Poverty and Support for Islamist Terror: Survey Results of Muslims in Fourteen Countries.' *Journal of Peace Research* 48(1): 35–47.

Muntaner, C. (2004) 'Commentary: Social Capital, Social Class, and the Slow Progress of Psychosocial Epidemiology.' *International Journal of Epidemiology,* 33: 674-680.

Najnin, N., C.M. Bennett, dan S.P. Luby (2011) 'Inequalities in care-seeking for febrile illness of under-five children in urban Dhaka, Bangladesh.' *Journal of health, population, and nutrition* 29(5).

Norris, P., R. Inglehart (2003) 'Gendering Social Capital:Bowling in Women's Leagues?' John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

Ottaviano, G.I.P.,dan G. Prarolo. (2009) 'Cultural Identity and Knowledge Creation in Cosmopolitan Cities.' *Journal of Regional Science,* 49: 647–662.

O'Donnell, O., Van Doorslaer, E. dan Van Ourti, T. (2015) 'Health and inequality'. *Handbook of Income Distribution* (Vol. 2, pp. 1419-1533). Elsevier.

Palmer-Fernandez, G. (ed.) (2004) 'Encyclopedia of Religion and War.' New York: Routledge.

Pepinsky, T. B., R. W. Liddle, dan S. Mujani. (2012) 'Testing Islam's Political Advantage: Evidence from Indonesia.' *American Journal of Political Science* 56(3): 584-600.

Pieters, J.(2011) 'Education and Household Inequality Change: A Decomposition Analysis for India.' *Journal of Development Studies* 47(12): 1909-1924.

Putnam, R. D. (2007) 'E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century, the 2006 Johan Skytte Prize Lecture.' *Scandinavian Political Studies* 30(2): 137-174.

Putnam, R. D. (2000) 'Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.' New York: Simon & Schuster.

Putnam, R. D. (1995) 'Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America.' *Political Science and Politics* 28(4): 664-683.

Putra, I. E. (2016) 'Representations and Discourse about Religion and Chinese Descendants in 2012 Jakarta's Election.' *The Qualitative Report* 21(10): 1799.

Randrianarisoa, J. C., B. Minten (2001) 'Agricultural Production, Agricultural Land and Rural Poverty in Madagascar. Cornell University.

Razmi, M. J., dan Z. Ghaffary. (2015) 'Investigating the Interactions between Income Inequality and Social Capital: Using Panel Data Pattern.' *International Journal of Economics and Research* 6(1): 9-19.

Rink, A., dan K. Sharma (2016) 'The Determinants of Religious Radicalization: Evidence from Kenya.' *Journal of Conflict Resolution* 62(6): 1229–1261.

Runsinarith, P. (2008) 'Infrastructure Development and Poverty Reduction: Evidence from Cambodia's Border Provinces.' Graduate School of International Studies. Nagoya University.,

Saad-Filho, A. (2010) 'Growth, Poverty, and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth.' *DESA Working Paper* (100). United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Salverda, W., Nolan, B. and Smeeding, T.M. (2011) 'The Oxford Handbook of Economic Inequality' Oxford University Press.

Santacreu, A.M. (2016) 'Long-Run Economic Effects of Changes in the Age Dependency Ratio.' *Economic Synopses* (17), pp.1-2.

Saragih, S., J. Lassa, A. Ramli (2007) 'Kerangka Penghidupan Berkelanjutan.' HIVOS SouthEast Asia Office.

Raychaudhuri, A., P. De (2010) 'Economic Corridors, Trade Cost, and Regional Production Networks in South Asia.' dalam De.,P. dan K. Iyengar (eds.) (2010) *Developing Economic Corridors in South Asia*. Asian Development Bank.

Scoones, I. (1998) 'Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis.' *IDS Working Paper* (72). Institute of Development Studies.

Spain, D. (2014) 'Gender and Urban Space.' *Annual Review of Sociology* 40(1): 581-598.

Story, W.T., R. M. Carpiano. (2017) 'Household Social Capital and Socioeconomic Inequalities in Child Undernutrition in Rural India.' *Social Science & Medicine* 181: 112-121.

Sulistiyanto, P. (2018) 'Indonesia in 2017: Jokowi's Supremacy and His Next Political Battles.' *Southeast Asian Affairs* 2018: 153-166.

Sumarto, S., M. Vothknecht, dan L. Wijaya (2014) 'Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence from Decentralized Indonesia.' *SMERU Working Paper*. The SMERU Research Institute.

Surbakti, S. and T. Devasahayam (2015) 'Women and Girls in Indonesia: Progress and Challenges.' Jakarta, Indonesia: UNFPA.

Suryahadi, A., P. Chen, R. Tyers (2001) 'Openess, Technological Change and Labor Demand in Pre-Crisis Indonesia.' *Working Papers in Economics and Econometrics* (377). Australian National University.

Suryahadi, A., G. Hadiwidjaja, S. Sumarto (2012) 'Economic Growth and Poverty reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis.' *SMERU Working Paper*. Jakarta: The SMERU Research institute.

Suryahadi, A., J. Marshan, dan V. Indrio. (2018) 'Chapter 4 Structural Transformation and the Release of Labor from Agriculture.' dalam *Indonesia Enhancing Productivity Through Quality Jobs*. Asian Development Bank: 100-129.

Sylwester, K. (2000) 'Income Inequality, Education Expenditures, and Growth.' *Journal of Development Economics* 63:379–98.

Tabor, S. R. (2015) 'Constraints to Indonesia's Economic Growth. *ADB Papers on Indonesia* (10). Asian Development Bank.

Tadjoeddin, M. Z., A. Yumna, S. Gultom, F. Rakhmadi, F. Hidayat, dan A. Suryahadi. (2016) 'Inequality and Stability in Democratic and Decentralized Indonesia.' *SMERU Working Paper.* Jakarta, Indonesia: SMERU Research Institute.

Tadjoeddin, M. Z., dan S. M. Murshed. (2007) 'Socio-Economic Determinants of Everyday Violence in Indonesia: An Empirical Investigation of Javanese Districts, 1994—2003.' *Journal of Peace Research* 44(6): 689–709.

The World Bank (2016) 'Taking on Inequality: Poverty and Shared Prosperity 2016.' The World Bank.

The World Bank (2015) 'Country Partnership Framework for The Republic of Indonesia for the period FY16-FY20.' The World Bank.

The World Bank (2014) 'Indonesia: Avoiding The Trap.' *Development Policy Review* 2014. Jakarta, Indonesia: World Bank Office Jakarta.

The World Bank (2007) 'Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access.' *Policy Research Paper*. World Bank.

UNCTAD (2013) 'Growth and Poverty Eradication: Why Addressing Inequality Matters.' Post-2015 Policy Brief (2). United Nations Conference on Trade and Development.

UNDP (2015) 'Converging Development Agendas: Nawa Cita, RPJMN, and SDGs.' United Nations Development Programme Indonesia Country Office.

United Nations (2015) 'Concepts of Inequality.' United Nations Development Strategy and Policy Analysis Unit Development Issues (1). United Nations Development Strategy and Policy Analysis Unit

Vincens, N., M. Emmelin, dan M. Stafström (2018) 'Social Capital, Income Inequality and the Social Gradient in Self-Rated Health in Latin America: A Fixed Effects Analysis.' *Social Science and Medicine* 196:115–22.

Wagner, W., P. Holtz, dan Y. Kashima (2009) 'Construction and Deconstruction of Essence in Representing Social Groups: Identity Projects, Stereotyping, and Racism.' *Journal for the Theory of Social Behaviour* 39(3): 363-83.

Warren, M., R., J. P. Thompson, dan S. Saegert. (2001) 'The Role of Social Capital in Combating Poverty.'

Wilkinson, R. G. (2002) 'Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality.' Routledge.

Yang, J., and M. Qiu (2016) 'The Impact of Education on Income Inequality and Intergenerational Mobility.' *China Economic Review* 37:110–125.

Yusuf, A. A., A. Sumner, dan I. A. Rum (2014) 'Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993–2013.' *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 50(2):243-254.

# LAMPIRAN

## Tabel A1. Deskripsi Umum Sumber-Sumber Data

| Sumber data | Jumlah sampel | Tahun tersedia | Tingkat keterwakilan terendah | Unit analisis | Topik | Pemakaian dalam penelitian ini (topik dan tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) | 2016 mencakup 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia | 1963 - 2017 | Kabupaten/ kota | Rumah tangga | Demografi, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, tempat tinggal, perlindungan sosial, kepemilikan aset.<br>Topik-topik khusus (modul kekhususan) | 2006 – 2016 |
| Sensus Penduduk (SP) | Seluruh penduduk yang tinggal dalam wilayah teritorial<br>Indonesia | 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 (sepuluh tahunan) | Desa | Individu/<br>penduduk | Data dasar kependudukan, struktur anggota rumah tangga, pendidikan, budaya, disabilitas, fertilitas, mortalitas, migrasi, ketenagakerjaan, dan fasilitas perumahan | 2000 dan 2010 |
| Sensus Pertanian (ST) | Seluruh usaha pertanian, baik pada rumah tangga biasa, perusahaan berbadan hukum, maupun selain rumah tangga biasa dan perusahaan berbadan hukum.<br>Pada 2013 mencakup sekitar 26,1 juta rumah tangga pertanian; 4.165 perusahaan; dan 5.922 unit usaha pertanian lainnya | 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 dan 2013 (sepuluh tahunan) | Desa | Rumah Tangga pertanian | Keterangan rumah tangga usaha pertanian, Penguasaan/pengusahaan/kegiatan tanaman pangan (padi dan palawija), Pengusahaan tanaman hortikultura, pengusahaan tanaman perkebunan, Penguasaan/pengusahaan ternak, Pengusahaan kegiatan perikanan, Pengusahaan tanaman kehutanan dan kegiatan kehutanan lainnya, Keterangan penguasaan lahan rumah tangga | 2013 |
| Potensi Desa (Podes) | Seluruh desa di Indonesia. Pada 2014, mencakup 73.709 desa | 1980 - 2014 (3 kali dalam 10 tahun) | Kabupaten /Kota | Desa | Infrastruktur, populasi dan kesehatan reproduksi, lingkungan, pendidikan | 2011 dan 2014 |
| Indonesian Family Life Survey (IFLS) | Mencakup 30.000 individu di 13 provinsi di Indonesia | 1993, 1997, 2000, 2007, 2014 | Nasional | Individu, rumah tangga, desa/ kelurahan | | 2000, 2007, dan 2014 |
| Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia/ *Poverty and Livelihood Map Indonesia* | Mencakup 77.012 desa/ kelurahan di seluruh Indonesia | 2005 dan 2010 | Desa/ kelurahan | Desa/kelurahan, kecamatankabu paten | | 2015 |
| Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) | Mencakup 290.000 rumah tangga | 2013 | Provinsi | Individu, rumah tangga, | Status nutrisi individu usia kurang dari 60 bulan | 2013 |

Sumber: Berbagai sumber

**The SMERU Research Institute**

Telepon : +62 21 3193 6336
Faksimili : +62 21 3193 0850
Surel : smeru@smeru.or.id
Situs web : www.smeru.or.id
Facebook : @SMERUInstitute
Twitter : @SMERUInstitute
YouTube : The SMERU Research Institute